

**PERANAN ZAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT MISKIN PENERIMA
PROGRAM BEDAH RUMAH DI KOTA PADANG)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**FADELAN FITRA MASTA
L4D 008 038**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PERANAN ZAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT MISKIN PENERIMA
PROGRAM BEDAH RUMAH DI KOTA PADANG)**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**FADELAN FITRA MASTA
L4D 008 038**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal: 7 Januari 2010

Dinyatakan lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 7 Januari 2010

Tim Penguji:

Mohammad Muktiali, SE, M.Si, MT - Pembimbing
Ir. Mardwi Rahdriawan, MT - Penguji 1
DR. Ing. Asnawi Manaf - Penguji 2

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.

Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan dari tesis orang/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Semarang, 7 Januari 2010

FADELAN FITRA MASTA

NIM L4D 008 038

PERSEMBAHAN

Puisi Mereka

*Uang ada, nanti malam pasti kan habis
Ayah bekerja, tapi awas jangan sampai sakit
Kita tidak susah, tapi gembira
Saling bertanya kabar selepas maghrib
Canda tawa sampai keluar air mata*

*Suatu saat tiba ayah pergi
Kemana, apa, bagaimana
Semua jadi tanya
Ah!
Andai dulu ayah mampu bangun rumah sendiri*

Puisi Rumah

*Itu tempat
Sebuah paku kecil tempat ayah menggantung baju
Sebuah vas bunga cantik kesayangan ibu
Tempat membuang pecahan kaca yang sempat menembus kakiku

Kemana menjemputku jika mengajak bermain layang-layang
Kemana ayah dan ibu menyuruhku pulang*

*Itu tempat
Andai dulu ayah mampu bangun rumah sendiri*

Kupersembahkan

*Untuk mereka

Andai semua membayar zakat
Andai hanya satu amil zakat
Andai dana zakat dibuatkan banyak rumah*

Mereka

Punya rumah

ABSTRAK

Salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin. Sistem pembiayaan perumahan formal sulit dijangkau karena lemahnya akses masyarakat miskin terhadap bank. Sejalan dengan permasalahan tersebut, Badan Amil Zakat Kota Padang meluncurkan program bedah rumah sebagai salah satu bagian dari sistem pengelolaan zakat. Penelitian ini berangkat dari evaluasi program serta kerisauan publik atas efektifitas pendayagunaan zakat ini. Adapun pertanyaan yang harus terjawab adalah bagaimana peranan zakat dalam rangka peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin di Kota Padang?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran, perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sensus melalui kuesioner, observasi, dan wawancara terhadap 11 (sebelas) penerima program bedah rumah di Kota Padang. Terdapat dua teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Proses analisis dimulai pada analisis bantuan dan persepsi masyarakat penerima zakat terhadap bantuan tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis perubahan kualitas rumah sesudah dibedah serta persepsi masyarakat penerima zakat terhadap perubahan kualitas rumah tersebut.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat memiliki peran cukup signifikan dalam peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin di Kota Padang sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan informal.

Kata kunci: *pendayagunaan zakat, peningkatan kualitas rumah, masyarakat miskin, pengelolaan zakat.*

ABSTRACT

One of the problems of housing and settlements in Indonesia is the low level of subsistence for the poor house. Formal housing finance system is difficult to reach because of the poor are bankable. Accordingly, Amil Zakat Board Padang launched home improvement programme as part of the management system of zakat. This research started from the evaluation of programs and public concerns on the effectiveness of utilization of zakat. The question that must be answered is how the role of zakat in order to improve the quality of the poor house in Padang?

The approach used in this research is mixed approach; quantitative and qualitative. The collection of census data conducted through questionnaires, observations, and interviews with eleven home improvement beneficiaries in Padang. There are two analytical techniques used in this study, the descriptive statistics and qualitative descriptive.

The analysis research begins on the analysis of aid and charity recipients public perception of such financing assistance. Then the analysis of changes in the quality of the home after the surgery and the recipient's perception due to changes in the quality of the house.

The study revealed that the zakat has a significant role in improving the quality of the poor house in Padang as a source of informal housing finance.

Key Words: *housing finance, home improvement, poor, zakat management.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah, SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Rumah (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang)”*.

Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Dalam tesis ini penulis mengkaji peranan zakat dalam rangka peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin dan tergolong kedalam masyarakat penerima zakat di Kota Padang. Penelitian ini sangatlah penting terkait pengalokasian zakat sebagai sumber pembiayaan informal di bidang perumahan dan permukiman.

Dengan selesainya Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Joesron Ali Syahbana, M.Sc selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota;
2. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku Sekretaris Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota;
3. Bapak Ir. Hasto Agoeng Sapoetro, MT selaku Kepala Balai Peningkatan Keahlian Pengembangan Wilayah dan Teknik Konstruksi Semarang;
4. Bapak Mohammad Muktiali, SE, M.Si, MT selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak Ir. Mardwi Rahdriawan, MT selaku Dosen Penguji 1;
6. Bapak DR. Ing. Asnawi Manaf selaku Dosen Penguji 2;
7. Bapak Prihadi Nugroho, ST, MT, MPP selaku Dosen Penguji Pratesis;
8. Segenap staf dan dosen Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro;
9. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Asian Development Bank selaku pemberi beasiswa;
10. Pemerintah Kota Padang sebagai pemberi Tugas Belajar;
11. Apa, Ama, Uda dan Adik-adikku tercinta yang setiap saat mengiringi langkahku dengan doa;

12. Istriku tercinta Vina Oktavia, SH yang memberikan segenap energi, dukungan dan cinta;
13. Rekan-rekan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang;
14. Rekan-rekan Magister Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Universitas Diponegoro;
15. Semua pihak pemberi dukungan dan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi bekal untuk melangkah pada kegiatan penelitian selanjutnya dan bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi Pemerintah Kota Padang.

Semarang, 7 Januari 2010

Penulis,

Fadelan Fitra Masta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Sasaran Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.5.1. Ruang Lingkup Substansial	6
1.5.2. Ruang Lingkup Spasial	7
1.6. Kerangka Pikir Penelitian	8
1.7. Pendekatan dan Metodologi Penelitian	10
1.8. Sistematika Penulisan	18
BAB II. ZAKAT DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN	
2.1. Studi tentang Peran	19
2.2. Zakat	20
2.2.1. Pengertian Zakat Secara Syar'i	20
2.2.2. Pengertian Zakat Secara Normatif	22
2.2.3. Zakat Sebagai Salah Satu Instrumen Pembiayaan Pembangunan	23
2.3. Pembiayaan Perumahan Masyarakat Miskin	27
2.3.1. Masyarakat Miskin	27
2.3.2. Pembiayaan Perumahan Masyarakat Miskin di Negara-Negara Berkembang	28

2.3.3. Pembiayaan Perumahan Masyarakat Miskin di Indonesia	35
2.4. Bedah Rumah dan Konsep Kualitas Rumah	38
2.4.1. Pengertian Rumah	38
2.4.2. Konsep Kualitas Rumah	40
2.4.3. Bedah Rumah Sebagai Usaha Peningkatan Kualitas Rumah	48
2.5. Persepsi	49
2.6. Sintesa Literatur	50

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

3.1. Kondisi Fisik Kota Padang	55
3.1.1. Luas Wilayah	55
3.1.2. Orientasi Wilayah	56
3.1.3. Tata Guna lahan	57
3.2. Tinjauan Sosial Kependudukan	58
3.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	58
3.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	58
3.2.3. Agama	59
3.3. Pengelolaan Dana Zakat di Kota Padang	59
3.3.1. Program Pengentasan Kemiskinan	59
3.3.2. Kegiatan Bedah Rumah di Kota Padang	61
3.3.3. Kegiatan Bedah Rumah Lainnya di Kota Padang ...	63

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Program Pengelolaan Zakat dan Mekanisme Kegiatan Bedah Rumah di Wilayah Studi	65
4.1.1. Pengelolaan Zakat di Kota Padang	65
4.1.2. Mekanisme Kegiatan Bedah Rumah Melalui Dana Amil Zakat Kota Padang	70
4.2. Analisis Karakteristik Masyarakat Penerima Zakat Dalam Kegiatan Bedah Rumah	74
4.2.1. Pendidikan	74
4.2.2. Pekerjaan	75
4.2.3. Pendapatan	76
4.2.4. Kepemilikan Barang	77
4.2.5. Bahan Bakar Memasak	78
4.2.6. Kondisi Rumah Sebelum Kegiatan Bedah Rumah .	78
4.3. Analisis Persepsi Masyarakat Penerima Zakat Terhadap Bantuan Pembiayaan Yang Diterima	79
4.3.1. Persepsi Terhadap Jumlah Nominal Bantuan	79
4.3.2. Persepsi Terhadap Frekuensi Bantuan	81

4.3.3. Rekapitulasi Persepsi Terhadap Bantuan	82
4.4. Analisis Perubahan Kualitas Rumah Sesudah Didedah Berdasarkan Bentuk Pemanfaatan Dana Zakat	83
4.4.1. Bentuk Pemanfaatan Pada Masing-Masing Rumah.	83
4.4.2. Rekapitulasi Bentuk Pemanfaatan	106
4.5. Analisis Persepsi Masyarakat Penerima Zakat Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah	107
4.5.1. Persepsi Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis	107
4.5.2. Persepsi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Akan Rasa Aman	109
4.5.3. Persepsi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Akan Hubungan Sosial	110
4.5.4. Rekapitulasi Persepsi Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah	111
4.5.5. Sintesa Analisis	113

BAB V. KESIMPILAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan	115
5.2. Rekomendasi	116

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	121
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Peranan Zakat	19
TABEL II.2	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah Sebagai Dasar Penilaian Kondisi Rumah	42
TABEL II.3	Sintesa Literatur	51
TABEL III.1	Luas Kota Padang Per Kecamatan	55
TABEL III.2	Tata Guna lahan Kota Padang	57
TABEL III.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	58
TABEL III.4	Laju Pertambahan Penduduk Kota Padang	59
TABEL III.5	Penerima Kegiatan Bedah Rumah Tahun 2008	62
TABEL III.6	Kegiatan-Kegiatan Bedah Rumah di Kota Padang	64
TABEL IV.1	Penghimpunan Dana Zakat Baz Kota Padang	66
TABEL IV.2	Penganggaran Dana Bedah Rumah Tahunan Badan Amil Zakat Kota Padang	70
TABEL IV.3	Jumlah Nominal Bantuan Pada Masing-Masing Mustahik Penerima Kegiatan Bedah Rumah	72
TABEL IV.4	Tingkat Pendidikan Mustahik	74
TABEL IV.5	Pekerjaan Mustahik	75
TABEL IV.6	Pendapatan Mustahik	76
TABEL IV.7	Tabungan Dan Kepemilikan Barang	77
TABEL IV.8	Bahan Bakar Memasak Mustahik	78
TABEL IV.9	Kondisi Rumah Sebelum Didedah Berdasarkan Indikator Kemiskinan Di Kota Padang	79
TABEL IV.10	Persepsi Mustahik Terhadap Jumlah Nominal Bantuan	80
TABEL IV.11	Persepsi Mustahik Terhadap Frekuensi Pemberian Bantuan	81
TABEL IV.12	Bentuk Pemanfaatan Dana Zakat Pada Masing-Masing Rumah Penerima Bedah Rumah	83
TABEL IV.13	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Nurmis (Mustahik Kec. Bungus Teluk Kabung)	85
TABEL IV.14	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Novriandi (Mustahik Kec. Lubuk Kilangan)	87

TABEL IV.15	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Ilyas (Mustahik Kec. Lubuk Begalung)	89
TABEL IV.16	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Azizah (Mustahik Kec. Padang Selatan)	91
TABEL IV.17	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Mukhni (Mustahik Kec. Padang Timur)	93
TABEL IV.18	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Mukhtar (Mustahik Kec. Padang Barat)	95
TABEL IV.19	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Syamsuir (Mustahik Kec. Padang Utara)	97
TABEL IV.20	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Sukamto Yoka (Mustahik Kec. Nanggalo)	99
TABEL IV.21	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Rusdi (Mustahik Kec. Kuranji)	101
TABEL IV.22	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Aminah (Mustahik Kec. Pauh)	103
TABEL IV.23	Peningkatan Bobot Kualitas Rumah Sarbaini (Mustahik Kec. Koto Tengah)	105
TABEL IV.24	Distribusi Frekuensi Persepsi Mustahik Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis	107
TABEL IV.25	Distribusi Frekuensi Persepsi Mustahik Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Akan Rasa Aman	109
TABEL IV.26	Distribusi Frekuensi Persepsi Mustahik Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hubungan Sosial	110

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Peta Kota Padang	8
GAMBAR 1.2	Kerangka Pikir Penelitian	9
GAMBAR 1.3	Kerangka Analisis	14
GAMBAR 2.1	Persentase Komponen Rumah Berdasarkan Perkiraan Anggaran Biaya Pekerjaan	41
GAMBAR 4.1	Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat Kota Padang 2006 s/d 2011	65
GAMBAR 4.2	Mekanisme Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Kota Padang	67
GAMBAR 4.3	Mekanisme Penyerahan Dana Zakat Dalam Posisi Badan Amil Zakat Terhadap Struktur Pemerintah Kota Padang	68
GAMBAR 4.4	Program Pengentasan Kemiskinan Badan Amil Zakat Kota Padang	69
GAMBAR 4.5	Persentase Anggaran Kegiatan Bedah Rumah Terhadap Penghimpunan Dana Amil Zakat Kota Padang	71
GAMBAR 4.6	Distribusi Frekuensi Persepsi Mustahik Terhadap Bantuan	82
GAMBAR 4.7	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Nurmis (Mustahik Kec. Bungus Teluk Kabung)	84
GAMBAR 4.8	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Nurmis (Mustahik Kec. Bungus Teluk Kabung)	85
GAMBAR 4.9	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Novriandi (Mustahik Kec. Lubuk Kilangan)	86
GAMBAR 4.10	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Novriandi (Mustahik Kec. Lubuk Kilangan).	87
GAMBAR 4.11	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah	

	Ilyas (Mustahik Kec. Lubuk Begalung)	88
GAMBAR 4.12	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Ilyas (Mustahik Kec. Lubuk Begalung)	89
GAMBAR 4.13	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Azizah (Mustahik Kec. Padang Selatan)	90
GAMBAR 4.14	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Azizah (Mustahik Kec. Padang Selatan)	91
GAMBAR 4.15	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Mukhni (Mustahik Kec. Padang Timur)	92
GAMBAR 4.16	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Mukhni (Mustahik Kec. Padang Timur)	93
GAMBAR 4.17	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Mukhtar (Mustahik Kec. Padang Barat)	94
GAMBAR 4.18	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Mukhtar (Mustahik Kec. Padang Barat)	95
GAMBAR 4.19	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Syamsuir (Mustahik Kec. Padang Utara)	96
GAMBAR 4.20	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Syamsuir (Mustahik Kec. Padang Utara)	97
GAMBAR 4.21	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Sukamto Yoka (Mustahik Kec. Nanggalo)	98
GAMBAR 4.22	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Sukamto Yoka (Mustahik Kec. Nanggalo) ..	99
GAMBAR 4.23	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Rusdi (Mustahik Kec. Kuranji)	100
GAMBAR 4.24	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Rusdi (Mustahik Kec. Kuranji)	101
GAMBAR 4.25	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Aminah (Mustahik Kec. Pauh)	102
GAMBAR 4.26	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Aminah (Mustahik Kec. Pauh)	103
GAMBAR 4.27	Foto Sebelum dan Sesudah Kegiatan Bedah Rumah Sarbaini (Mustahik Kec. Koto Tangah)	104

GAMBAR 4.28	Foto Komponen Rumah Setelah Kegiatan Bedah Rumah Sarbaini (Mustahik Kec. Koto Tengah)	105
GAMBAR 4.29	Perubahan Kualitas Masing-Masing Rumah Penerima Kegiatan Bedah Rumah	106
GAMBAR 4.30	Distribusi Frekuensi Persepsi Mustahik Terhadap Perubahan Kualitas Rumah	112

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Kuesioner	123
LAMPIRAN B	Daftar Isian Wawancara	126
LAMPIRAN C	Daftar Isian Observasi	131
LAMPIRAN D	Rekapitulasi Data Hasil Survei	134
LAMPIRAN E	Foto dan Pembobotan Kualitas Rumah Pada Masing-Masing Mustahik Penerima Kegiatan Bedah Rumah	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tingkat kepentingannya hanya di bawah sandang dan pangan. Rumah dapat diartikan sebagai ruang, tempat manusia hidup dan melakukan aktifitas serta bebas dari gangguan fisik maupun psikis (Herlianto, 1986:5).

Dalam konteks penyelenggaraan perumahan yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan perumahan di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pemahaman bahwa perumahan juga merupakan urusan publik selain urusan individu (Bappenas, 2003:455).

Pemahaman ini secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan penyediaan perumahan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Berdasarkan pernyataan UNESCAP (2009:2) masyarakat miskin ini adalah populasi yang paling tidak mampu untuk membayar biaya konstruksi rumah yang kian meninggi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, dinyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, serta rendahnya mutu lingkungan permukiman.

Selaras dengan hal itu, Iwan (2004:163) juga mengemukakan bahwa salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi

perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang tepat sasaran untuk berfungsinya sistem perumahan yang terjangkau harus dijalankan. Bahkan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, pemerintah harus menyediakan subsidi. Ini adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa perumahan adalah sebuah kebutuhan dasar (Santoso, 2002:59).

Dalam upaya agar pembiayaan perumahan menjangkau kaum miskin, sistem konvensional untuk mengelola pembiayaan perumahan dan lembaga pembiayaan formal yang meminjamkan untuk pembiayaan perumahan memiliki catatan yang sangat rendah. Fakta yang menyedihkan adalah bahwa sistem perumahan formal yang ada di kebanyakan negara di Asia saat ini, tidak dapat menjangkau mayoritas populasi kota (UNESCAP, 2008-2:19).

UNESCAP (2008-2:12) juga menyatakan bahwa di negara-negara miskin, pembiayaan perumahan formal sering tidak dapat berkembang karena akses masyarakat miskin yang lemah terhadap bank. Dilain pihak bank dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil dan kadang menyebabkan peminjam tidak dapat membayar kembali.

Dalam latar pembangunan manusia seutuhnya, perkara perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia sewajarnya menempati posisi dan prioritas unggulan. Khususnya dalam hal yang menyangkut masyarakat kota berpenghasilan sangat rendah dan tidak tetap (Budihardjo, 1998:54).

Melihat permasalahanan penyediaan perumahan masyarakat miskin diatas, Pemerintah Kota Padang melalui Badan Amil Zakat meluncurkan sebuah program bedah rumah yang ditujukan bagi masyarakat miskin, dengan sumber pembiayaan berasal dari dana zakat

yang dibayarkan oleh warga. Dalam program ini pemerintah memegang peranan penting sebagai pemegang kebijakan. Santoso (2002:43) menyatakan bahwa pemerintah sangat diperlukan sebagai penentu peraturan dan juga dalam memberikan subsidi bagi mereka yang betul-betul tidak mampu.

Secara syari'ah, Kota Padang melaksanakan program ini berdasarkan Firman Allah dalam surat *At-Taubah* ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS: At-Taubah: 103).

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap pemeluk agama Islam yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (DSNI Amanah).

Selain Kota Padang, beberapa daerah di Indonesia telah menyusun Peraturan Daerah tentang zakat guna mengaplikasikan potensi zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah cukup menyulutkan kehadiran peraturan-peraturan daerah ini. Akan tetapi pelaksanaan dan pengelolaan zakat di beberapa daerah masih belum berjalan efektif. Sementara di Kota Padang hanya dengan Peraturan Walikota, pengelolaan zakat berjalan efektif dan mampu mengumpulkan dana miliaran rupiah. Pengelolaan zakat ini didasarkan kepada Peraturan Walikota yang mewajibkan PNS Golongan III dan IV untuk membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang.

Badan Amil Zakat yang dibentuk pada tanggal 11 April 2006 ini bertujuan untuk mengumpulkan zakat dari PNS secara kolektif dan sukarela. Kedepannya diharapkan seluruh PNS, TNI, Polri, karyawan BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat perorangan yang berdomisili di Kota Padang untuk turut membayarkan zakatnya melalui badan ini.

Pada awal pengelolaannya, tahun 2006 jumlah zakat yang dikumpulkan BAZ Kota Padang berjumlah Rp. 70 Juta. Tahun 2007 pengumpulan dana ini meningkat menjadi Rp. 1,4 Miliar dan tahun 2008 sejumlah Rp. 2,4 Miliar. Data terakhir, pada Agustus 2009 sudah terkumpul dana zakat dari warga Kota Padang sejumlah Rp. 6,6 miliar. Diperkirakan potensi zakat tahun 2009 ini mencapai Rp. 12 Miliar. Jumlah itu baru perhitungan dari zakat PNS Pemko Padang yang berjumlah 15 ribu orang.

Dalam pendistribusian dana zakat, Pemerintah Kota Padang melalui perangkat Badan Amil Zakat tingkat kecamatan dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kelurahan melakukan pendataan masyarakat miskin yang berhak memperoleh zakat dimasing-masing wilayah mereka. Rumah-rumah di Kota Padang ditempel dua jenis stiker yang bertuliskan, “Rumah Pembayar Zakat” dan “Rumah Penerima Zakat” untuk membedakan mana *muzakki* (pembayar zakat) dan mana *mustahik* (penerima zakat). (Situs Resmi Pemerintah Kota Padang)

Dana zakat tersebut di distribusikan ke dalam empat program pengentasan kemiskinan, meliputi;

1. Padang Cerdas, bantuan beasiswa pendidikan,
2. Padang Sehat, bantuan pengobatan gratis dan transportasi pengobatan,
3. Padang Makmur, bantuan *bedah rumah*,
4. Padang Sejahtera, bantuan modal usaha.

Penelitian ini khusus untuk mengkaji salah satu program diatas - **Program Padang Makmur**, yang diwujudkan dalam bentuk **kegiatan**

bedah rumah, dimana dalam kegiatan tahun 2008 sebanyak 11 unit rumah tidak layak huni yang diseleksi dengan prosedur tertentu diberi bantuan perbaikan fisik sebesar Rp. 10 Juta dari dana zakat, ditambah bantuan lainnya dari masyarakat lingkungan serta pemerintah kecamatan dan kelurahan dengan jumlah nominal yang bervariasi.

Dalam penyusunan program di tahun 2009, ditemui perbedaan sikap terhadap efektifitas program bedah rumah. Sebagian pihak pengambil keputusan memandang secara teknis bahwa pengalokasian dana zakat tersebut tidak dapat menyentuh seluruh masyarakat miskin. Bahkan ada kekhawatiran bahwa pengalokasian dana yang besar dalam program ini akan menemui hasil yang nihil dan manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat penerima zakat. Di lain pihak, sebagian pengambil keputusan memiliki sudut pandang berbeda bahwa program bedah rumah ini memiliki peran yang besar dalam rangka peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin di Kota Padang.

Melihat permasalahan diatas penulis berinisiatif untuk mengkaji **peranan zakat** dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang didiami oleh masyarakat miskin dan tergolong kedalam masyarakat penerima zakat (*mustahik*) di Kota Padang. Peranan dapat diartikan sebagai penilaian sejauh mana fungsi objek penelitian - dalam hal ini zakat, dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan, yakni peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin. (Komarudin, 1994:768).

Penelitian ini sangat penting sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Padang dalam pengambilan keputusan pada tahun 2010 terkait pengalokasian dana zakat sebagai sumber pembiayaan informal peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin. Penelitian ini sekaligus bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan baik bagi pemerintah, institusi pendidikan dan seluruh lapisan masyarakat mengenai peranan zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan masyarakat miskin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan yang kemudian diangkat sebagai *Research Question* dalam penelitian ini adalah ;

“Bagaimana peranan zakat dalam rangka peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin melalui kegiatan bedah rumah di Kota Padang?”

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan zakat dalam peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian adalah sebagai berikut;

1. Identifikasi karakteristik wilayah dan program pengelolaan zakat dan kegiatan bedah rumah di wilayah studi.
2. Analisis bantuan dan karakteristik masyarakat penerima zakat dalam kegiatan bedah rumah.
3. Analisis persepsi masyarakat penerima zakat terhadap bantuan pembiayaan yang diterima.
4. Analisis perubahan kualitas rumah sebelum dan sesudah dibedah berdasarkan bentuk pemanfaatan dana zakat.
5. Analisis persepsi masyarakat penerima zakat terhadap peningkatan kualitas rumah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan pemahaman mendalam tentang peranan zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan informal pembiayaan perumahan masyarakat miskin, khususnya dalam kasus pelaksanaan bedah rumah di Kota Padang. Selanjutnya hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Padang dalam pengambilan keputusan terkait pengalokasian dana zakat sebagai sumber pembiayaan peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin.

Penelitian ini sekaligus bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan baik bagi pemerintah, institusi pendidikan dan seluruh lapisan masyarakat mengenai keberadaan peranan zakat dalam hal penyediaan rumah yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

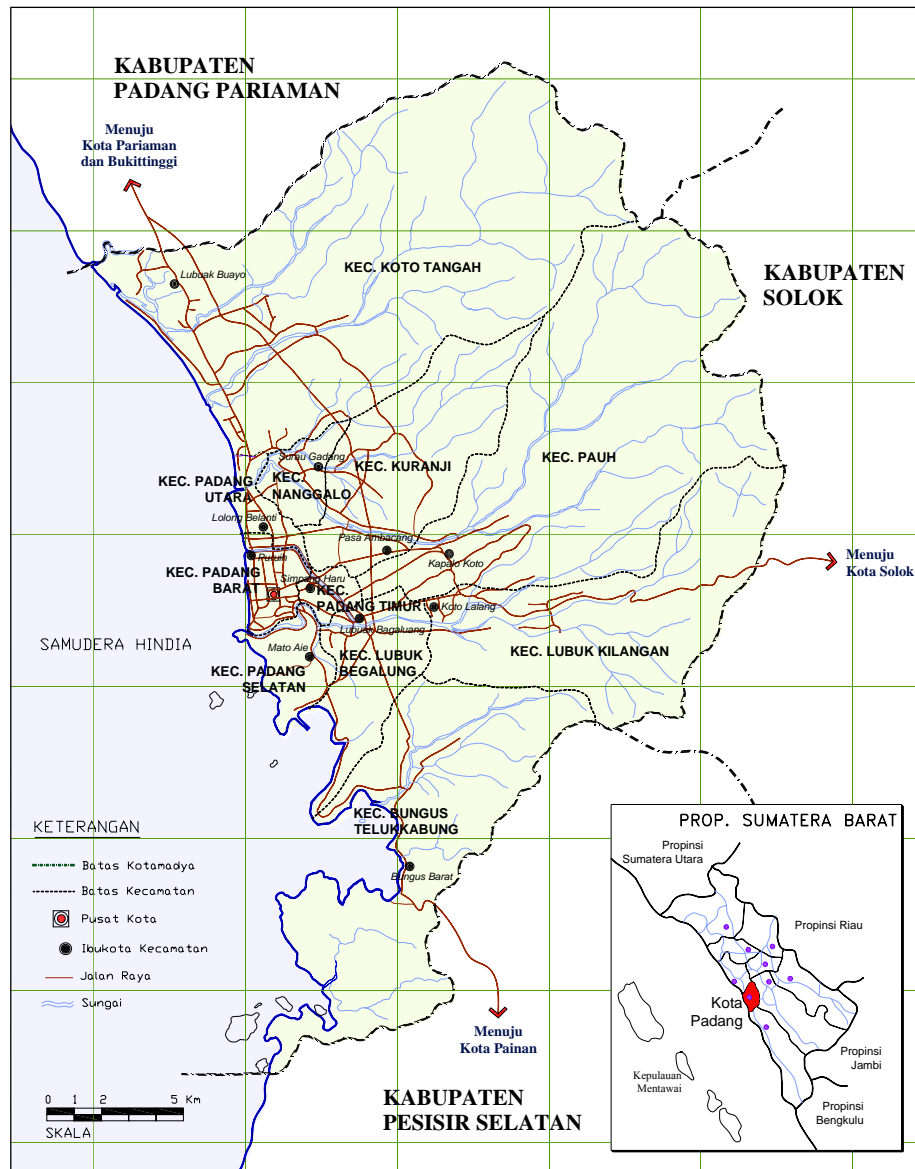
Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup substansial dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup substansial berguna untuk membatasi substansi pembahasan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan penelitian. Sedangkan ruang lingkup spasial berguna untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial pada penelitian ini merupakan perpaduan antara evaluasi program dengan aspek pembiayaan perumahan. Secara substansial ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan mengenai pengalokasian dana zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan informal peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin ditinjau dari Program Padang Makmur, yaitu sebuah program dengan kegiatan berupa *bedah rumah* yang dilaksanakan pada tahun 2008.

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

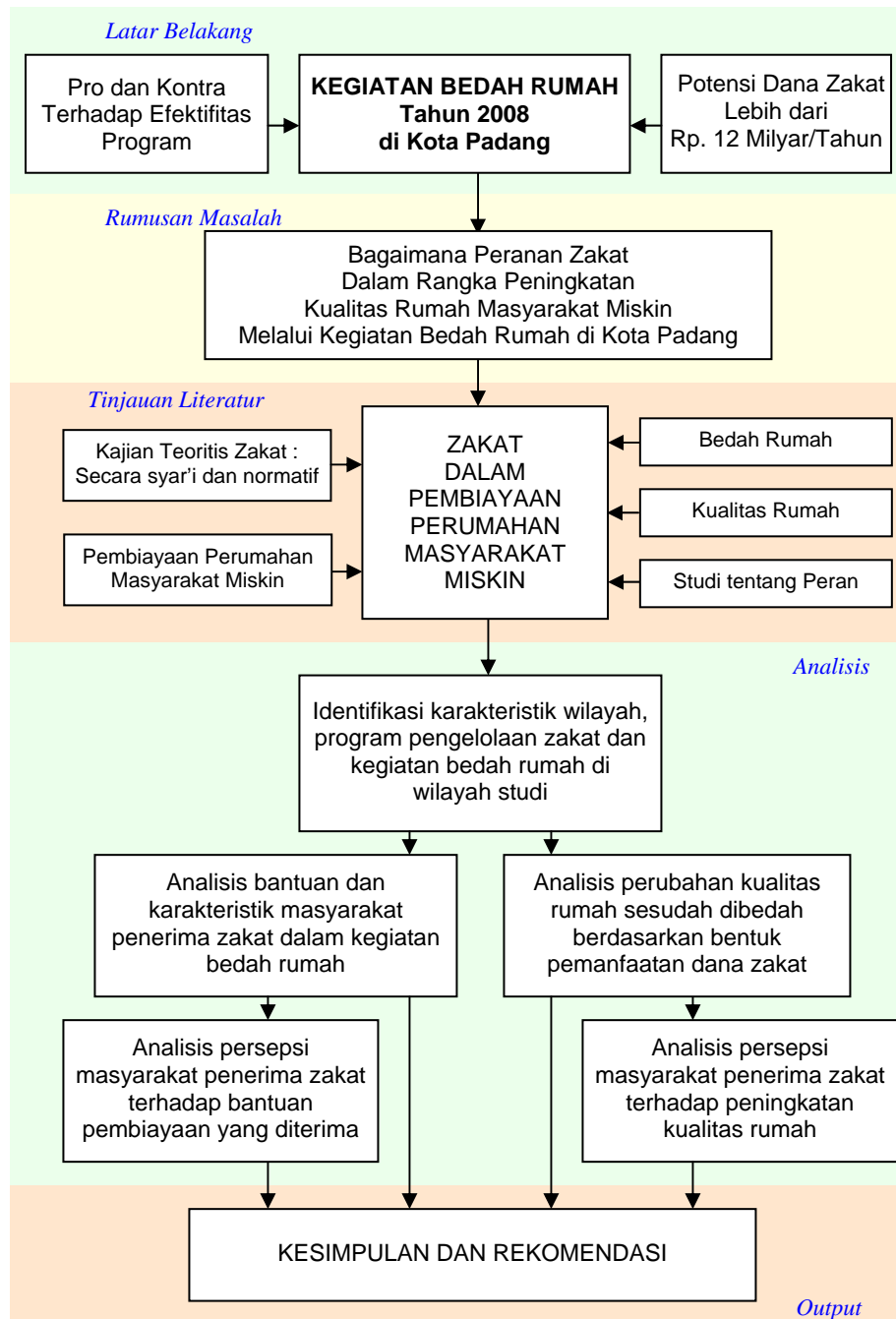
Ruang lingkup spasial pada penelitian ini adalah wilayah Pemerintahan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.



Sumber : Dinas PU Kota Padang

GAMBAR 1.1
PETA KOTA PADANG

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Penulis, 2009

GAMBAR 1.2
KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Kerangka pikir penelitian berangkat dari permasalahan kegiatan bedah rumah di Kota Padang. Besarnya potensi dana zakat yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan perumahan masyarakat miskin serta sikap setuju dan menentang antara berbagai pihak dalam penyusunan program, memerlukan pengkajian yang lebih mendalam guna pengambilan keputusan pada tahun-tahun berikutnya.

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah "bagaimana peranan zakat dalam rangka peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin melalui kegiatan bedah rumah di Kota Padang?".

Untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan variabel-variabel penelitian sebagai unit analisis dalam proses analisis nantinya. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang menggunakan metoda campuran kuantitatif dan kualitatif, variabel penelitian diperoleh melalui sintesis kajian literatur yang mencakup pengertian tentang zakat, peran, persepsi, kualitas rumah, bedah rumah serta studi tentang pembiayaan perumahan dan masyarakat miskin.

Setelah variabel penelitian diperoleh, selanjutnya dilakukan proses analisis pada masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dimulai dengan identifikasi karakteristik wilayah penelitian, identifikasi karakteristik masyarakat penerima zakat dan identifikasi kondisi fisik rumah sebelum kegiatan bedah rumah. Dari hasil tiga identifikasi tersebut dilakukan analisis program dan analisis terhadap bentuk pemanfaatan dana zakat. Kemudian dilakukan analisis persepsi masyarakat penerima zakat terhadap bantuan dan terhadap perubahan kualitas rumah yang tercapai. Selanjutnya hasil-hasil analisis tersebut dirumuskan untuk memperoleh kesimpulan bagaimana peranan zakat dalam kegiatan bedah rumah di Kota Padang. Kesimpulan ini digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi penelitian.

1.7 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan campuran; kuantitatif dan kualitatif*. Menurut Sugiyono (2009:1), pendekatan kuantitatif ini dinamakan metode tradisional, karena sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Sebagai metode ilmiah/*scientific* maka harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Sedangkan metode kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dibidang antropologi budaya, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Pemilihan pendekatan campuran pada penelitian ini didasarkan kepada alasan karena sebagian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, sedangkan sebagian pengumpulan dan analisis data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kualitatif.

Karakteristik penelitian yang digunakan adalah karakteristik deskriptif, dimana karakteristik ini merupakan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi tertentu dari suatu objek penelitian.

Karakteristik penelitian tersebut diatas sangat relevan dengan tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui peranan zakat dalam peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin melalui kegiatan bedah rumah di Kota Padang, dimana dalam proses pengkajiannya diperlukan pemaparan secara deskriptif dan terperinci terhadap objek penelitian yang dijumpai.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2009:137).

1.7.2.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan dana zakat sebagai instrumen pembiayaan rumah masyarakat miskin serta persepsi masyarakat terhadap bantuan dan terhadap perubahan kualitas rumah tersebut. Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

A. Interview/Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari *responden* yang lebih mendalam dan jumlah *respondennya* sedikit (Sugiyono, 2009:137).

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2009:138).

Dalam penelitian ini kegiatan wawancara dilakukan secara terstruktur dalam wujud tatap muka. Pemilihan teknik ini didasarkan kepada jumlah populasi yang relatif kecil sekaligus untuk memperoleh data yang benar-benar *valid*.

B. Kuesioner/Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur (Sugiyono, 2009:142).

Dalam penelitian ini penyebaran angket dilakukan oleh peneliti sehingga dapat mendampingi responden dalam pengisian jawaban. Angket disajikan dalam bentuk pertanyaan campuran terbuka dan tertutup dengan tujuan untuk lebih mendalami jawaban responden terhadap variabel-variabel pertanyaan.

C. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2009:145). Hadi dalam Sugiyono (2009,145) menyatakan bahwa observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, dimana dua proses terpenting dari observasi ini adalah pengamatan dan ingatan.

Dalam penelitian ini observasi secara terstruktur dilakukan untuk memperoleh gambaran detail bentuk pemanfaatan dana zakat pada masing-masing rumah penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008.

1.7.2.2 Pengumpulan Data Sekunder

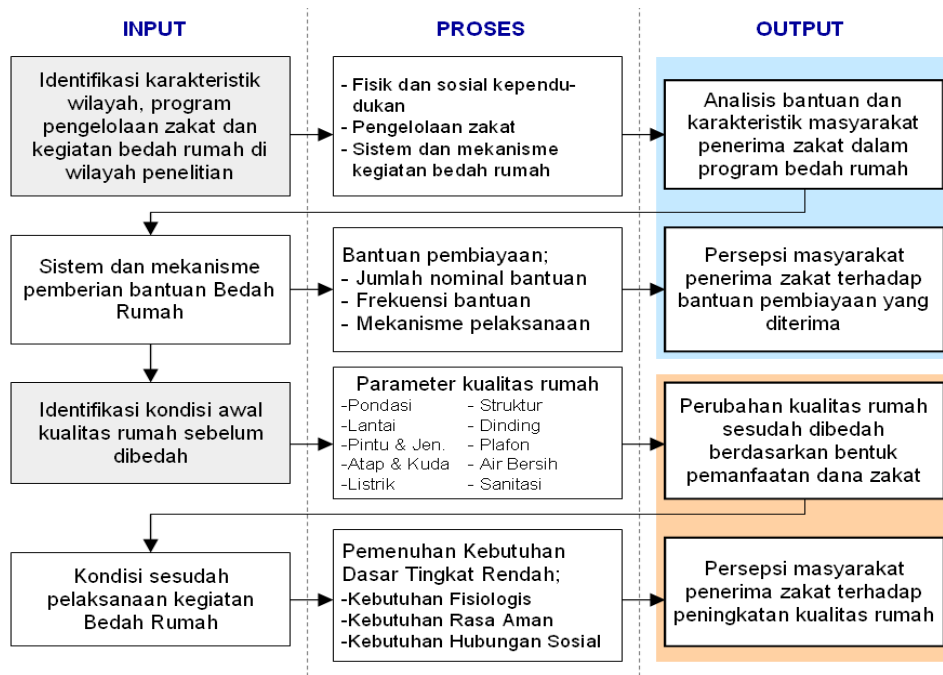
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini diperoleh dari hasil penelitian, artikel-artikel baik dari media cetak maupun elektronik, penelusuran pustaka dan dokumen resmi dari instansi terkait seperti Badan Amil Zakat Kota Padang, Kecamatan dan lain lain.

1.7.3 Teknik Sampling

Jumlah sampel yang dipilih bergantung kepada tujuan penelitian, pengetahuan tentang populasi, kesediaan menjadi sampel, jumlah biaya, besar populasi, dan fasilitas yang tersedia (Nasution, 2008:105).

Dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah tahun 2008, terdapat populasi sejumlah 11 unit rumah penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008. Didasarkan kepada jumlah populasi yang relatif kecil yakni 11 (sebelas) rumah, ketersediaan fasilitas, dan tujuan untuk meminimalisir nilai bias dalam pengumpulan data, maka dilakukan sensus terhadap seluruh populasi penelitian. Sensus adalah cara pengumpulan data kalau seluruh elemen populasi diteliti satu persatu (Supranto, 2004:2).

1.7.4 Kerangka Analisis



Sumber : Analisa Penulis, 2009

GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS

Proses analisis dilakukan pada masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dimulai dengan identifikasi karakteristik wilayah penelitian, program pengelolaan zakat dan bedah rumah. Dari hasil tiga identifikasi tersebut dilakukan analisis terhadap bantuan dan analisis terhadap bentuk pemanfaatan dana zakat. Kemudian dilakukan analisis persepsi masyarakat penerima zakat baik terhadap bantuan maupun terhadap perubahan kualitas rumah yang tercapai. Kemudian hasil-hasil analisis tersebut disintesis untuk selanjutnya dikomparasi dengan teori yang ada guna memperoleh kesimpulan bagaimana peranan zakat dalam kegiatan bedah rumah di Kota Padang.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Terdapat 2 (dua) teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Teknik Statistik Deskriptif

Dalam teknik ini, digunakan dua teknik interpretasi hasil analisis. Pertama digunakan *teknik Frekuensi dan Persen* yang digunakan untuk menghitung jumlah pemilih atau responden dengan kategori tertentu. Frekuensi juga digunakan untuk mengetahui berapa kali munculnya suatu karakteristik variabel dalam variabel tertentu (Sarwono, 2009:35). Kedua, digunakan *teknik Explore* yang digunakan untuk melihat nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum dan nilai tengah (Sarwono, 2009:39).

2. Teknik Deskriptif Kualitatif

Teknik ini digunakan untuk menjelaskan hasil analisis yang bersifat kualitatif kedalam bentuk deskripsi interpretasi. Karakteristik utama penelitian kualitatif dalam paradigma postpositivisme adalah pencarian makna di balik data (Noeng Muhadjir, 2000:79).

1.7.5.1 Identifikasi karakteristik wilayah, program pengelolaan zakat dan kegiatan bedah rumah di wilayah studi.

Identifikasi program pengelolaan zakat dan kegiatan peningkatan kualitas rumah di wilayah studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik wilayah dan sosial kependudukan, program pengelolaan zakat, dan pelaksanaan kegiatan bedah rumah di Kota Padang.

Proses identifikasi ini dimulai dari kondisi geografis, sosial kependudukan, pengelolaan zakat, dan identifikasi sistem pembiayaan kegiatan bedah rumah tahun 2008. Teknik yang digunakan dalam identifikasi ini adalah teknik analisis statistik deskriptif, dimana masing-masing unit identifikasi disajikan dalam bentuk tabel.

1.7.5.2 Analisis bantuan dan karakteristik masyarakat penerima zakat dalam kegiatan bedah rumah.

Analisis bantuan dan karakteristik masyarakat penerima zakat ini bertujuan untuk menganalisis jumlah nominal dan frekuensi bantuan serta tingkat kemiskinan *mustahik*.

Proses analisis meliputi mekanisme pelaksanaan bantuan dan analisis tingkat kemiskinan secara normatif dan secara *syar'i*. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif dan hasil analisis di interpretasikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persen.

1.7.5.3 Analisis persepsi masyarakat penerima zakat terhadap bantuan pembiayaan yang diterima.

Analisis persepsi masyarakat penerima zakat terhadap bantuan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi *mustahik* terhadap bantuan, meliputi persepsi terhadap jumlah nominal dan frekuensi pemberian bantuan.

Proses analisis adalah mengidentifikasi persepsi *mustahik* berupa perbandingan antara pengetahuan dasar dan penafsiran secara prinsip terhadap bantuan. Hasil identifikasi dirundingkan dan disepakati bersama

antara peneliti dengan responden. Hal ini dilakukan untuk menghindari salah tafsir atas data yang diperoleh karena responden lebih memahami konteksnya daripada peneliti. (Guba, 1985 dalam Moleong, 2001:15)

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, dimana hasil analisis di interpretasikan dengan cara *skala likert*. Menurut Sugiyono (2009:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

1.7.5.4 Analisis perubahan kualitas rumah sesudah dibedah berdasarkan bentuk pemanfaatan dana zakat.

Analisis perubahan kualitas rumah sesudah dibedah ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan nilai pemanfaatan dana bantuan pada masing-masing rumah penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008.

Proses analisis meliputi penelusuran bentuk pemanfaatan pada masing-masing rumah penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana masing-masing unit analisis disajikan dalam bentuk deskripsi.

1.7.5.5 Analisis persepsi masyarakat penerima zakat terhadap peningkatan kualitas rumah.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui persepsi *mustahik* terhadap perubahan kualitas rumah pasca pelaksanaan bedah rumah. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi manfaat kegiatan bedah rumah terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik*. Untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan *mustahik* digunakan parameter pemenuhan kebutuhan tingkat rendah menurut teori Frederick Herzberg. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, dimana masing-masing unit hasil analisis diidentifikasi melalui proses kuesioner dan di interpretasikan dengan skala likert.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam bentuk laporan dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

- BAB. 1 Merupakan PENDAHULUAN yang memberikan gambaran mengapa penelitian dilakukan, argumentasi pemilihan tema penelitian, data dan informasi pendukung untuk menjustifikasi pemilihan obyek penelitian, substansi/fokus yang akan diteliti, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, kerangka pemikiran, pendekatan dan metodologi penelitian.
- BAB. 2 Kajian teoritis ZAKAT DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN ini memberikan kerangka teori dan konsep tentang zakat baik secara *syar'i* dan normatif, studi tentang peran, literatur tentang pembiayaan perumahan dan permukiman masyarakat miskin, serta pengertian bedah rumah dan konsep kualitas rumah. Bagian ini harus dapat memberikan variabel beserta indikator (tolok ukur) untuk analisis.
- BAB. 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN, berisikan gambaran kondisi fisik dan sosial ekonomi kependudukan serta program pengelolaan zakat di wilayah penelitian.
- BAB. 4 Merupakan uraian PEMBAHASAN ANALISIS PENELITIAN pada masing-masing sasaran, berisikan analisis terhadap bantuan, perubahan kualitas rumah, persepsi *mustahik* terhadap bantuan dan persepsi terhadap peningkatan kualitas rumah.
- BAB. 5 Bagian terakhir ini berisikan KESIMPULAN DAN REKOMENDASI penelitian, mencakup temuan yang dihasilkan berupa jawaban terhadap masing-masing sasaran penelitian serta rekomendasi untuk perbaikan program dan penelitian lanjutan.

BAB II ZAKAT DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN

2.1 Studi tentang Peranan

Konsep tentang peranan (*role*) menurut Komarudin (1994:768) merupakan penilaian sejauh mana fungsi suatu bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan, berupa ukuran dari hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Berkaitan dengan zakat sebagai sumber pembiayaan kegiatan bedah rumah, dapat disimpulkan bahwa peranan zakat merupakan seperangkat fungsi yang diharapkan dari zakat dalam hal keberadaannya terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin. Peranan tersebut menyangkut hubungan sebab akibat antara variabel “dana zakat” dan variabel “kualitas rumah masyarakat miskin”.

**TABEL II.1
PERANAN ZAKAT**

VARIABEL	Subjektif (Zakat dan Rumah)	Objektif (Masyarakat Penerima Zakat)
Zakat sebagai bantuan pembiayaan	Peranan dilihat dari obyek bantuan itu sendiri (jumlah nominal, frekuensi dan mekanisme bantuan)	Peranan dilihat dari persepsi masyarakat penerima zakat terhadap bantuan tersebut.
Kualitas rumah	Peranan dilihat dari perubahan kualitas fisik rumah (bentuk pemanfaatan)	Peranan dilihat dari persepsi masyarakat penerima zakat terhadap peningkatan kualitas rumah (nonfisik)

Sumber : Analisis Penulis, 2009

Secara subjektif peranan zakat dapat dilihat dari dua variabel diatas, yakni peranan zakat ditinjau dari segi dana zakat sebagai sumber pembiayaan (bantuan) maupun peranan zakat ditinjau dari segi perubahan

kualitas rumah. Secara objektif, peranan zakat ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat miskin pemilik rumah, baik terhadap bantuan maupun terhadap perubahan kualitas rumah mereka.

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat Secara Syar'i

Menurut Hukum Islam, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap pemeluk agama Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, meliputi muslim, *aqil*, *baligh* dan memiliki harta yang mencapai *nishab* (DSNI Amanah).

Menurut Kurnia (2008:7), zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan sumbangan dan bukan juga pemberian dari orang kaya kepada orang miskin, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai *muzaki* (orang yang membayarkan zakat) atas hak *mustahik* (orang yang menerima zakat).

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini meliputi (Kurnia, 2008:11):

1. Milik penuh, yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok.
2. Tidak diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi dan mencuri.
3. Mencapai *nishab*, yakni batas minimal harta yang kita miliki yang sudah wajib untuk berzakat, jumlahnya kira-kira 85 gram emas.
4. *Khaul* yakni jika sejumlah harta yang sudah mencapai *nishab*-nya sudah mencapai satu tahun hijriyah.
5. Lebih dari kebutuhan pokok. Demikian menurut *madzhab* Hanafi.

Dalam sebuah *hadist* yang diriwayatkan oleh Hakim dan Abi Umamah, dinyatakan bahwa;

قال رسول الله : اتَّقُوا اللَّهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ وَأَطِيعُوا دَا أَمْرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ {رواه الحاكم عن ابي أمامة}.

"Rasulullah Saw. bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah shalat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan keluarkanlah zakat pada harta bendamu, untuk kebaikan bagi dirimu dan ikutilah perintah pemimpinmu (yang membawa kepada kebaikan) niscaya Allah SWT akan memasukkan kamu ke dalam syurga-Nya". (HR. Hakim dari Abi Umamah)

Allah SWT telah menjelaskan tentang golongan-golongan penerima zakat (*mustahik*) dalam Surat *At-Taubah* Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS: *At-Taubah*: 60).

Dari kandungan Surat *At-Taubah* Ayat 60 diatas, kriteria orang yang berhak menerima dana zakat meliputi (Kurnia, 2008:140):

1. Orang-orang fakir
2. Orang-orang miskin
3. Pengurus-pengurus/amil zakat
4. Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya
5. Budak (*riqab*)
6. Orang-orang yang berhutang (*gharimiin*)
7. Untuk jalan Allah (*fisabilillah*)
8. Mereka yang sedang dalam perjalanan (*ibnussabil*).

Sahhatih (2007:22) menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat, Rasulullah memilih beberapa orang petugas untuk memungut zakat dan diminta supaya melaporkan perhitungan yang dipungut dan berapa yang disalurkan. Didalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 103 di tuliskan :

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرَضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ
الدُّعَاءُ {رواه الخطيب عن ابن مسعود} .

"Rasulullah Saw. bersabda: "Bersihkanlah hartamu dengan zakat, dan obatilah sakit kalian dengan bershadaqah, dan tolaklah olehmu bencana-bencana itu dengan do'a". (HR. Khatib dari Ibnu Mas'ud).

Selanjutnya menurut Sahhatih (2007:22), dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* karangan Imam malik, diterangkan bahwa Abdullah bin 'Amr Ibnul 'Ash menyuruh agar zakat dibayarkan lewat pemerintah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

" Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS: *At-Taubah*: 103).

2.2.2 Pengertian Zakat Secara Normatif

Para ulama dan pemimpin bangsa telah memikirkan masalah pengelolaan zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 1 (1) disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya dalam Pasal 6 (1) disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam Pasal 1 (2) disebutkan bahwa pengelolaan zakat tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka eksistensi Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah telah diakui secara legal. Pengaturan melalui Undang-undang ini menuntut konsekuensi agar pengelola zakat beroperasi secara profesional, amanah, dan transparan sehingga dana zakat dapat dipungut, dikelola dan disalurkan kepada masyarakat penerima zakat secara optimal. Salah satu yang patut kita syukuri dalam dunia perzakatan di Indonesia adalah telah banyak terbit Peraturan Daerah (Perda) Zakat di beberapa daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tentunya hal ini adalah salah satu upaya mengoptimalkan pemungutan serta pendayagunaan zakat.

2.2.3 Zakat Sebagai Salah Satu Instrumen Pembiayaan Pembangunan

Tujuan utama disyariatkan zakat adalah untuk mengeluarkan orang-orang fakir dari kesulitan hidup yang melilit mereka menuju ke kemudahan hidup mereka sehingga mereka bisa mempertahankan kehidupannya (DSNI Amanah).

Zakat merupakan hak dan kewajiban asasi seorang muslim yang dilindungi agama dan konstitusi. Secara syar'i, zakat merupakan salah satu rukun yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana zakat yang baik merupakan alternatif pengelolaan sumber dana yang potensial untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengentaskan fakir miskin dan orang-orang terlantar (KMNU 2000).

Zakat bukanlah suatu pajak dalam pengertian normal, akan tetapi merupakan kewajiban agama seorang muslim seperti shalat, puasa dan haji untuk membayar sejumlah tertentu dari kekayaan bersihnya atau output.

Adanya upaya institusionalisasi zakat dalam perangkat negara merupakan upaya positif dalam mengakomodir kewajiban asasi setiap

orang Islam dalam menunaikan zakat. Di sisi lain, upaya ini akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berhak untuk menerima zakat (*mustahik*) dalam memperoleh hak mereka atas zakat. Hal ini tentu saja merupakan wujud dari pengamalan konstitusi dalam rangka menjamin kemerdekaan rakyat Indonesia dalam menjalankan kewajiban agama (DSNI Amanah).

Zakat adalah solusi bagi penyelesaian kemiskinan. Konsepsi Islam tentang zakat menempatkannya sebagai salah satu rukun didalam agama yang mulia ini. Pemahaman rukun adalah asas, pondasi, dasar bagi peletakan kehidupan terutama umat Islam menuju kemakmuran baik di dunia maupun di akherat. Zakat memiliki kandungan dan peran besar untuk mewujudkan cita-cita Islam beserta umatnya menuju kehidupan yang sejahtera (DSNI Amanah).

Solusi Islam mengenai pembiayaan proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah Islam (Khilafah), Pendapatan negara bersumber dari 3 (tiga) pos (diwan), yaitu (www.khilafah1924.org):

1. Pos Fai` dan Kharaj (kepemilikan negara), yang meliputi tanah, pajak dan lain-lain.
2. Pos Kepemilikan Umum, yang meliputi minyak dan gas, listrik, tambang-tambang, sungai dan laut, hutan dan padang, dan tanah hima (tanah yang pendapatannya dikhususkan untuk keperluan tertentu)
3. Pos Zakat, yang meliputi zakat uang, zakat perdagangan, zakat pertanian dan zakat ternak.

Zakat memiliki peranan penting dalam pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam. Zakat ikut andil dalam meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir miskin, mencetak mereka menjadi suatu

kekuatan yang produktif dan merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu (Kurnia, 2008:8).

Kalau zakat telah dipungut secara terus menerus, maka penggunaan dapat diarahkan sebagai modal usaha produktif, karena akan lebih bermanfaat bagi penerima. Membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, jika harta yang dimilikinya telah sampai nisab. Jika telah mencukupi dan sampai nisabnya, maka wajib berzakat dan tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan zakat, ada atau tidak kebijakan pemerintah tentang hal itu (DSNI Amanah).

Konsep ini perlu ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh unsur masyarakat Indonesia. Sejalan dengan permasalahan penyelenggaraan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin, zakat memiliki potensi yang besar sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan pembangunan (DSNI Amanah).

Dana zakat memegang peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di negeri ini. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum, terutama bagi kesejahteraan masyarakat miskin (ibid).

Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif dan sustainable. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada (BAZNAS).

Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS. At Taubah [9]: 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (ashnaf) yaitu orang-orang fakir, miskin, amil. Mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fiisabilillah, dan ibnu sabil.

Selain delapan golongan tersebut, hukumnya tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat pro-poor. Karena itu zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran.

Kedua, zakat memiliki persentase yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syarat sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5%, ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapapun.

Ketiga, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.

Keempat, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Hakikat zakat lebih memfokuskan pada tindakan bantu diri sosial yang mendapatkan dukungan kuat dari agama untuk menolong orang-orang miskin dan tidak mampu/kurang beruntung untuk menghapuskan penderitaan dan kemiskinan umat muslim. Zakat merupakan sarana terpenting dalam distribusi kesejahteraan (Kurnia, 2008:8).

2.3 Pembiayaan Perumahan Masyarakat Miskin

2.3.1 Masyarakat Miskin

Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak (Ridlo, 2001:5).

Lebih lanjut, Ridlo (2001:21) menggambarkan bahwa penduduk miskin memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah, termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana yang minim bahkan cenderung tidak tersedia. Tingkat pendidikan rendah, berstatus rendah dan mempunyai struktur keluarga yang tidak menguntungkan.

Sar A. Levitan dalam Ridlo (2001:5) mendefinisikan kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara *universal*.

Secara syar'i kemiskinan dipandang dalam dua bentuk, yakni fakir dan miskin. *Fakir* yaitu orang-orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. *Miskin* yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari (BAZ Kota Padang).

Di Kota Padang, penentuan kriteria masyarakat miskin didasarkan kepada standar BPS (Badan Pusat Statistik) yang dikeluarkan dalam rangka pendistribusian dana BLT (Bantuan Langsung Tunai). Berikut kriteria rumah tangga miskin versi BPS berupa indikator-indikator yang di adopsi Pemerintah kota Padang dalam menentukan masyarakat miskin di Kota Padang (www.padangkini.com);

1. Lantai rumah dari tanah, bambu atau kayu murahan.
2. Dinding rumah dari bambu, rumbia, kayu kualitas rendah, tembok tanpa plester.

3. Rumah tidak memiliki fasilitas jamban atau menggunakan jamban bersama.
4. Rumah tidak dialiri listrik.
5. Sumber air minum dari sumur atau mata air tak terlindungi, sungai, air hujan.
6. Bahan bakar memasak dari kayu bakar, batu bara, atau minyak tanah.
7. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas.
8. Sumber penghasilan kepala rumah tangga petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dan lain-lain dengan penghasilan kurang dari Rp. 600 ribu per bulan.
9. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya SD.
10. Tidak punya tabungan atau barang dengan nilai jual diatas Rp.500 ribu seperti ternak, motor, televisi, dan lain-lain.

Dalam penggunaan indikator diatas, sebuah rumah tangga termasuk kategori sangat miskin bila memiliki 9-10 kriteria. Kategori miskin bila memenuhi 6-8 kriteria, dan kategori mendekati miskin bila memenuhi 5-6 kriteria.

2.3.2 Pembiayaan Perumahan Masyarakat Miskin di Negara-Negara Berkembang

Kekurangan persediaan perumahan biasanya terjadi untuk masyarakat berpendapatan rendah, dimana populasi ini adalah populasi yang paling tidak mampu untuk membayar harga lahan dan biaya konstruksi rumah. Pasar perumahan tidak dapat menyediakan perumahan dengan harga terjangkau. Dalam hal inilah pentingnya pembiayaan perumahan, diperlukan berbagai mekanisme pembiayaan perumahan yang dapat dijangkau oleh kaum miskin. Peran dari pembiayaan perumahan juga penting mengingat pemerintah juga semakin kurang peduli dengan

penyediaan perumahan secara langsung, dan berlaku lebih sebagai penyedia, termasuk dengan menyediakan alternatif pembiayaan untuk memberikan pilihan lebih banyak bagi orang-orang di kota (UNESCAP, 2009:2).

Menurut Yudhohusodo (1991), sistem pembiayaan pembangunan perumahan meliputi;

1. Langsung

Pembeli rumah mendapatkan dana langsung dari pemberi dana.
Contoh : pemberian orang tua untuk anak.

2. Kontrak

Pembeli rumah menabung dana dengan suku bunga lebih rendah dari pada yang berlaku di pasar, setelah mencukupi diberi hak kredit kepemilikan rumah.

3. *Deposit*

Lembaga menerima deposito dari masyarakat, lalu dana yang terakumulasi disalurkan kepada para pembeli rumah

4. *Hipotek*

Lembaga keuangan memobilisasi dana dengan menerbitkan obligasi dan dana yang terakumulasi disalurkan kepada para pembeli rumah

UNESCAP (2008-2:10) mengungkapkan beberapa alasan pentingnya pembiayaan perumahan:

1. Perumahan merupakan kebutuhan dasar dan hak manusia.

Perumahan menyediakan naungan bagi masyarakat untuk hidup dan ruang untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam hidupnya. Perumahan juga menjadi tempat dimana masyarakat mendapat akses terhadap layanan standar seperti air bersih, listrik, sanitasi dan pencatatan penduduk. Perumahan yang layak adalah hak

manusia dan akses mendapatkan rumah, dan syarat-syarat untuk menempati rumah tersebut merupakan bagian dari status sosial rumah tangga dan aspek penting dari kesejahteraannya.

2. Perumahan itu mahal.

Di beberapa negara, sebuah rumah yang layak dapat berharga sepuluh kali lipat pendapatan rumah tangga dalam setahun. Bahkan dalam kondisi yang paling baik, harga rumah dapat mencapai tiga kali pendapatan tahunan sebuah rumah tangga. Karena biaya perumahan sangat tinggi, hanya rumah tangga kaya yang memiliki uang tunai untuk langsung membeli rumah tanpa pinjaman atau investasi.

3. Wajar melakukan pinjaman untuk membeli rumah.

Sebuah rumah tangga dapat memilih untuk menabung uang dan membeli rumah di masa depan atau secara bertahap menyimpan material untuk membangun. Namun harga rumah sangat tinggi, sehingga mereka harus menabung dalam jangka waktu yang lama. Jika sebuah rumah tangga menabung sepertiga dari pendapatannya, rata-rata membutuhkan waktu 15-20 tahun untuk mampu membeli unit rumah tersebut. Mereka juga membutuhkan tempat tinggal saat proses ini terjadi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka harus membayar sewa rumah selain menyisihkan uang untuk menabung rumah. Untuk sebagian besar rumah tangga, 15-20 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk menunggu. Alternatif lain adalah membalik proses tersebut: meminjam uang untuk membeli rumah pada saat awal, dan mengambil 15 hingga 20 tahun untuk membayar pinjaman. Dengan begitu, rumah tangga tersebut dapat tinggal di unit yang mereka beli.

4. Mencari pemberi pinjaman yang mau meminjamkan.

Sebelum ada bank dan lembaga kredit, pinjaman dilakukan kepada kenalan, keluarga atau atasan. Pinjaman pada keluarga tidak membutuhkan proses administrasi yang berbelit dan pemberi pinjaman cenderung memaklumi pembayaran yang terlambat. Namun banyak yang tidak memiliki akses terhadap pilihan ini karena kaum miskin sering memiliki keluarga yang juga miskin. Namun sistem pinjaman keluarga informal seperti ini tidak dapat membiayai kebutuhan rumah dari sekian banyak rumah tangga.

Selain meminjam dari pasar modal (terutama melalui pasar hipotek kedua) ada beberapa strategi yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan untuk menarik dana bagi perumahan. Penting untuk diingat, bahwa kebanyakan strategi-strategi ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan dari kaum miskin yang tidak memiliki pendapatan tetap. Strategi-strategi ini meliputi (UNESCAP, 2008-2:14):

1. Pembiayaan perumahan dari bank menjamin dana

Salah satu kelebihan pembiayaan perumahan bagi investor adalah hal ini tidak terlalu beresiko dibandingkan dengan hal lain yang lebih rentan seperti pasar uang atau memulai usaha baru. Banyak pemerintah memanfaatkan resiko rendah ini untuk mendorong bank komersial menggunakan kondisi ini untuk menjalankan pinjaman perumahan.

2. Pembiayaan perumahan dari skema tabungan wajib

Dana juga dapat disalurkan menuju perumahan melalui pembuatan tabungan wajib atau berdasarkan kontrak, dimana persentase tabungan ini dipotong dari slip gaji dan dimasukkan ke rekening khusus untuk pembayaran rumah. Kumpulan uang dalam rekening ini tersedia sebagai pinjaman bagi pekerja yang menjadi anggota.

3. Pembiayaan perumahan dari pajak khusus atau undian

Strategi lain bagi pemerintah adalah untuk mengumumkan pajak khusus (seperti misalnya pajak barang mewah impor) atau membuat undian nasional untuk menggalang dana untuk pembiayaan perumahan.

Program kredit mikro perumahan merupakan bentuk pinjaman kecil kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, dengan nominal pinjaman yang kecil dan terbatas, dengan tingkat pengembalian pinjaman pada jangka waktu pendek yakni biasanya antara 2 s/d 10 tahun, serta sangat cocok untuk proses peningkatan kualitas hunian masyarakat (Ferguson dalam Jurnal *Environment and urbanization*, Vol.11, No.1, April 1999).

Program kredit mikro perumahan adalah layanan keuangan berupa pinjaman uang kepada masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah untuk keperluan perbaikan rumah (*renovation*), membangun rumah baru (*new home construction*), akuisisi lahan (*land acquisition*), dan penyediaan layanan infrastruktur (*basic infrastructure*) (CGAP, 2003).

Program kredit mikro perumahan merupakan suatu aset yang berdasarkan strategi pembangunan masyarakat yang dimaksudkan untuk membantu MBR agar dapat berinvestasi pada fisik perumahan sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya dan memenuhi layanan kebutuhan hidup lainnya (ANC *Economic Transformation Commite*, 2005).

Dalam upaya agar pembiayaan perumahan menjangkau kaum miskin, sistem konvensional untuk mengelola pembiayaan perumahan dan lembaga pembiayaan formal yang meminjamkan untuk perumahan memiliki catatan yang sangat rendah. Fakta yang menyedihkan adalah bahwa sistem perumahan formal yang ada di kebanyakan negara di Asia saat ini, tidak dapat menjangkau mayoritas populasi kota (UNESCAP, 2008-2:19).

Keberhasilan beberapa negara berkembang dalam pengelolaan pembiayaan perumahan masyarakat miskin;

1. *Payatas Scavengers' Association in the Philippine*

Lembaga ini pertama kali didirikan pada tahun 1993 di Pilipina dengan jenis kredit *Shelter Advocacy to Housing Finance* (SAHF). Sistem kreditnya adalah kolektif dengan suku bunga sebesar 1,5% per bulan dan jangka waktu pinjaman selama 24 sampai dengan 48 minggu. Pelajaran yang dapat diambil dari program ini adalah;

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
- b. Adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam upaya perbaikan kualitas kehidupannya.

2. *CARD Bank in the Philippines*

Lembaga ini pertama kali didirikan pada tahun 1986 dengan jenis kredit *Shelter Advocacy to Housing Finance* (SAHF). Sistem kreditnya adalah kolektif dengan suku bunga sebesar 20% dan jangka waktu pinjaman selama 50 minggu. Pelajaran yang dapat diambil dari program ini adalah;

- a. Akusisi lahan dengan status kepemilikan legal untuk pembangunan rumah baru.
- b. Adanya program pelatihan untuk peningkatan kapasitas para anggotanya.
- c. Adanya forum diskusi tentang kesehatan, gizi, administrasi organisasi, dan pelestarian lingkungan.
- d. Adanya kerjasama (*partnership and sister organizations*) antara *philnet*, *cashpor*, dan *microcredit council*. Institusi ini berkolaborasi dengan grameen bank, cgap, dan plan international.

3. *Grameen Bank in Bangladesh*

Grameen Bank pertama kali didirikan pada tahun 1976 jenis kredit berupa Micro-Credit to Housing Finance (MCHF) dengan tingkat suku bunga sebesar 8%. Tujuan utama dari bank ini adalah untuk menyediakan kredit bagi masyarakat miskin yang sebagian besar adalah kaum wanita dengan sistem kredit kolektif dan anggota kelompok minimal 5 orang dengan latar belakang sosial ekonomi yang sama. Pelajaran yang dapat diambil dari program ini adalah;

- a. Peningkatan kuantitas pembangunan rumah.
- b. Peningkatan status sosial anggotanya.
- c. Peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan kualitas pendidikan keluarga.
- d. Perbaikan sanitasi yang berdampak positif pada penurunan wabah penyakit seperti demam, *influenza*, dan *typhoid*.

Rendahnya aksesibilitas kaum miskin untuk mendapat hunian yang layak, memang merupakan masalah yang terdapat di kota-kota di Asia, tak terkecuali di Indonesia. Daya tarik kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, menyebabkan hadirnya tingkat migrasi desa-kota yang tidak mampu diakomodasi dengan jumlah perumahan layak huni bagi warganya, sehingga seringkali kaum miskin menjadi kelompok yang tersingkirkan dari persediaan hunian yang ada (UNESCAP, 2009:ii).

Isu perumahan di kota Asia sangatlah kritis, mengingat banyaknya rumah tangga yang tidak mampu membeli rumah yang layak. Di kebanyakan negara, hampir sebagian besar dari populasi kota tidak mampu membeli rumah yang layak, dan bahkan memaksakan untuk tinggal di unit rumah yang kecil, tinggal di pinggir kota, jauh dari tempat kerja, membangun rumah mereka sendiri, atau menyewa gubuk di perumahan kumuh atau bahkan liar (UNESCAP, 2009:2).

2.3.3 Pembiayaan Perumahan Masyarakat Miskin di Indonesia

Dalam latar pembangunan manusia seutuhnya, perkara perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia sewajarnya menempati posisi dan prioritas unggulan. Khususnya dalam hal yang menyangkut masyarakat kota berpenghasilan sangat rendah dan tidak tetap (Budihardjo, 1998:54).

Salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini meliputi (Iwan, 2004:163):

1. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum diimbangi kemampuan penyediaan, baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Secara nasional kebutuhan perumahan masih relatif besar, sebagai gambaran status kebutuhan perumahan pada tahun 2000 meliputi: (i) kebutuhan rumah yang belum terpenuhi sekitar 4,3 juta unit rumah, (ii) pertumbuhan kebutuhan rumah baru setiap tahunnya sekitar 800 ribu unit rumah; serta (iii) kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi persyaratan layak huni sekitar 13 juta unit rumah (25%).
2. Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang responsif (sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan), karena terbatasnya akses informasi, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan pembiayaan perumahan.
3. Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendanaan

dalam pengadaan perumahan. Di samping itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah masih perlu dimantapkan, baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.

Sejak 30 tahun yang lalu, pembangunan perumahan bagi MBR bergantung kepada fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang merupakan subsidi bunga bagi kredit pemilikan rumah untuk kategori Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Subsidi bunga tersebut diciptakan karena rendahnya pendapatan rumah tangga serta belum adanya instrumen pembiayaan perumahan melalui pasar modal (Budihardjo, 1998:38).

Dalam konteks penyelenggaraan perumahan yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan perumahan dan permukiman di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena belum berkembangnya pemahaman bahwa perumahan juga merupakan urusan publik selain urusan individu yang memiliki peran penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi kabupaten dan kota serta dalam hal perkembangan wilayah (Bappenas, 2003:455).

Peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur untuk berfungsinya sistem perumahan yang terjangkau bagi mayoritas penduduk dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran harus tetap dijalankan. Bahkan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, pemerintah harus tetap menyediakan subsidi. Ini adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa perumahan adalah sebuah kebutuhan dasar (Santoso, 2002:59).

Pendapat tersebut dikuatkan lagi oleh Panudju (1999:93), bahwa pengadaan perumahan kota masyarakat berpenghasilan rendah tidak

mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya intervensi atau bantuan-bantuan dari pihak luar.

Cara pembelian rumah di Indonesia meliputi;

1. Tunai
 - a. *Hard Cash*, pembayaran dilunasi sebelum rumah diserahkan kepada pembeli rumah
 - b. *Soft Cash*, pembeli menyerahkan sebagian uangnya sebelum rumah diserahkan
2. Kredit, meliputi bentuk formal dan informal.

Dalam negara-negara miskin, pembiayaan perumahan formal sering tidak berkembang, karena (UNESCAP, 2008-2:12):

1. Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan di bank atau tidak mampu menabung dan karena itu tidak banyak uang tersedia untuk dipinjamkan oleh sumber pemberi pinjaman formal.
2. Banyak orang yang tidak mempercayai bank dan menyimpan uangnya sendiri seperti misalnya, di bawah kasur atau membeli emas.
3. Bank lebih memilih untuk meminjamkan uang yang mereka miliki ke bisnis untuk jangka pendek daripada ke perumahan untuk waktu yang lama.
4. Situasi ekonomi dan politik sering tidak stabil dan kadang menyebabkan peminjam tidak dapat membayar kembali.

Menurut Yudhohusodo (1991), ada 2 bentuk pembiayaan perumahan informal yang lazim di Indonesia:

1. Koperasi
2. Arisan

Dalam kedua sistem diatas, anggota diwajibkan menabung untuk selanjutnya dana tersebut dimobilisasi guna pembiayaan perumahan.

Persoalan penyediaan perumahan bagi mereka yang berpendapatan rendah sudah ada sebelum krisis. Peluang untuk mengembangkan suatu sistem yang lebih baik juga sudah ada sebelum krisis. Yang diperlukan sekarang adalah suatu keberanian untuk berinovasi atau suatu sikap politik untuk mengembangkan sistem yang baru dari peluang dan contoh yang sudah ada (Santoso, 2002:60).

Kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman relatif sangat terbatas. Sementara itu, meskipun masalah perumahan merupakan tanggungjawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggungjawab individual. Oleh karenanya sumber daya dan potensi masyarakat perlu ditumbuh-kembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan dan permukimannya secara mandiri, dengan didukung oleh upaya pemerintah melalui penciptaan iklim yang kondusif. Ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan perumahannya lebih sering dikarenakan iklim yang ada belum secara optimal memberikan ruang, kesempatan dan peluang yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya (Iwan, 2004:165).

2.4 Bedah Rumah dan Konsep Kualitas Rumah

2.4.1 Pengertian Rumah

Tempat tinggal merupakan titik awal dari kegiatan manusia dalam kehidupannya. Aktivitas manusia pada umumnya bermula dari tempat tinggal, kemudian keluar untuk melakukan berbagai aktifitas diluar tempat tinggal, dan akhirnya kembali lagi ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal biasanya diwujudkan dalam bentuk fisik berupa rumah yang berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia,

yang sekaligus dapat dipandang sebagai *shelter* bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindung (Ridlo, 2001:18).

Rumah atau papan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tingkat kepentingannya hanya dibawah sandang dan pangan. Rumah dapat diartikan sebagai ruang dimana manusia hidup dan melakukan aktifitas kehidupan dan bebas dari gangguan fisik maupun psikis (Herlianto, 1986:5).

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (UU No. 4/1992 ps.1 (1)).

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan berperan sebagai sarana bagi pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi penerus. Selain itu, rumah merupakan pengejawantahan jati diri, dan tempat tumbuh kembangnya kehidupan masyarakat (Bappenas, 2003:453).

Rumah adalah tempat perlindungan utama bagi manusia dari iklim, kemudian juga dari gangguan fisik lainnya. Rumah merupakan suatu basis pemeliharaan kemampuan produksi, tempat beristirahat, tempat untuk memelihara kesehatan, juga tempat untuk belajar dan mempersiapkan diri (Santoso, 2002:39).

Sampai saat ini masih banyak penentu kebijakan yang melihat rumah sekadar sebagai *shelter*, tempat berlindung dari hujan, angin, panas matahari, gangguan binatang atau manusia yang tidak dikehendaki. Rumah dilihat sekadar sebagai produk akhir, bukan sebagai proses yang dinamis. Program perumahan digariskan atas dasar pencapaian target. Kuantitas lebih dipentingkan daripada kualitas (Budihardjo, 1998:55).

Rumah bagi mayoritas rakyat Indonesia tidak dianggap sebagai “real property” untuk diperjual belikan, melainkan lebih sebagai “personal property” untuk dileluri, dicintai, dipelihara dan dikembangkan sendiri (Budihardjo, 1998:40).

Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan hasil dari suatu proses keputusan yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan, kepentingan, kemampuan dan keterbatasan, pribadi, dan lingkungan (sosial, ekonomi, dan fisik). Rumah bukanlah soal membangun, tetapi rumah adalah persoalan mengelola kehidupan, dimana berbagai kebutuhan, kepentingan, kemampuan, dan kelemahan dioptimalkan terhadap terhadap sumber daya yang serba terbatas yang dimiliki pribadi dan peluang yang disediakan oleh lingkungan (Santoso, 2002:41-42).

Untuk masyarakat dari kelompok miskin, perumahan bukanlah sebuah produk, namun sebuah proses. Perumahan bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dalam satu waktu bergantung pada sebuah rencana, namun dibangun secara bertahap, sebagai kebutuhan rumah tangga dan perubahan sumber daya (UNESCAP, 2009:3).

2.4.2 Konsep Kualitas Rumah

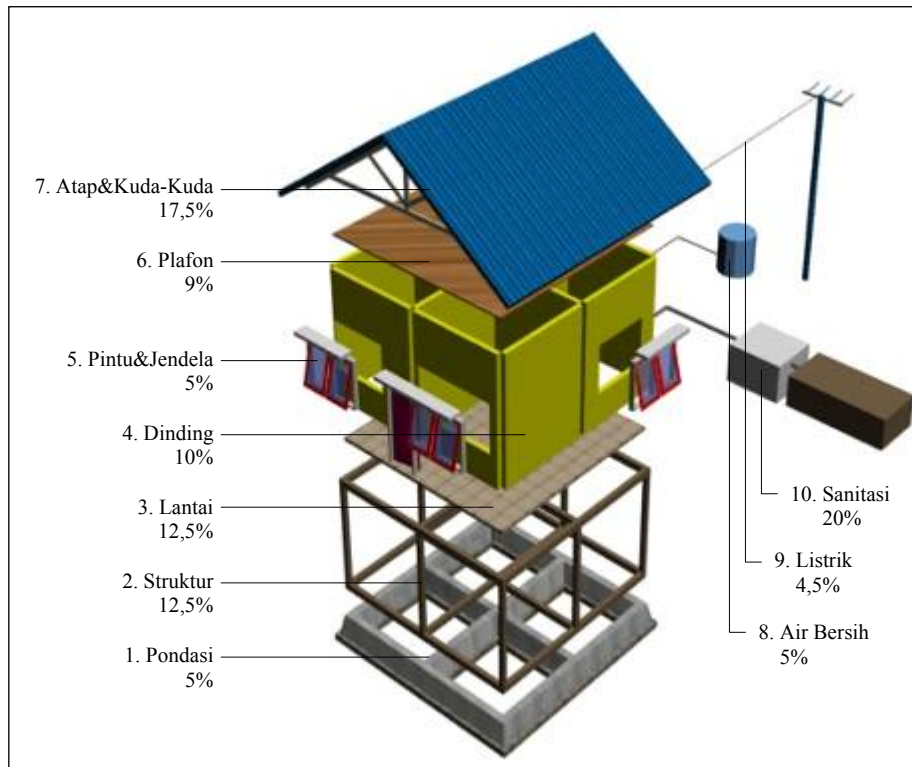
Tipologi Rumah Sederhana meliputi (Depkimpraswil, 2002-1:2):

1. Rumah Tembok
2. Rumah ½ Tembok
3. Rumah Kayu tidak Panggung
4. Rumah Kayu Panggung

Komponen bangunan rumah beserta persentase komponen bangunan berdasarkan perkiraan anggaran biaya pekerjaan (Depkimpraswil, 2002:41) dan (Tamrin, 2008:12):

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. Pondasi | : | 5% |
| 2. Struktur/Kerangka | : | 12,5% |
| 3. Lantai | : | 12,5% |
| 4. Dinding | : | 10% |
| 5. Pintu dan Jendela | : | 5% |
| 6. Plafon | : | 9% |

- 7. Atap dan Kuda-Kuda : 17,5%
- 8. Air Bersih : 4%
- 9. Listrik : 4,5%
- 10. KM dan Septictank : 20%



Sumber : Peneliti, 2009

GAMBAR 2.1
PERSENTASE KOMPONEN RUMAH BERDASARKAN
PERKIRAAN ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN

Dalam gambar diatas terlihat bahwa masing-masing komponen bangunan rumah sederhana diberi pembobotan persentase berdasarkan perkiraan anggaran biaya pekerjaan. Selanjutnya untuk pembobotan kualitas masing-masing komponen bangunan diatas dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut;

TABEL II.2
BOBOT MASING-MASING KOMPONEN RUMAH
SEBAGAI DASAR PENILAIAN KONDISI RUMAH

No	KOMPONEN RUMAH SEDERHANA DAN PERSYARATAN MINIMUM		Bobot
1.	PONDASI	100%	5
	- Bentuk dan konstruksinya menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat	100%	1,67
	- Tidak terpengaruh oleh keadaan di luar pondasi, seperti keadaan air tanah dan lain-lain	100%	1,67
	- Terletak di atas tanah dasar yang keras sehingga kedudukannya tidak mudah bergerak	100%	1,67
2.	STRUKTUR/KERANGKA BANGUNAN	100%	12,5
	- Menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat	100%	6,25
	- Terlindung dari korosi, kelapukan, serangan serangga dan kekuatan perusak lainnya	100%	6,25
3.	LANTAI	100%	12,5
	- Menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat	100%	4,17
	- Kedap air & tidak lembab, kecuali untuk rumah panggung dapat terbuat dari papan/anyaman bambu	100%	4,17
	- Tinggi minimum 10 cm dari pekarangan	100%	4,17
4.	DINDING	100%	10
	- Menunjukkan konstruksi yang kokoh, kuat dan kedap air	100%	2,50
	- Berfungsi menyangga atap, menahan angin & air hujan, melindungi dari panas & debu dari luar	100%	2,50
	- Menjaga <i>privacy</i> penghuni	100%	2,50
	- Permukaan luar/dalam dinding harus dihaluskan	100%	2,50
5.	PINTU DAN JENDELA	100%	5
	- Menunjukkan konstruksi yang kokoh, kuat dan tahan cuaca	100%	1,25
	- Berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai.	100%	1,25
	- Menggunakan kayu kelas II (untuk bingkai dan panil pintu/jendela)	100%	1,25
	- Daun pintu dilengkapi 2 engsel, 1 kunci tanam, dan daun jendela dilengkapi 2 engsel, 1 grendel	100%	1,25
6.	PLAFON	100%	9
	- Menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat	100%	3,00
	- Tinggi minimum 2,4 meter dari lantai	100%	3,00
	- Menutupi seluruh ruangan	100%	3,00
7.	ATAP DAN KUDA-KUDA	100%	17,5
	- Menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat	100%	8,75
	- Atap berfungsi sebagai penahan panas matahari, melindungi masuknya debu, angin & air hujan.	100%	8,75
8.	AIR BERSIH	100%	4
	- Diakses air bersih yang layak untuk diminum	100%	2,00
	- Pipa air untuk distribusi digunakan ukuran $\varnothing \frac{1}{2}$ " , terbuat dari PVC kualitas baik	100%	2,00
9.	LISTRIK	100%	4,5
	- Diakses listrik,	100%	2,25
	- Setiap ruangan rumah terdapat minimal 1 (satu) unit gantungan lampu, stopkontak dan saklar	100%	2,25
10.	WC DAN SEPTICTANK	100%	20
	- Rumah harus memiliki minimum satu kamar mandi dan kakus	100%	6,67
	- Air kotor cucian & kamar mandi disalurkan melalui saluran tertutup PVC $\varnothing 3"$ ke saluran umum	100%	6,67
	- Air kotor kakus disalurkan melalui PVC $\varnothing 4"$ ke tangki septictank	100%	6,67
			100

Sumber : Tamrin (2008), (Hamzah, 2000), (Keman, 2005), (Depkimpraswil, 2002-2), (Depkes R.I., 2002)

Pembobotan masing-masing komponen rumah diatas dijadikan sebagai dasar penilaian kondisi rumah dalam kegiatan wawancara dan observasi penelitian di lapangan.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986, ketentuan mengenai perumahan sederhana diantaranya (Hamzah, 2000:21):

1. Ruang kediaman minimum harus terdiri dari satu ruang hunian, satu kamar mandi dan kakus, yang dilengkapi dengan ventilasi dan penerangan serta penetrasi sinar matahari.
2. Rumah harus dilengkapi dengan plambing, penyediaan air minum dan listrik.
3. Struktur bangunan harus memenuhi syarat-syarat yaitu dapat menahan semua beban dan gaya-gaya termasuk gempa bumi, cukup terlindung dari korosi, kelapukan, serangan serangga dan kekuatan perusak lainnya, serta dapat berfungsi dengan baik minimum dalam waktu 20 tahun.

Kebutuhan dasar minimal rumah (Depkimpraswil, 2002-2:8);

1. Atap yang rapat dan tidak bocor
2. Lantai yang kering dan mudah dibersihkan
3. Penyediaan air bersih yang cukup
4. Pembuangan air kotor yang baik dan memenuhi persyaratan kesehatan
5. Pencahayaan alami yang cukup
6. Udara bersih yang cukup melalui pengaturan sirkulasi udara sesuai dengan kebutuhan

Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktifitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktifitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2.80 meter (Depkimpraswil, 2002-1:5).

1. Pondasi

Pondasi harus kuat untuk meneruskan beban bangunan ke tanah dasar, memberi kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi penghubung antara bangunan dengan tanah (Keman, 2005:31).

Konstruksi pondasi suatu bangunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Tamrin, 2008:50):

- a. Bentuk dan konstruksinya harus menunjukkan suatu konstruksi yang kokoh dan kuat untuk mendukung beban bangunan di atasnya.
- b. Pondasi harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah hancur, sehingga kerusakan pondasi tidak mendahului kerusakan bagian bangunan di atasnya.
- c. Tidak boleh mudah terpengaruh oleh keadaan di luar pondasi, seperti keadaan air tanah dan lain-lain.
- d. Pondasi harus terletak di atas tanah dasar yang cukup keras sehingga kedudukan pondasi tidak mudah bergerak (berubah), baik bergerak ke samping, ke bawah (turun) atau terguling.

2. Kerangka bangunan (Kayu/Beton)

Rangka dinding untuk rumah tembok dibuat dari struktur beton bertulang. Untuk rumah setengah tembok menggunakan setengah rangka dari beton bertulang dan setengah dari rangka kayu. Untuk rumah kayu tidak panggung rangka dinding menggunakan kayu. Untuk sloof disarankan menggunakan beton bertulang. Sedangkan rumah kayu panggung seluruhnya menggunakan kayu, baik untuk rangka bangunan maupun untuk dinding dan pondasinya (Hamzah, 2000:21).

Struktur bangunan harus dapat menahan semua beban dan gaya-gaya termasuk gempa bumi, cukup terlindung dari korosi, kelapukan, serta serangan serangga dan kekuatan perusak lainnya (Hamzah, 2000:21).

3. Lantai

Persyaratan konstruksi lantai (Keman, 2005:31):

- a. Lantai kedap air dan tidak lembab
- b. Tinggi minimum 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari badan jalan
- c. Bahan kedap air, kecuali untuk rumah panggung dapat terbuat dari papan atau anyaman bambu.

4. Dinding

Dinding adalah bagian bangunan yang sangat penting perannya bagi suatu konstruksi bangunan. Dinding membentuk dan melindungi isi bangunan baik dari segi konstruksi maupun penampilan artistik dari bangunan (Tamrin, 2008:54).

Dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari panas dan debu dari luar, serta menjaga kerahasiaan (privacy) penghuninya (Keman, 2005:31).

Untuk dinding tembok, permukaan luar/dalam dinding harus dihaluskan (Depkimpraswil, 2002-2:30).

5. Pintu dan Jendela

Syarat pintu dan jendela pada sebuah bangunan meliputi (Tamrin, 2008:126):

- a. Bekerja dengan aman
- b. Tahan cuaca, untuk mendapatkan ketahanan terhadap cuaca maka harus dipilih dari bahan yang baik, tidak mudah lapuk, tidak mudah mengalami kembang/susut (muai, melengkung)
- c. Tidak ada celah/cahaya yang tidak dikehendaki masuk, cuaca (suhu, udara) masuk ke dalam ruangan.
- d. Kuat

e. Minimal ada 1(satu) buah jendela dalam sebuah ruangan.

Memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai (Keman, 2005:31).

Kayu untuk kusen pakai kelas II, untuk bingkai dan panil pintu/jendela dari kayu kelas II (Depkimpraswil, 2002-2:34).

Tiap daun pintu dilengkapi dengan 2 buah engsel dan 1 kunci tanam dan tiap daun jendela yang dibuka dilengkapi dengan 2 buah engsel, 1 gerendel (Depkimpraswil, 2002-2:37).

6. Plafon

Plafon adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai langit-langit bangunan. Pada dasarnya plafon dibuat dengan maksud untuk mencegah cuaca panas atau dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah melewati atap (Tamrin, 2008:177).

Pada prinsipnya pemasangan batang penggantung plafon adalah sama, tetapi jaraknya tidak sama tergantung dari bahan plafon yang digunakan. Pada bangunan perumahan dalam pemasangan plafond, ketentuan untuk tinggi ruang/kamar minimal sekurang-kurangnya 2,40 m kecuali kalau kasau-kasaunya miring sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari luas ruang mempunyai tinggi ruang 2,40 m dan tinggi ruang selebihnya pada titik terendah tidak kurang dari 1,75 m. Pada ruang cuci dan kamar mandi diperbolehkan sampai sekurang-kurangnya 2,10 m (Tamrin, 2008:180).

Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas terik matahari, minimum 2,4 m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu, tripleks atau gipsum (Keman, 2005:31).

Kayu penggantung langit-langit dipergunakan kayu kelas II dengan ukuran 5 x 10 cm untuk balok utama dan 5 x 7 cm untuk balok antara (Depkimpraswil, 2002-2:49).

7. Atap dan Kuda-Kuda

Atap merupakan bagian dari struktur bangunan yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan (Tamrin, 2008:157).

Atap rumah sebagai penyangga berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari serta melindungi masuknya debu, angin, dan air hujan (Keman, 2005:31).

Kuda-kuda menggunakan konstruksi balok kayu dari kayu yang tua dan kering dengan ukuran 5 x 10 cm dan dipasang dengan jarak 3.00 meter (Depkimpraswil, 2002-2:42).

8. Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak (Depkes R.I., 2002).

Kedalaman bor untuk sumur pompa tangan minimal 12 meter atau sampai dengan keluar air bersih yang layak untuk diminum, dan pipa air untuk distribusi digunakan ukuran $\varnothing \frac{1}{2}$ “, terbuat dari PVC kualitas baik (Depkimpraswil, 2002-2:52).

9. Listrik

Minimal diakses listrik sebesar 450 VA. Jumlah gantungan, stopkontak, saklar sesuai dengan gambar kerja, dimana menurut Depkimpraswil (2002-4:55) menyatakan bahwa pada masing-masing ruangan rumah terdapat minimal;

- 1 (satu) unit gantungan lampu,
- stopkontak dan saklar,
- satu lampu teras.

10. KM/WC dan *Septictank*

Dari cara penyaluran airnya, sistem pembuangan air kotor, kotoran, air hujan, dan air bekas, dibedakan dalam 2 jenis yaitu sistem campuran dan sistem terpisah. Sistem campuran, artinya air bekas dan air kotor dikumpulkan dan bersama-sama dibuang menggunakan satu aliran. Sedangkan sistem terpisah, air dikumpulkan sesuai dengan jenisnya dan dialirkan secara terpisah. Air kotor menuju ke *septictank* sedangkan air bekas dan air hujan menuju riol lingkungan (Tamrin, 2008:201).

Air kotor asal dari cucian dan kamar mandi disalurkan melalui saluran tertutup dari pvc Ø 3” untuk selanjutnya dialirkan ke saluran umum, dan air kotor dari kakus disalurkan melalui pipa pvc Ø 4” yang selanjutnya dimasukkan ke tangki *septictank* (Depkimpraswil, 2002-2:55).

2.4.3 Bedah Rumah Sebagai Usaha Peningkatan Kualitas Rumah

Dari pengertian secara *harfiah*, istilah *bedah rumah* dapat diartikan sebagai usaha perbaikan, renovasi dan rehabilitasi terhadap bagian atau komponen rumah yang memiliki kondisi rusak.

Perbaikan berarti pembetulan (hasil, usaha dan sebagainya), memperbaiki, perihal menjadikan keadaan baik (Depdiknas, 2001:91).

Renovasi berarti pembaharuan, peremajaan, penyempurnaan – tentang bangunan gedung dan sebagainya (Depdiknas, 2001:948).

Rehabilitasi berarti pemulihan kepada keadaan yang dahulu (semula), perbaikan komponen yang rusak dan sebagainya (Depdiknas, 2001:940).

Secara keseluruhan *bedah rumah* yang merupakan kegiatan perbaikan, renovasi dan rehabilitasi terhadap bagian atau komponen rumah yang rusak ini dapat diartikan sebagai usaha peningkatan kualitas rumah.

Di Kota Padang, program bedah rumah ini diwujudkan dalam bentuk bantuan perbaikan rumah, dimana pada tahun 2008 sebanyak 11 unit rumah tidak layak huni yang diseleksi dengan prosedur tertentu diberi bantuan perbaikan fisik secara cuma-cuma sebesar Rp. 10 Juta. Kegiatan bedah rumah ini dikelola oleh Badan Amil Zakat dengan sumber pembiayaan dari dana amil zakat Kota Padang. Dalam pelaksanaannya, peningkatan kualitas rumah dipandang secara spesifik dari komponen dasar bangunan. Misalnya perbaikan lantai saja, dinding, atau atap dan sebagainya.

2.5 Persepsi

Walgito (1999:46) mendefinisikan persepsi sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh *organisme* atau individu sehingga merupakan proses yang berarti dan merupakan proses integrated dalam diri individu. Persepsi mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus dan penterjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisir yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.

Menurut Rakhmat (1993) disebutkan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan dilanjutkan dengan menafsirkan pesan.

Pengertian ini juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Rachmat (1993) dalam Ludigdo dan Machfoedz (1999) bahwa persepsi ditentukan oleh faktor personal dan situasional yang disebut dengan faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk dalam apa yang

disebut sebagai faktor personal. Sedangkan faktor situasional atau struktural berasal semata-mata dari sifat fisik dan efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu.

Budihardjo (1998:57) mengungkapkan bahwa beberapa psikolog terkenal seperti Freud, Maslow, Murry, Horney, Adler dan Fromm telah membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Teori jenjang kebutuhan (*Hierarchy of Needs*) Maslow sebagai kerangka pemikiran untuk menemu-kenali jenis-jenis kebutuhan yang perlu disediakan oleh suatu rumah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis (*psysiological needs*).
2. Kebutuhan akan Rasa Aman (*security and safety needs*).
3. Kebutuhan akan Hubungan Sosial (*sosial needs*).
4. Kebutuhan Penghargaan Terhadap Diri Sendiri (*self-esteem go needs*).
5. Kebutuhan akan Aktualisasi Diri (*self-actualization needs*).

Frederick Herzberg dalam Hasibuan (1990:177) mengemukakan teori dua faktor, dia membagi teori kebutuhan Maslow diatas menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kebutuhan tingkat rendah, dimana kebutuhan tingkat rendah ini mencakup kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan sosial.
2. Kebutuhan tingkat tinggi, dimana kebutuhan tingkat tinggi ini mencakup kebutuhan prestise dan kebutuhan aktualisasi diri.

2.6 Sintesa Literatur

Bertitik tolak dari beberapa teori dan pandangan diatas, maka dapat dibuat sintesa literatur tentang masing-masing substansi penelitian yang dapat dilihat dalam Tabel II.3 dibawah ini;

TABEL II.3
SINTESA LITERATUR

No	Substansi	Perspektif Teori/Konsep	Sumber
1	2	3	4
1	Peranan	Peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi suatu bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan, berupa ukuran dari hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.	(Komarudin, 1994:768)
2	Zakat	<p>Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.</p> <p>Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Milik penuh, dimiliki perorangan atau kelompok. 2. Tidak diperoleh dengan cara haram. 3. Mencapai nishab, yakni batas minimal harta yang dimiliki yang sudah wajib untuk berzakat, jumlahnya kira-kira 85 gram emas. 4. Khaul yakni jika sejumlah harta yang mencapai nishabnya dan sudah mencapai satu tahun hijriyah. <p>Kriteria orang yg berhak menerima zakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakir 2. Miskin 3. Pengurus zakat 4. Mu'allaf yang memerdekakan budak 5. Orang yang berhutang di jalan Allah 6. Orang yang sedang dalam perjalanan 	<p>(UU RI No.38/1999 Ps.1(1))</p> <p>(Kurnia, 2008:11)</p> <p>(QS: At-Taubah: 60)</p> <p>(Kurnia, 2008:7)</p>
3	Bedah Rumah	<p>Secara keseluruhan bedah rumah merupakan kegiatan perbaikan, renovasi dan rehabilitasi terhadap bagian atau komponen rumah yang rusak.</p> <p>DiKota Padang, kegiatan bedah rumah diwujudkan dalam bentuk bantuan perbaikan rumah. Dalam pelaksanaannya, peningkatan kualitas rumah dipandang secara spesifik dari komponen dasar bangunan. Misalnya perbaikan lantai saja, dinding, atau atap dan sebagainya.</p>	<p>(Analisis dari definisi harfiah Depdiknas, 2001:120)</p> <p>(Sumber: BAZ Kota Padang)</p>
4	Kualitas Rumah	<p>Persentase komponen rumah berdasarkan perkiraan anggaran biaya pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pondasi : 5% 2. Struktur/Kerangka : 12,5% 3. Lantai : 12,5% 4. Dinding : 10% 5. Pintu dan Jendela : 5% 6. Plafon : 9% 7. Atap dan Kuda-Kuda : 17,5% 8. Air Bersih : 4% 9. Listrik : 4,5% 10. KM dan Septictank : 20% 	<p>(Keman, 2005)</p> <p>(Depkimpraswi 1, 2002:41)</p> <p>(Tamrin, 2008:12)</p>

No	Substansi	Perspektif Teori/Konsep	Sumber
1	2	3	
		<p>Persyaratan minimum masing-masing komponen ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pondasi <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk dan konstruksinya harus menunjukkan suatu konstruksi yang kokoh dan kuat untuk mendukung beban bangunan di atasnya. - Menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah hancur. - Tidak terpengaruh oleh keadaan di luar pondasi, seperti keadaan air tanah dan lain-lain. - Terletak di atas tanah dasar yang cukup keras sehingga kedudukan pondasi tidak mudah bergerak. 2. Struktur (Rangka Bangunan) <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat. - Terlindung dari korosi, kelapukan, serangan serangga dan kekuatan perusak lainnya. 3. Lantai <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat - Kedap air dan tidak lembab, kecuali untuk rumah panggung dapat terbuat dari papan atau anyaman bambu - Tinggi minimum 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari badan jalan. 4. Dinding <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan konstruksi yang kokoh, kuat dan kedap air. - Berfungsi untuk menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari panas dan debu dari luar. - Menjaga privacy penghuninya. - Permukaan luar/dalam dinding harus dihaluskan. 5. Pintu & Jendela <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan konstruksi yang kokoh, kuat dan tahan cuaca. - Berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai. - Kayu untuk kusen pakai kelas II, untuk bingkai dan panil pintu/jendela dari kayu kelas II. - Tiap daun pintu dilengkapi dengan 2 buah engsel dan 1 kunci tanam dan tiap daun jendela yang dibuka dilengkapi dengan 2 buah engsel, 1 grendel. 6. Plafon <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat. - Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas terik matahari, minimum 2,4 m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu, tripleks atau gipsium. - Kayu penggantung langit-langit dipergunakan kayu kelas II. - Plafon menutupi seluruh ruangan, untuk mencegah cuaca panas atau dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah melewati atap. 7. Atap dan Kuda-kuda <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat. - Atap rumah berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari serta melindungi masuknya debu, angin dan air hujan. 8. Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> - Diakses air bersih yang layak untuk diminum. - Pipa air untuk distribusi digunakan ukuran $\varnothing \frac{1}{2}$" , terbuat dari PVC kualitas baik. 	<p>Tamrin (2008), (Hamzah, 2000), (Keman, 2005), (Depkimpraswi 1, 2002-2), (Depkes R.I., 2002)</p>

Bersambung

No	Substansi	Perspektif Teori/Konsep	Sumber
1	2	3	
		<p>9. Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal diakses listrik sebesar 450 VA. Jumlah gantungan, stopkontak, saklar sesuai dengan gambar kerja, dimana pada masing-masing ruangan rumah terdapat minimal 1 (satu) unit gantungan lampu, stopkontak dan saklar, dan satu lampu teras. <p>10. Sanitasi (KM/WC & Septictank)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah harus memiliki minimum satu kamar mandi dan kakus. - Air kotor asal dari cucian dan kamar mandi disalurkan melalui saluran tertutup dari pvc Ø 3” untuk selanjutnya dialirkan ke saluran umum. - Air kotor dari kakus disalurkan melalui pipa pvc Ø 4” yang selanjutnya dimasukkan ke tangki septictank. 	
5	Masyarakat Miskin	<p>Secara syar’i kemiskinan dipandang dalam dua bentuk, yakni fakir dan miskin. Fakir yaitu orang-orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.</p> <p>Kriteria rumah tangga miskin versi BPS yang digunakan Pemerintah kota Padang dalam menentukan masyarakat miskin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai rumah dari tanah, bambu, kayu murahan. 2. Dinding rumah dari bambu, rumbia, kayu kualitas rendah, tembok tanpa plester. 3. Tidak memiliki fasilitas jamban atau menggunakan jamban bersama. 4. Rumah tidak dialiri listrik. 5. Sumber air minum dari sumur, sungai, air hujan. 6. Bahan bakar memasak dari kayu bakar, arang, minyak tanah. 7. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas. 8. Penghasilan < Rp. 600 ribu /bulan. 9. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD. 10. Tidak punya tabungan atau barang dengan nilai jual diatas Rp.500 ribu seperti ternak, motor, televisi dll. 	<p>BAZ Kota Padang</p> <p>(www.padangkini.com)</p>
6	Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan	<p>Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu rukun yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana zakat yang baik merupakan alternatif yang potensial untuk mengentaskan fakir miskin dan orang-orang terlantar lainnya.</p> <p>Zakat memiliki peranan penting dalam pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam terutama dalam merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu.</p> <p>Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.</p> <p>Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.</p>	<p>(KMNU 2000)</p> <p>(Kurnia, 2008:8)</p> <p>BAZNAS</p>

No	Substansi	Perspektif Teori/Konsep	Sumber
1	2	3	
7	Pembiayaan Perumahan Miskin	<p>Peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur untuk berfungsinya sistem perumahan yang terjangkau bagi mayoritas penduduk dan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran harus tetap dijalankan. Bahkan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, pemerintah harus menyediakan subsidi. Ini adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa perumahan adalah sebuah kebutuhan dasar.</p> <p>Pengadaan perumahan kota masyarakat berpenghasilan rendah tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya intervensi atau bantuan-bantuan dari pihak luar.</p> <p>Strategi yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan untuk menarik dana bagi perumahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan perumahan dari bank menjamin dana 2. Pembiayaan perumahan dari skema tabungan wajib 3. Pembiayaan perumahan dari pajak khusus atau undian <p>Dalam upaya agar pembiayaan perumahan menjangkau kaum miskin, sistem konvensional untuk mengelola pembiayaan perumahan dan lembaga pembiayaan formal yang meminjamkan untuk perumahan memiliki catatan yang sangat rendah. Fakta yang menyedihkan adalah bahwa sistem perumahan formal yang ada di kebanyakan negara di Asia saat ini, tidak dapat menjangkau mayoritas populasi kota.</p> <p>Cara pembiayaan perumahan yang lazim di Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunai, umumnya oleh masyarakat berpenghasilan menengah keatas. 2. Kredit, umumnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk Formal; Bank b. Bentuk Informal <ol style="list-style-type: none"> i. Koperasi ii. Arisan 	<p>(Santoso, 2002:59)</p> <p>(Panudju, 1999:93)</p> <p>UNESCAP, 2008-2:14)</p> <p>UNESCAP (2008-2:19)</p> <p>Yudhohusodo (1991)</p>
8	Persepsi	<p>Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan proses yang berarti dan merupakan proses integrated dalam diri individu.</p> <p>Teori Dua Faktor oleh Frederick Herzberg; membagi teori hirarki kebutuhan Maslow menjadi dua bagian yaitu kebutuhan tingkat rendah sebagai kerangka pemikiran untuk menemukan kebutuhan yang perlu disediakan oleh suatu rumah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Fisiologis 2. Kebutuhan akan Rasa Aman 3. Kebutuhan akan Hubungan Sosial 	<p>(Walgito, 1999:46)</p> <p>(Hasibuan, 1990 : 177)</p> <p>(Budihardjo, 1998:57)</p>

Sumber: Peneliti, 2009

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

3.1 Kondisi Fisik Wilayah Kota Padang

3.1.1 Luas Wilayah

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di pesisir barat Pulau Sumatera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km² dengan jumlah penduduk berjumlah 765.456 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan atau 104 kelurahan. 52,52% dari daerah Kota Padang adalah hutan lindung, 9,01%-nya bangunan dan pekarangan rumah, sedangkan 7,2%-nya atau sekitar 52,25 km² adalah perairan (Badan Pusat Statistik Padang, 2003) (Situs Resmi Pemko Padang).

TABEL III.1
LUAS KOTA PADANG PER KECAMATAN

No.	KECAMATAN	LUAS (Km2)
1.	Bungus Teluk kabung	100,78
2.	Lubuk Kilangan	85,99
3.	Lubuk Begalung	30,91
4.	Padang Selatan	10,03
5.	Padang Timur	8,15
6.	Padang Barat	7
7.	Padang Utara	8,08
8.	Nanggalo	8,07
9.	Kuranji	57,41
10.	Pauh	146,29
11.	Koto Tengah	232,25
TOTAL		694,96

Sumber : Dinas Kimpraswil Kota Padang, 2006

3.1.2 Orientasi Wilayah

Secara geografis wilayah Kota Padang berada antara 00°44'00"-01°08'35"LS dan 100°05'05"-100°34'09" BT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- Batas Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- Batas Barat : Samudera Indonesia
- Batas Timur : Kabupaten Solok

Kota Padang berada di sebelah Barat Bukit Barisan dan dengan garis pantai sepanjang 68,126 km. Sebagai kota pantai, sebagian wilayah Kota Padang terdiri atas dataran rendah yang terletak pada ketinggian 0-10 meter diatas permukaan laut. Sedangkan daerah lainnya terletak pada dataran tinggi, yaitu sebelah selatan dan timur. Secara topografi Kota Padang terbagi atas empat kategori, yaitu:

- Dataran datar (lereng 0-2%) seluas 15.489 Ha;
- Dataran landai (lereng 2-15%) seluas 5.028 Ha;
- Dataran bergelombang (lereng 15-40%) seluas 14.212 Ha;
- Dataran terjal atau perbukitan (lereng diatas 40%) seluas 36.570 Ha.

Berdasarkan penyebaran topografinya, lahan efektif Kota Padang berada pada topografi dengan kelerengan 0-15% dan luas 20.514 Ha atau 29% dari luas wilayah Kota Padang. Daerah ini tersebar dari pinggiran pantai barat hingga wilayah timur kota.

Kota Padang termasuk daerah beriklim tropis yang memiliki temperatur 23⁰C–32⁰C di siang hari dan 22⁰C–28⁰C di malam hari. Berlokasi pada lembah di antara Bukit Barisan dan Samudera Indonesia, Kota Padang sangat dipengaruhi oleh angin musim dan angin laut yang menyebabkan curah hujan yang tinggi, yaitu 405,88 mm/bulan.

3.1.3 Tata Guna Lahan

Luas wilayah Kota Padang yang telah terbangun adalah $\pm 14\%$ dari luas total Kota Padang. Bagian yang tidak terbangun digunakan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, perkebunan serta tanah yang tidak diusahakan. Tata Guna lahan Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**TABEL III.2
TATA GUNA LAHAN KOTA PADANG**

No.	KECAMATAN	Guna Lahan									JUMLAH (Ha)	
		Permukiman	Industri	Kebun Campuran	Ladang	Rawa/Kolam Ikan	jasa	Sawah	Semak/Alang-Alang	Hutan		
1.	Bungus Teluk kabung	189	22	11	942	1.347	31	12	7.372	152	10.078	
2.	Lubuk Kilangan	336	79	58	624	950	365	4	6.147	36	8.599	
3.	Lubuk Begalung	600	79	39	864	506	87	29	845	42	3.091	
4.	Padang Selatan	427	41	6	33	399	12	2	64	19	1.003	
5.	Padang Timur	554	81	13	114	20	-	-	-	33	815	
6.	Padang Barat	518	157	2	-	12	-	-	-	12	701	
7.	Padang Utara	477	78	5	75	2	49	24	-	99	809	
8.	Nanggalo	262	30	2	305	102	19	47	-	41	808	
9.	Kuranji	513	37	3	1.844	1.255	35	72	1.928	54	5.741	
10.	Pauh	284	173	13	1.153	2.890	299	17	9.690	110	14.629	
11.	Koto Tengah	1.165	214	20	2.289	5.944	657	80	12.429	327	23.222	
LUAS		Ha	5.325	991	172	8.243	13.427	1.554	387	38.475	925	69.496
PERSENTASE		%	7,66	1,43	0,25	11,86	19,32	2,24	0,56	55,36	1,33	100,00

Sumber : Dinas Kimpraswil Kota Padang, 2006

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa luas lahan yang digunakan sebagai lahan permukiman adalah sebesar 7,66% dari total luas wilayah Kota Padang. Untuk kegiatan lainnya seperti industri dan jasa menggunakan luas lahan sebesar 3,67% dari total luas wilayah Kota Padang.

Selain itu, untuk penggunaan lahan sebagai kebun, ladang, sawah dan kolam berjumlah 31,99% dari luas wilayah Kota Padang. Jadi terdapat luas lahan sebesar 39.400 Ha atau setara dengan 56,69% dari total luas wilayah Kota Padang yang merupakan kawasan *non budidaya* berupa hutan dan semak/alang-alang.

3.2 Tinjauan Kependudukan

3.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

TABEL III.3
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK

No.	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	PENDUDUK	
			JUMLAH	KEPADATAN
1.	Bungus Teluk kabung	100,78	22.164	220
2.	Lubuk Kilangan	85,99	38.734	450
3.	Lubuk Begalung	30,91	93.203	3.015
4.	Padang Selatan	10,03	57.342	5.717
5.	Padang Timur	8,15	79.413	9.744
6.	Padang Barat	7	56.980	8.140
7.	Padang Utara	8,08	69.479	8.599
8.	Nanggalo	8,07	53.171	6.589
9.	Kuranji	57,41	105.370	1.835
10.	Pauh	146,29	47.956	328
11.	Koto Tengah	232,25	141.638	610
TOTAL		694,96	765.450	1.101

Sumber : Dinas Kimpraswil Kota Padang, 2006

Kepadatan penduduk rata-rata Kota Padang pada tahun 2006 yaitu sebesar 1.101 jiwa/km². Kecamatan dengan rata-rata kepadatan tinggi yaitu terutama pada bagian pusat kota, yakni Kota Lama yaitu Kecamatan Padang Timur (9.744 jiwa/km²), Padang Utara (8.599 jiwa/m²), Padang Barat (8.140 jiwa/km²). Sedangkan wilayah kecamatan dengan rata-rata kepadatan penduduk rendah yaitu Kecamatan Bungus Teluk Bangus (220 jiwa/km²), Pauh (328 jiwa/km²), Lubuk Kilangan (450 jiwa/km²), dan Koto Tengah (610 jiwa/km²).

3.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Padang pada tahun 2003-2008 yaitu sebesar 1,85%. Dari data tersebut, diperkirakan pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Padang meningkat menjadi 915.000 Jiwa yang tersebar di sebelas kecamatan. Untuk perhitungan lebih detail, laju pertumbuhan penduduk Kota Padang ini dapat dilihat pada Tabel III.4 dibawah ini:

TABEL III.4
LAJU PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA PADANG

No.	KECAMATAN	PENDUDUK Tahun 2002 (Jiwa)	PENDUDUK 2008		PENDUDUK 2013		AVERAGE GROWTH (2003 - 2013)
			Jumlah (Jiwa)	Growth (2003-2008)	Jumlah (Jiwa)	Growth (2008-2013)	
1.	Bungus Teluk kabung	20.227	23.000	2,16	25.700	2,24	2,20
2.	Lubuk Kilangan	39.882	46.000	2,41	53.000	2,87	2,62
3.	Lubuk Begalung	86.055	97.000	2,02	110.000	2,55	2,26
4.	Padang Selatan	56.295	57.000	0,21	57.600	0,21	0,21
5.	Padang Timur	83.038	86.300	0,64	89.000	0,62	0,63
6.	Padang Barat	61.693	61.700	0,01	62.300	0,19	0,09
7.	Padang Utara	68.896	71.500	0,62	73.600	0,58	0,60
8.	Nanggalo	52.674	58.000	1,62	64.300	2,08	1,83
9.	Kuranji	99.292	121.500	3,42	146.800	3,86	3,62
10.	Pauh	42.188	50.000	2,87	57.900	2,98	2,92
11.	Koto Tengah	124.181	148.000	2,97	174.800	3,38	3,16
TOTAL		734.421	820.000	1,85	915.000	2,22	2,02

Sumber : Dinas Kimpraswil Kota Padang, 2006

3.2.3 Agama

Hampir 95% penduduk Kota Padang memeluk Agama Islam (Bappeda Kota Padang, 2006). Penduduk dengan agama lain merupakan pendatang dan sekelompok etnis China yang bermukim di Kawasan kampung Cina di Kecamatan Padang Selatan. Kalau ada seorang Minangkabau yang tidak menganut agama Islam, maka hal itu adalah suatu keganjilan yang mengherankan. Mereka boleh dikatakan tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lain kecuali apa yang diajarkan oleh Islam, mereka hanya percaya kepada Tuhan sebagai yang diajarkan Islam (Koentjaraningrat, 1995:261).

3.3 Pengelolaan Dana Zakat di Kota Padang

3.3.1 Program pengentasan Kemiskinan

Angka kemiskinan Kota Padang pada tahun 2005 adalah 190.495 jiwa atau lebih kurang 38.099 Rumah Tangga Miskin. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 20% penduduk Kota Padang adalah

masyarakat miskin. Ini merupakan perhitungan dari jumlah penduduk sebesar 801.344 jiwa. Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2006 adalah sebesar 6,2 % (Bappeda Kota Padang, 2006).

Melihat masih banyak warga Kota Padang yang hidup dalam kemiskinan, pemerintah Kota Padang berupaya mengumpulkan zakat dari Pegawai Negeri Sipil golongan III dan IV. Pengumpulan zakat dilakukan melalui Badan Amil Zakat setempat secara kolektif dan sukarela.

Sebagai perbandingan, dari zakat sebesar dua setengah persen yang dikumpulkan dari gaji Pegawai Negeri Sipil ini terkumpul dana yang cukup besar. Dalam perkembangan pengelolaannya, tahun 2006 jumlah zakat yang dikumpulkan BAZ Kota Padang berjumlah Rp. 70 Juta. Tahun 2007 berjumlah Rp. 1,4 Miliar dan tahun 2008 sejumlah Rp. 2,4 Miliar. Data terakhir, pada Agustus 2009 sudah terkumpul dana zakat dari warga Kota Padang sejumlah Rp. 6,6 miliar. Diperkirakan potensi zakat tahun 2009 ini mencapai Rp. 12 Miliar. Jumlah itu baru perhitungan dari zakat PNS Pemko Padang yang berjumlah 15 ribu orang.

Dalam pengelolaan pendistribusian dana zakat ini, Pemerintah Kota Padang mendistribusikan dana zakat tersebut kepada empat program pengentasan kemiskinan;

1. Padang Cerdas

Program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan beasiswa pendidikan kepada anak-anak sekolah berprestasi yang orangtuanya tergolong kepada masyarakat miskin.

2. Padang Sehat

Program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan pengobatan gratis dan transportasi pengobatan. Setiap puskesmas dan puskesmas pembantu memberikan layanan pengobatan gratis kepada seluruh masyarakat yang memiliki Kartu Miskin, kemudian masing-masing pasien memperoleh

bantuan biaya transportasi untuk pulang dari puskesmas kembali ke rumah.

3. Padang Makmur

Program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan perbaikan rumah (**bedah rumah**), dimana dalam kegiatan tahun 2008 sebanyak 11 unit rumah tidak layak huni yang diseleksi dengan prosedur tertentu diberi bantuan perbaikan secara merata sebesar Rp. 10 Juta.

4. Padang Sejahtera

Program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha bagi unit-unit usaha rumah tangga miskin dengan beberapa prosedur tertentu yang dengan mudah dapat diakses oleh setiap masyarakat miskin di Kota Padang.

3.3.2 Kegiatan Bedah Rumah Dana Zakat di Kota Padang

Pengelolaan dana zakat di Kota Padang sudah dimulai sejak tahun 2006 lalu. Pemerintah Kota Padang melalui perangkat Kelurahan, LPM dan RT melakukan pendataan masyarakat miskin yang berhak memperoleh zakat dimasing-masing wilayah mereka. Pada awalnya kegiatan bedah rumah dari dana zakat tahun 2006 ini dilaksanakan pada tahun 2007 berupa kegiatan peningkatan kualitas rumah sebanyak 10 unit rumah masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk kabung. Masing-masing rumah tersebut memperoleh dana bantuan sebesar Rp. 6 Juta.

Kemudian dana zakat tahun 2007 digunakan untuk kegiatan bedah rumah tahun 2008, dimana sebanyak 11 unit rumah tidak layak huni diberi bantuan perbaikan sebesar Rp. 10 Juta. Bentuk manfaat dari dana bantuan ini beragam sesuai dengan kondisi awal rumah masyarakat penerima zakat. Peningkatan kualitas rumah dipandang secara spesifik

dari komponen dasar bangunan, karena secara keseluruhan bantuan sebesar Rp. 10 Juta dianggap tidak mungkin untuk meningkatkan kualitas rumah secara keseluruhan. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk peningkatan komponen dasar bangunan saja, misalnya perbaikan lantai saja, atau dinding saja, atau pembangunan jamban baru, pemasangan instalasi air bersih dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, diharapkan ada pembiayaan tambahan dari pihak Kecamatan dan donatur masyarakat.

Berikut ini data jumlah penerima dana zakat untuk kegiatan bedah rumah;

**TABEL III.5
PENERIMA KEGIATAN BEDAH RUMAH TAHUN 2008**

No.	KECAMATAN	Jumlah Unit Rumah Penerima Kegiatan
1.	Bungus Teluk kabung	1
2.	Lubuk Kilangan	1
3.	Lubuk Begalung	1
4.	Padang Selatan	1
5.	Padang Timur	1
6.	Padang Barat	1
7.	Padang Utara	1
8.	Nanggalo	1
9.	Kuranji	1
10.	Pauh	1
11.	Koto Tengah	1
TOTAL		11

Sumber : BAZ Kota Padang, 2008

Dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah, uang tunai sebesar Rp. 10 Juta digunakan untuk pembelian bahan bangunan. Jadwal pelaksanaan kegiatan beragam antara 1 (satu) hingga 5 (lima) minggu kerja tergantung bentuk pemanfaatan dalam peningkatan kualitas komponen rumah tersebut. Untuk bantuan teknis, proses pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong antara pemilik rumah, pihak pemerintah kota dan warga sekitar didampingi oleh tim teknis dari masing-masing kecamatan di Kota Padang.

3.3.3 Kegiatan Bedah Rumah Lainnya di Kota Padang

Bedah Rumah Dana Manunggal Sakato

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan berupa kegiatan bedah rumah yang menggunakan dana APBD Kota Padang. Pada tahun 2008, dianggarkan dana sebesar 780 Juta Rupiah ini untuk bedah rumah pada 104 unit rumah tidak layak huni, dimana masing-masing rumah memperoleh bantuan sebesar 7,5 Juta Rupiah.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPM-PK (Badan pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan) bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumbar dan TNI, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya panitia berasal dari Lurah, LPM. Pelaksanaan bedah rumah dilaksanakan selama 15 hari, dimana seluruh dana bantuan dibelikan untuk bahan bangunan, sedangkan untuk tenaga kerja dari TNI. Manfaatnya berkisar ± 15 Juta Rupiah pada masing-masing rumah.

Bedah Rumah Lembaga lainnya

Terdapat beberapa kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan secara *ceremonial* di Kota Padang. Pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan tanpa dijadualkan secara rutin setiap tahun. Pada tahun 2008, dilaksanakan tiga kegiatan bedah rumah yang diselenggarakan masing-masing oleh Universitas Bung Hatta, Bank Tabungan Negara (BTN) bekerjasama dengan Real Estate Indonesia (REI), dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS).

Universitas Bung Hatta menganggarkan dana sebesar Rp. 30 Juta untuk membedah 5 (lima) unit rumah tidak layak huni di Kota Padang. BTN dan REI menganggarkan dana sebesar Rp. 60 Juta untuk membedah 3 (tiga) unit rumah, dan BKKKS menganggarkan dana sebesar Rp. 48 Juta untuk membedah 1 (satu) unit rumah tidak layak huni. Pelaksanaan konstruksi diselenggarakan beragam antara 1 s/d 5 minggu. Khusus untuk

kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan oleh UBH dan kerjasama BTN-REI, Pemerintah Kota Padang turut berpartisipasi dalam bentuk bantuan jaringan listrik dan air bersih pada masing-masing rumah penerima kegiatan bedah rumah.

Untuk perbandingan beberapa kegiatan bedah rumah diatas, dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL III.6
KEGIATAN-KEGIATAN BEDAH RUMAH DI KOTA PADANG

Tahun 2008	Dana Zakat	Dana Manunggal Sakato	25 Tahun UBH	BTN-REI	BKKKS
Sumber Dana	Dana Amil Zakat	APBD Kota Padang	UBH	BTN + Sponsor (REI)	BKKKS
Jumlah Dana	165 Juta	780 Juta	30 Juta	60 Juta	48 Juta
Jumlah Penerima	11	104	5	3	1
Jumlah Dana	15 Juta	7,5 Juta	6 Juta	20 Juta	48 juta
Instansi Pelaksana	BAZ Kota padang	BPM-PK dan TNI	UBH	BTN + REI	Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS)
Panitia Seleksi	Kecamatan, BAZ Kecamatan	Lurah, LPM	Panitia Lustrum	BTN-REI	BKKKS
Jenis Penganggaran	Rutin Tahunan	Rutin Tahunan	Ceremonial	Ceremonial	Ceremonial
Lama Pelaksanaan	1-3 minggu	15 hari	15 hari	10 hari	3 minggu
Tambahan	Zakat Kecamatan + Sumbangan Masyarakat	Tenaga dari TNI	Bantuan jaringan listrik dan air bersih dari Pemko	Bantuan jaringan listrik dan air bersih dari Pemko	-
Tenaga Kerja	Tukang + Pekerja Upahan	TNI	Tukang + Pekerja Upahan	Tukang + Pekerja Upahan	Tukang + Pekerja Upahan
Manfaat	± 30 s/d 45 Juta	± 15 Juta	± 10 Juta	± 24 Juta	48 Juta

Sumber : Peneliti, 2009

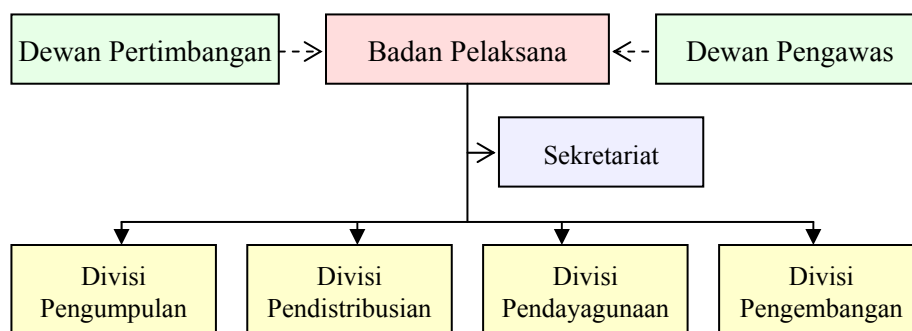
BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Program Pengelolaan Zakat dan Mekanisme Kegiatan Bedah Rumah di Wilayah Studi.

4.1.1 Pengelolaan Zakat di Kota Padang

Dalam UU RI Nomor 38/1999 Pasal 6 (1) disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sebelumnya dalam Pasal 1 (2) disebutkan bahwa pengelolaan zakat tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat di Kota Padang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor. 43 tahun 2006 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Masa bakti 2006 s/d 2011. Adapun struktur kelembagaan Badan Amil Zakat Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini;



Sumber : Badan Amil Zakat Kota Padang, 2009

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT KOTA PADANG 2006 s/d 2011

Dalam struktur kelembagaan BAZ Kota Padang ini dibentuk dua dewan penasehat terhadap Badan Pelaksana berupa Dewan Pertimbangan yang terdiri dari unsur pemerintahan bersama unsur Musyawarat Pimpinan Daerah Kota Padang, dan Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintahan bersama MUI, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 38/1999 diatas, Badan Pelaksana dalam Struktur Kelembagaan Badan Amil Zakat Kota Padang dibagi dalam Divisi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kemudian untuk fungsi sektor pengembangan program, ditambah lagi satu divisi pendukung yang dinamakan Divisi Pengembangan.

4.1.1.1 Pengumpulan Zakat

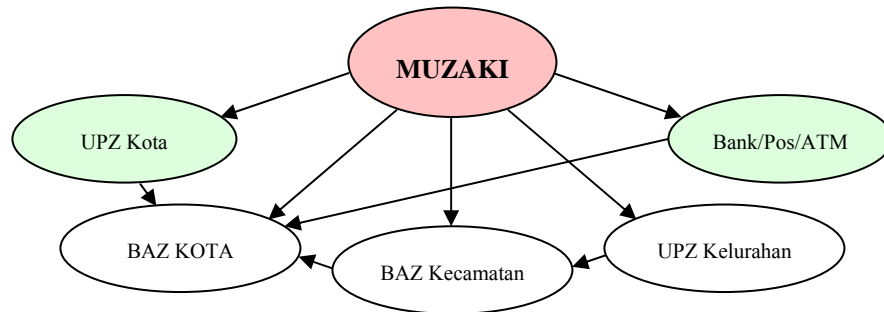
Dalam riwayat usaha pengumpulan zakat oleh BAZ Kota Padang, tahun 2006 jumlah zakat yang dikumpulkan berjumlah Rp. 70 Juta. Tahun 2007 pengumpulan zakat ini meningkat menjadi Rp. 1,4 Miliar dan tahun 2008 sejumlah Rp. 2,4 Miliar. Data terakhir, pada Agustus 2009 sudah terkumpul dana zakat dari warga Kota Padang sejumlah Rp. 6,6 miliar. Diperkirakan potensi zakat tahun 2009 ini mencapai Rp. 12 Miliar. Jumlah itu baru perhitungan dari zakat PNS Pemko Padang yang berjumlah 15 ribu orang.

**TABEL IV.1
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT BAZ KOTA PADANG**

Tahun	Nominal Zakat Terhimpun (Rupiah)
2006	70.000.000
2007	1.400.000.000
2008	2.400.000.000
2009	12.000.000.000

Sumber : Badan Amil Zakat Kota Padang, 2009

Adapun mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini ;



Sumber : Badan Amil Zakat Kota Padang, 2009

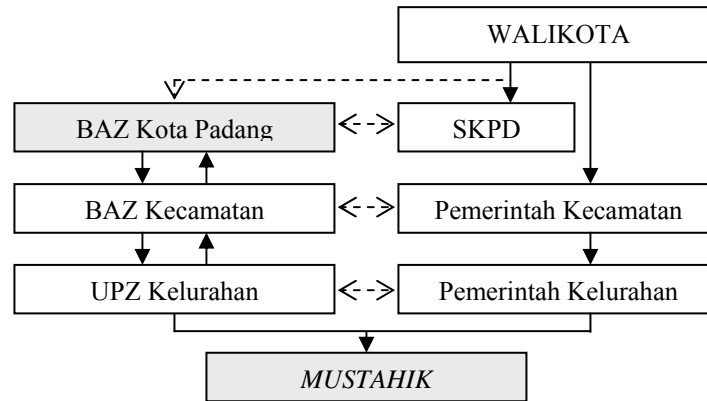
GAMBAR 4.2
MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT KOTA PADANG

Pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa *muzaki* (masyarakat pembayar zakat) dapat membayarkan zakatnya langsung melalui Bank/Kantor Pos/ATM, atau melalui Unit Pengelola Zakat yang ada di setiap Kelurahan, atau melalui Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan dan Kota. Selanjutnya dana zakat tersebut akan disetorkan kepada BAZ Kota Padang. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV, zakat mereka secara otomatis sudah dipungut oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kota melalui rekening Bank Pembangunan Daerah dari pembayaran gaji PNS setiap bulannya.

4.1.1.2 Pendistribusian Zakat

Sebagai langkah awal kegiatan pendistribusian dana zakat, Badan Amil Zakat Kota Padang melalui perangkat Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kelurahan melakukan pendataan masyarakat miskin yang berhak memperoleh zakat di masing-masing wilayah mereka. (Situs Resmi Pemerintah Kota Padang)

Adapun mekanisme penyerahan dana zakat dapat dilihat pada Gambar 4.3 dibawah ini;



Sumber : Badan Amil Zakat Kota Padang, 2009

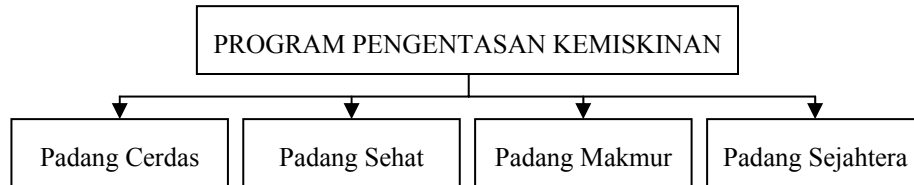
GAMBAR 4.3
MEKANISME PENYERAHAN DANA ZAKAT
DALAM POSISI BADAN AMIL ZAKAT TERHADAP
STRUKTUR PEMERINTAH KOTA PADANG

Dalam pendistribusian dana zakat, pihak Badan Amil Zakat Kota Padang memberi perintah kepada masing-masing pengelola BAZ di masing-masing Kecamatan untuk memilih *mustahik* sebagai penerima zakat. Selanjutnya BAZ Kecamatan bekerjasama dengan Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kelurahan mengadakan penyeleksian terhadap beberapa masyarakat miskin yang berada di wilayah mereka.

4.1.1.3 Pendayagunaan Zakat

Dana zakat yang dihimpun oleh BAZ Kota Padang di distribusikan ke dalam empat program pengentasan kemiskinan, meliputi Program Padang Cerdas, yakni bantuan beasiswa pendidikan untuk anak-anak sekolah berprestasi yang orang tua mereka termasuk kedalam kelompok masyarakat miskin, Program Padang Sehat yakni bantuan

pengobatan gratis serta bantuan uang transportasi pengobatan sebesar Rp. 2000 untuk setiap masyarakat miskin yang datang berobat ke puskesmas. Program Padang Makmur adalah bantuan perbaikan rumah (bedah rumah) untuk rumah tidak layak huni yang dihuni oleh masyarakat miskin, dan Program Padang Sejahtera berupa bantuan modal usaha bagi usaha kecil masyarakat.



Sumber : Badan Amil Zakat Kota Padang, 2009

GAMBAR 4.4 **PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN** **BADAN AMIL ZAKAT KOTA PADANG**

Program-program diatas merupakan empat pokok pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Padang. Pendayagunaan zakat didasarkan kepada jumlah harta zakat yang terkumpul. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing *mustahik* tidak menerima zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan *mustahik* mana saja yang lebih berhak daripada yang lain. (Kurnia, 2008:160)

Berdasarkan kaidah diatas Pemerintah Kota Padang memprioritaskan pendayagunaan zakat bagi pendidikan anak-anak sekolah miskin yang berprestasi, biaya pengobatan masyarakat miskin di puskesmas, bedah rumah untuk rumah tidak layak huni yang dihuni oleh masyarakat miskin, dan bantuan modal usaha bagi usaha kecil masyarakat. Syarat utama pemilihan *mustahik* adalah masyarakat yang tergolong kepada delapan *ashnaf*, yakni delapan kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat.

4.1.2 Mekanisme Kegiatan Bedah Rumah Melalui Dana Amil Zakat Kota Padang

Kegiatan bedah rumah dilaksanakan pada masing-masing satu *mustahik* di setiap kecamatan. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor. 46 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang, penyelenggaraan kegiatan bedah rumah diserahkan sepenuhnya kepada Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan. Kegiatan pendistribusian diawali dengan pengajuan nama *mustahik* calon penerima kegiatan bedah rumah oleh Unit Pengelola Zakat di Kelurahan. Kemudian tim survei dari BAZ Kecamatan melakukan seleksi pemilihan *mustahik* terhadap masing-masing calon di setiap kelurahan tersebut.


Setelah *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah ditetapkan, pihak BAZ Kecamatan menyelenggarakan kegiatan bedah rumah dengan memanfaatkan biaya dari dana amil zakat Kota Padang. Adapun penganggaran dana bedah rumah dari dana amil zakat Kota Padang setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut:

TABEL IV.2
PENGANGGARAN DANA BEDAH RUMAH TAHUNAN
BADAN AMIL ZAKAT KOTA PADANG

Tahun	Nominal Zakat Terhimpun (Rupiah)	Alokasi Anggaran Untuk Keg. Bedah Rumah (Rupiah)	Persentase Anggaran Keg. Bedah Rumah Terhadap Nominal Zakat Terhimpun (%)	Penerima Kegiatan Bedah Rumah (Unit)	Nominal Bantuan Per-Rumah <i>Mustahik</i> (Rupiah)	Keterangan
2007	1.400.000.000	110.000.000	7,9	11	10.000.000	Dilaksanakan Tahun 2008
2008	2.400.000.000	165.000.000	11,8	11	15.000.000	Dalam Pelaksanaan (Tahun 2009)
2009*	12.000.000.000	1.560.000.000	13,0	104	15.000.000	Dilaksanakan Tahun 2010

Sumber : BAZ Kota Padang

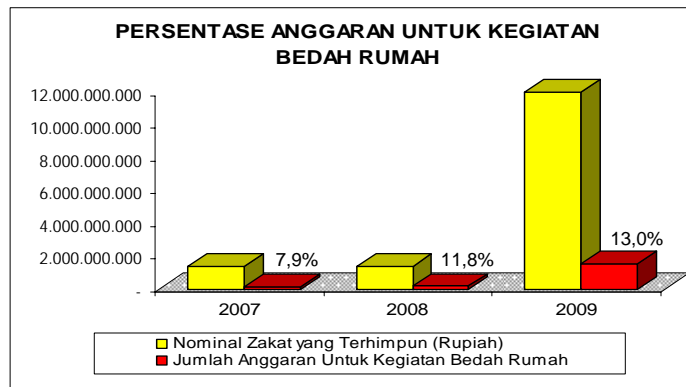
Keterangan :

 Kegiatan yang diteliti

Dari tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan bedah rumah di Kota Padang yang dibiayai dengan dana amil zakat dimulai pada

tahun 2008 dengan memanfaatkan dana zakat yang dihimpun pada tahun 2007. Dana zakat yang dihimpun pada tahun 2008 didistribusikan untuk kegiatan bedah rumah tahun 2009. Demikian seterusnya dana zakat yang terhimpun di tahun 2009 didistribusikan pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 tersebut, direncanakan pelaksanaan kegiatan rumah pada 104 *mustahik* yang tersebar di 104 kelurahan di Kota Padang. Pada fase ini kegiatan bedah rumah terhadap masing-masing *mustahik* akan diselenggarakan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) di masing-masing kelurahan. Namun rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh pihak pengambil kebijakan.



Sumber : Analisis Peneliti, 2009

GAMBAR 4.5
PERSENTASE ANGGARAN KEGIATAN BEDAH RUMAH
TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA AMIL ZAKAT
KOTA PADANG TAHUN 2007 s/d 2009

Gambar diatas menunjukkan persentase anggaran kegiatan bedah rumah terhadap penghimpunan dana zakat Kota Padang setiap tahunnya. Tahun 2007, alokasi anggaran untuk kegiatan bedah rumah sebesar 7,9% dari total zakat yang terhimpun. Seiring peningkatan penghimpunan dana zakat, pengalokasian anggaran untuk kegiatan bedah rumah juga meningkat sebesar masing-masing 11,8% dan 13,0% terhadap dana zakat yang terhimpun tahun 2008 dan 2009.

4.1.2.1 Jumlah Nominal Bantuan

Dalam Surat Keputusan Walikota Nomor. 46 tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang, disebutkan bahwa dana sebesar Rp. 10 Juta yang dialokasikan terhadap masing-masing *mustahik* penerima kegiatan tersebut merupakan dana stimulan yang diharapkan dapat merangsang masyarakat sekitar untuk turut membantu dalam bentuk materi maupun tenaga.

Pihak BAZ Kecamatan selaku penyelenggara kegiatan diharapkan dapat mendorong terhimpunnya biaya tambahan lainnya dari masyarakat sekitar, pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan serta jemaah mesjid di lokasi *mustahik* berada. Berikut tabel jumlah nominal bantuan yang diterima oleh masing-masing *mustahik*;

TABEL IV.3
JUMLAH NOMINAL BANTUAN PADA MASING-MASING
MUSTAHIK PENERIMA KEGIATAN BEDAH RUMAH

No	MUSTAHIK	KOMPONEN BANTUAN				Jumlah Nominal Bantuan	SWADAYA MUSTAHIK		Jumlah Nominal Swadaya	JUMLAH TOTAL
		BAZ Kota Padang	Bantuan Pemerintah Kec./Kel.	Bantuan masyarakat Sekitar	Bantuan Jemaah masjid		Uang / Material	Tenaga		
1.	Nurmis	10.000.000 (44,04%)	1.000.000 (4,40%)	6.000.000 (26,43%)	2.000.000 (8,81%)	19.000.000 (83,68%)	1.500.000 (6,61%)	2.205.000 (9,71%)	3.705.000 (16,32%)	22.705.000 (100%)
2.	Novriandi	10.000.000 (49,75%)	1.000.000 (4,98%)	4.000.000 (19,90%)	1.000.000 (4,98%)	16.000.000 (79,60%)	2.000.000 (9,95%)	2.100.000 (10,45%)	4.100.000 (20,40%)	20.100.000 (100%)
3.	Ilyas	10.000.000 (62,62%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1.000.000 (6,26%)	11.000.000 (68,88%)	3.500.000 (21,92%)	1.470.000 (9,20%)	4.970.000 (31,12%)	15.970.000 (100%)
4.	Azizah	10.000.000 (62,21%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	10.000.000 (62,21%)	4.500.000 (27,99%)	1.575.000 (9,80%)	6.075.000 (37,79%)	16.075.000 (100%)
5.	Mukhni	10.000.000 (43,57%)	3.000.000 (13,07%)	6.000.000 (26,14%)	1.000.000 (4,36%)	20.000.000 (87,15%)	500.000 (2,18%)	2.450.000 (10,68%)	2.950.000 (12,85%)	22.950.000 (100%)
6.	Mukhtar	10.000.000 (46,30%)	2.000.000 (9,26%)	4.000.000 (18,52%)	2.000.000 (9,26%)	18.000.000 (83,33%)	1.500.000 (6,94%)	2.100.000 (9,72%)	3.600.000 (16,67%)	21.600.000 (100%)
7.	Syamsuir	10.000.000 (31,06%)	9.000.000 (27,95%)	4.000.000 (12,42%)	2.000.000 (6,21%)	25.000.000 (77,64%)	3.000.000 (9,32%)	4.200.000 (13,04%)	7.200.000 (22,36%)	32.200.000 (100%)
8.	Sukamto	10.000.000 (54,23%)	2.000.000 (10,85%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	12.000.000 (65,08%)	3.500.000 (18,98%)	2.940.000 (15,94%)	6.440.000 (34,92%)	18.440.000 (100%)
9.	Rusdi	10.000.000 (31,08%)	3.000.000 (9,32%)	12.000.000 (37,30%)	2.000.000 (6,22%)	27.000.000 (83,92%)	1.500.000 (4,66%)	3.675.000 (11,42%)	5.175.000 (16,08%)	32.175.000 (100%)
10.	Aminah	10.000.000 (36,80%)	3.000.000 (11,04%)	8.000.000 (29,44%)	2.000.000 (7,36%)	23.000.000 (84,64%)	500.000 (1,84%)	3.675.000 (13,52%)	4.175.000 (15,36%)	27.175.000 (100%)
11.	Sarbaini	10.000.000 (34,31%)	3.000.000 (10,29%)	9.000.000 (30,87%)	2.000.000 (6,86%)	24.000.000 (82,33%)	2.000.000 (6,86%)	3.150.000 (10,81%)	5.150.000 (17,67%)	29.150.000 (100%)
Rata-Rata Persentase		45,09%	9,20%	18,27%	5,48%	78,04%	10,66%	11,30%	21,96%	100,00%

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase

Dari penghimpunan biaya tambahan, masing-masing *mustahik* dapat memperoleh bantuan beragam mulai dari Rp. 10 Juta sampai dengan Rp. 27 Juta atau dalam persentase 62,21% s/d 87,15% terhadap jumlah total biaya pelaksanaan bedah rumah. Disamping itu masing-masing *mustahik* juga menyediakan sumber daya swadaya dalam bentuk uang dan tenaga dengan jumlah nominal bervariasi antara Rp.2.950.000 s/d Rp.7.200.000 atau dalam persentase 12,85% s/d 37,79% terhadap jumlah total biaya pelaksanaan bedah rumah.

Dilihat dari dana zakat sebagai sumber pembiayaan peningkatan kualitas rumah, bantuan sebesar Rp.10 Juta untuk masing-masing *mustahik* menempati persentase antara 31,06% s/d 62,62% terhadap jumlah total biaya pelaksanaan bedah rumah. Data ini menunjukkan bahwa bantuan pembiayaan yang bersumber dari dana zakat untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin di Kota Padang memiliki peran rata-rata sebesar 45,09% terhadap jumlah total biaya pelaksanaan bedah rumah dengan nilai terendah 31,06% dan nilai tertinggi sebesar 62,62%.

4.1.2.2 Frekuensi Bantuan

Masing-masing *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tidak dibatasi untuk memperoleh hanya satu kali bantuan untuk peningkatan kualitas rumah mereka. Akan tetapi dalam seleksi penerima kegiatan, sangat kecil kemungkinan *mustahik* tersebut dapat memperoleh kembali bantuan pada tahun berikutnya. Seleksi *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah ini ditentukan oleh tingkat kemiskinan dan kondisi rendahnya kualitas rumah *mustahik* sesuai dengan indikator kemiskinan versi BPS yang berlaku di Kota Padang.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor. 46 tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang, penyelenggaraan kegiatan bedah rumah diawali dengan pengajuan nama

mustahik calon penerima kegiatan bedah rumah oleh masing-masing Unit Pengelola Zakat (UPZ) di tingkat kelurahan. *Mustahik* yang telah memperoleh bantuan sebelumnya dapat diajukan lagi dalam calon penerima kegiatan bedah rumah berikutnya, namun sedikit kemungkinan untuk dapat lolos dalam seleksi pemilihan *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah oleh tim survei dari BAZ tingkat kecamatan.

4.2 Analisis Karakteristik Masyarakat Penerima Zakat Dalam Kegiatan Bedah Rumah.

Analisis ini mencakup kondisi sosial ekonomi dan kondisi rumah *mustahik* berdasarkan indikator kemiskinan versi BPS di Kota Padang.

4.2.1 Pendidikan

Sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarakan terhadap 11 *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008, dapat disajikan tabel tingkat pendidikan kepala keluarga *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008;

**TABEL IV.4
TINGKAT PENDIDIKAN *MUSTAHIK***

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	Frekuensi	%
1.	Tidak Sekolah/Tidak tamat SD	3	27,27%
2.	SD	2	18,18%
3.	SMP	4	36,36%
4.	SMA	1	9,09%
5.	Perguruan Tinggi	1	9,09%
	Jumlah	11	100%

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar *mustahik* memiliki tingkat pendidikan setingkat SMP dan tidak sekolah dengan persentase 36,36% dan 27,27%. Untuk indikator kemiskinan menurut tingkat pendidikan, Kota Padang melalui indikator kemiskinan versi BPS

menetapkan bahwa masyarakat tidak berpendidikan atau tamatan SD termasuk golongan masyarakat miskin. Data diatas menunjukkan bahwa sebesar 5 dari 11 *mustahik* atau sebesar 45,45% merupakan *mustahik* yang tergolong masyarakat miskin.

4.2.2 Pekerjaan

Sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarakan terhadap 11 *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008, berikut tabel tingkat pendidikan *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008;

**TABEL IV.5
PEKERJAAN MUSTAHIK**

No.	PEKERJAAN	Frekuensi	%
1.	Pedagang	2	18,18%
2.	Sopir	1	9,09%
3.	Buruh Bangunan	4	36,36%
4.	Guru Honoror	1	9,09%
5.	Guru Mengaji	1	9,09%
7.	Buruh Tani	2	18,18%
Jumlah		11	100%

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa 4 dari 11 *mustahik* atau sebesar 36,36% memiliki pekerjaan sebagai buruh. Masing-masing 2 dari 11 *mustahik* atau sebesar 18,18% bekerja sebagai pedagang dan petani. Ada juga *mustahik* yang bekerja sebagai sipir, guru honoror dan guru mengaji masing-masing 1 dari 11 orang atau sebesar 9,09%.

Indikator kemiskinan versi BPS di Kota Padang menetapkan masyarakat yang memiliki sumber penghasilan sebagai buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dan lain-lain termasuk kedalam golongan masyarakat miskin. Berdasarkan analisis terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh masing-masing *mustahik* dengan jenis pekerjaan beragam, berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa 100% *mustahik* merupakan masyarakat yang tergolong miskin.

4.2.3 Pendapatan

Berikut tabel tingkat pendapatan *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008 berdasarkan hasil kuesioner terhadap 11 *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008 di Kota Padang;

TABEL IV.6
PENDAPATAN *MUSTAHIK*

No.	NOMINAL PENDAPATAN	Frekuensi	%
1.	Kurang dari Rp. 600.000,-	1	9,09%
2.	Antara Rp. 600.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	10	90,91%
3.	Antara Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 1.500.000,-	0	0,00%
4.	Antara Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-	0	0,00%
5.	Lebih dari Rp. 2.000.001,-	0	0,00%
Jumlah		11	100%

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa 10 dari 11 *mustahik* atau sebesar 90,91% memiliki pendapatan antara Rp.600.000,- s/d Rp.1.000.000,-. Data ini menunjukkan bahwa semua *mustahik* memiliki pendapatan dibawah UMR (Upah Minimum Regional) Kota Padang sebesar Rp.1.000.000,-.

Ada juga *mustahik* yang memiliki pendapatan kurang dari Rp.600.000,- sebanyak 1 orang (9,09%). Angka ini merupakan ambang batas pendapatan berdasarkan indikator kemiskinan versi BPS di Kota Padang. Data tersebut menunjukkan bahwa 9,09% *mustahik* termasuk golongan masyarakat miskin di Kota Padang.

Ditinjau dari pengertian kemiskinan secara syar'i yang menyebutkan bahwa masyarakat miskin adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, berdasarkan data pengeluaran *mustahik* setiap bulannya yang melebihi angka pendapatan mereka per bulan, dapat dikategorikan bahwa 100% *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah di Kota Padang termasuk golongan masyarakat miskin.

4.2.4 Kepemilikan Barang

Sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarkan terhadap 11 (sebelas) *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008, dapat disajikan tabel jumlah tabungan diatas Rp.500.000,- dan kepemilikan barang seharga lebih dari Rp.500.000,- yang dimiliki oleh masing-masing *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008 di Kota Padang;

TABEL IV.7
TABUNGAN DAN KEPEMILIKAN BARANG

No.	BARANG SENILAI >Rp.500.000	Frekuensi	%
1.	Tabungan >Rp.500.000,-	0	0,00%
2.	Ternak Kerbau	0	0,00%
3.	Ternak Sapi	0	0,00%
4.	Ternak Kambing	1	9,09%
5.	Sepeda Motor	0	0,00%
6.	Televisi	2	18,18%
7.	Tidak Ada	8	72,72%
	Jumlah	11	100%

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa 1 dari 11 *mustahik* atau sebesar 90,91% memiliki harta berupa ternak kambing dan 2 dari 11 *mustahik* atau sebesar 18,18% memiliki media elektronik televisi. Tidak ada *mustahik* yang memiliki tabungan diatas Rp.500.000,- dan *mustahik* yang memiliki ternak kerbau, sapi dan sepeda motor. Data ini menunjukkan bahwa 72,72% *mustahik* tidak memiliki tabungan dan harta benda diatas Rp.500.000,-.

Berdasarkan indikator kemiskinan versi BPS di Kota Padang yang menyebutkan bahwa masyarakat miskin adalah orang yang tidak memiliki tabungan dan harta benda diatas Rp.500.000,-, dapat disimpulkan bahwa 8 dari 11 *mustahik* atau sebesar 72,72% *mustahik* termasuk kedalam golongan masyarakat miskin.

4.2.5 Bahan Bakar Memasak

Sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarakan terhadap 11 *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008, dapat disajikan tabel bahan bakar yang digunakan *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah tahun 2008;

TABEL IV.8
BAHAN BAKAR MEMASAK *MUSTAHIK*

No.	BAHAN BAKAR MEMASAK	Frekuensi	%
1.	Gas	0	0,00%
2.	Minyak Tanah	3	27,27%
3.	Arang	0	0,00%
4.	Kayu Api	8	72,72%
	Jumlah	11	100

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa 3 dari 11 *mustahik* atau sebesar 27,27% *mustahik* menggunakan minyak tanah untuk memasak makanan sehari-hari. Frekuensi terbesar terlihat pada *mustahik* yang memiliki kayu api sebagai bahan bakar memasak, yakni 8 dari 11 *mustahik* atau sebesar 72,72%. Tidak ada *mustahik* yang menggunakan bahan bakar gas dan arang untuk memasak makanan sehari-hari.

Berdasarkan indikator kemiskinan versi BPS yang menyebutkan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang menggunakan bahan bakar memasak berupa kayu bakar, arang atau minyak tanah, dapat disimpulkan bahwa 100% *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah di Kota Padang merupakan masyarakat yang tergolong miskin.

4.2.6 Kondisi Rumah Sebelum Kegiatan Bedah Rumah

Sesuai dengan indikator kemiskinan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang, masyarakat miskin dapat diidentifikasi melalui indikator kondisi material komponen rumah, kepemilikan fasilitas jamban serta akses listrik dan air bersih.

Adapun kondisi rumah masing-masing *mustahik* sebelum pelaksanaan bedah rumah dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL IV.9
KONDISI RUMAH SEBELUM DIBEDAH BERDASARKAN
INDIKATOR KEMISKINAN DI KOTA PADANG

No.	Komponen Rumah	MUSTAHIK										
		Nurmis	Novriadi	Ilyas	Azizah	Mukhni	Mukhtar	Syamsuir	Sukanto	Rusdi	Aminah	Sarbaini
1.	Material Lantai	Tanah	Rabat Beton	Kayu/Papan	Kayu/Papan	Kayu/Papan	Tanah	Tanah	Rabat Beton	Tanah	Tanah	Kayu/Papan
2.	Material Dinding	Kayu/Papan	Kayu/Papan	Kayu/Papan	Anyam Bambu	Kayu/Papan	Kayu/Papan	Kayu/Papan	Kayu/Papan	Kayu/Papan	Kayu/Papan	Kayu/Papan
3.	Kepemilikan Fas. Jamban	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
4.	Akses Listrik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Akses Air Bersih	Tidak Ada	Sumur Galian	Sumur Galian	Sumur Galian	Sumur Galian	PDAM	PDAM	Sumur Galian	Tidak Ada	Sumur Galian	Sumur Galian

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rumah dengan material lantai tanah, anyaman bambu atau kayu murahan, dinding dengan material bambu, rumbia, kayu kualitas rendah, atau tembok tanpa plesteran, tidak memiliki fasilitas jamban, akses listrik dan air bersih.

4.3 Analisis Persepsi Masyarakat Penerima Zakat Terhadap Bantuan Pembiayaan Yang Diterima

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui peranan zakat ditinjau dari persepsi *mustahik* terhadap bantuan. Analisis ini meliputi persepsi terhadap jumlah nominal dan frekuensi pemberian bantuan bedah rumah.

4.3.1 Persepsi Terhadap Jumlah Nominal Bantuan

Tabel berikut merupakan hasil wawancara penelitian terhadap 11 *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah terkait persepsi mereka terhadap jumlah nominal bantuan yang diterima;

TABEL IV.10
PERSEPSI *MUSTAHIK* TERHADAP
JUMLAH NOMINAL BANTUAN

No.	PERSEPSI <i>MUSTAHIK</i>	FREKUENSI	%
1.	Sangat Puas	0	0,00
2.	Cukup Puas	1	9,09
3.	Kurang Puas	5	45,45
4.	Tidak Puas	2	18,18
5.	Sangat Tidak Puas	3	27,27
	Jumlah	11	100,00

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dilihat dari persepsi *mustahik* terhadap jumlah nominal bantuan dalam kegiatan bedah rumah, 1 dari 11 *mustahik* (9,09%) menyatakan cukup puas. *Mustahik* ini mengungkapkan;

“Kami merasa jumlah nominal bantuan tersebut sudah cukup untuk memperbaiki rumah kami, jika dihitung-hitung, kami merasa tidak akan sanggup untuk mengumpulkan uang sebesar itu..”

Mustahik yang menyatakan kurang puas adalah sebesar 45,45%, persepsi ini adalah yang paling sering muncul yakni 5 dari 11 orang *mustahik*. Kelima *mustahik* ini menyatakan pernyataan serupa;

“Kami merasa jumlah nominal tersebut belum cukup untuk menyelesaikan perbaikan rumah kami”

Dua orang *mustahik* (18,18%) menyatakan tidak puas terhadap jumlah nominal bantuan. Mereka menyatakan;

“Kami merasa jumlah nominal tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan perbaikan rumah, sekarang harga semua jenis barang sangatlah mahal..”

Mustahik yang menyatakan sangat tidak puas terhadap jumlah nominal bantuan berjumlah tiga dari 11 orang (27,27%). Dalam wawancara, mereka mengungkapkan;

“Kami merasa jumlah nominal tersebut sangat sedikit untuk menyelesaikan perbaikan rumah kami”

“Saya sangat bersyukur sudah dibantu oleh pemerintah. Namun jumlah nominal tersebut sangatlah sedikit, bahkan sampai saat ini saya belum sanggup melunasi hutang pembelian batako untuk menambah material pada saat pembangunan”

4.3.2 Persepsi Terhadap Frekuensi Bantuan

Tabel berikut merupakan hasil wawancara penelitian terhadap 11 *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah terkait persepsi mereka terhadap jumlah nominal bantuan yang diterima;

TABEL IV.11
PERSEPSI *MUSTAHIK* TERHADAP
FREKUENSI PEMBERIAN BANTUAN

No.	PERSEPSI <i>MUSTAHIK</i>	FREKUENSI	%
1.	Sangat Puas	0	0,00
2.	Cukup Puas	1	9,09
3.	Kurang Puas	5	45,45
4.	Tidak Puas	3	27,27
5.	Sangat Tidak Puas	2	18,18
	Jumlah	11	100,00

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dilihat dari persepsi *mustahik* terhadap frekuensi pemberian bantuan sebanyak satu kali, 1 dari 11 atau 9,09% dari *mustahik* menyatakan persepsi cukup puas. *Mustahik* ini menyatakan;

“Bagi saya, kondisi rumah seperti ini sudah lebih dari cukup, sudah selesai. Selanjutnya biarkan anak saya beserta suaminya kelak yang akan mengembangkan jika mereka membutuhkan”.

Persepsi yang paling sering muncul adalah yang menyatakan kurang puas, yakni sebesar 45,45% (5 dari 11 orang *mustahik*). Kelima *mustahik* ini menyatakan kurang puas sehingga masih mengharapkan memperoleh kembali bantuan serupa ditahun berikutnya;

“Kami masih merasa kurang puas terhadap bantuan tahun lalu. Jika diperkenankan, kami akan mengajukan permohonan bantuan lagi untuk pemasangan instalasi listrik, air bersih, pengerjaan plafon, plesteran dinding, dan pembangunan kamar mandi..”

Tiga orang *mustahik* (27,27%) menyatakan tidak puas terhadap frekuensi pemberian bantuan yang hanya satu kali. *Mustahik* ini menyatakan;

“...Kami merasa tidak puas, masih ada beberapa komponen rumah kami yang masih belum layak”

“*Saya tidak puas hanya satu kali memperoleh bantuan, anak-anak masih tidur di ruang tengah sehingga membutuhkan kamar tidur lagi..*”

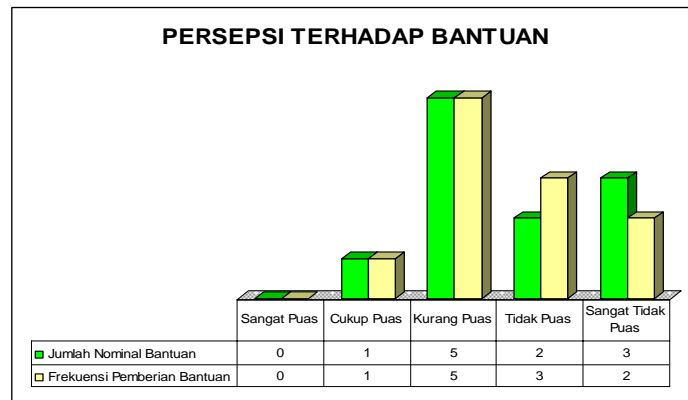
Mustahik yang menyatakan sangat tidak puas terhadap frekuensi pemberian bantuan yang hanya satu kali berjumlah 2 dari 11 orang atau sebesar 18,18%. *Mustahik* ini mengungkapkan;

“*Saya merasa rumah ini belum selesai, tidak ada dinding pembatas ruangan. Gubuk lama yang sudah dibongkar terasa lebih baik..*”

“*Saya merasa sangat tidak puas, karena sangat sedikit komponen rumah saya yang dapat diperbaiki..*”

4.3.3 Rekapitulasi Persepsi Terhadap Bantuan

Persepsi *mustahik* terhadap bantuan diukur dengan menggunakan indikator tingkat kepuasan masing-masing *mustahik* terhadap variabel bantuan, yakni jumlah nominal bantuan yang diterima dan frekuensi pemberian bantuan.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.6
DISTRIBUSI FREKUENSI
PERSEPSI *MUSTAHIK* TERHADAP BANTUAN

Diagram diatas menunjukkan bahwa hanya 1 dari 11 *mustahik* yang menyatakan cukup puas terhadap bantuan. Persepsi terbesar

sebanyak 5 dari 11 *mustahik* menyatakan persepsi kurang puas terhadap bantuan yang diterima. Sisa *mustahik* lainnya menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas terhadap jumlah nominal bantuan sebesar Rp.10 Juta dan frekuensi pemberian bantuan yang hanya satu kali mereka terima.

Data diatas menggambarkan bahwa sebagian besar *mustahik* memiliki persepsi kurang puas terhadap bantuan. Hal ini memberikan makna bahwa keberadaan bantuan pembiayaan perumahan melalui dana zakat ini masih dibutuhkan masyarakat miskin.

4.4 Analisis Perubahan Kualitas Rumah Sesudah Dibedah Berdasarkan Bentuk Pemanfaatan Dana Zakat.

4.4.1 Bentuk Pemanfaatan Pada Masing-Masing Rumah

Tabel bentuk pemanfaatan dana zakat masing-masing *mustahik*;

TABEL IV.12
BENTUK PEMANFAATAN DANA ZAKAT
PADA MASING-MASING RUMAH PENERIMA BEDAH RUMAH

No	MUSTAHIK	KOMPONEN RUMAH										Jumlah Pemanfaatan
		Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
1.	Nurmis	-	V	V	V	V	-	V	-	-	-	5
2.	Novriandi	V	V	V	V	V	-	V	-	-	-	6
3.	Ilyas	V	V	V	V	V	-	V	-	-	-	6
4.	Azizah	-	-	-	V	V	-	-	-	-	-	2
5.	Mukhni	V	V	V	V	V	-	V	-	-	-	6
6.	Mukhtar	V	V	V	V	V	V	V	-	-	-	7
7.	Syamsuir	V	V	V	V	V	-	V	-	-	-	6
8.	Sukamto Yoka	V	V	V	V	V	-	V	-	-	-	6
9.	Rusdi	V	V	V	V	V	-	V	-	-	-	6
10.	Aminah	V	V	V	V	V	-	V	-	-	-	6
11.	Sarbaini	V	V	V	V	V	-	V	-	-	-	6
	JUMLAH	9	10	10	11	11	1	10	0	0	0	62

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Keterangan :

V = Komponen Rumah yang Diperbaiki

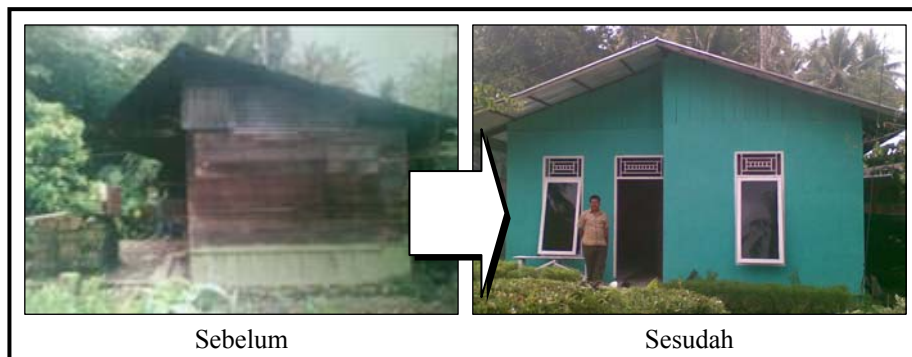
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing rumah penerima kegiatan bedah rumah dapat memperbaiki/membangun 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) komponen rumah mereka. Komponen rumah yang paling banyak dibedah adalah komponen dinding, pintu, dan

jendela, dimana seluruh penerima kegiatan memperbaiki/membangun komponen rumah mereka tersebut.

Pada urutan selanjutnya, masing-masing ditemui satu unit rumah yang tidak memperbaiki komponen struktur, lantai, pintu dan jendela dan plafon. Bentuk pemanfaatan pada masing-masing rumah *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah dapat ditampilkan pada uraian berikut;

1. Nurmis (*Mustahik* Kec. Bungus Teluk Kabung)

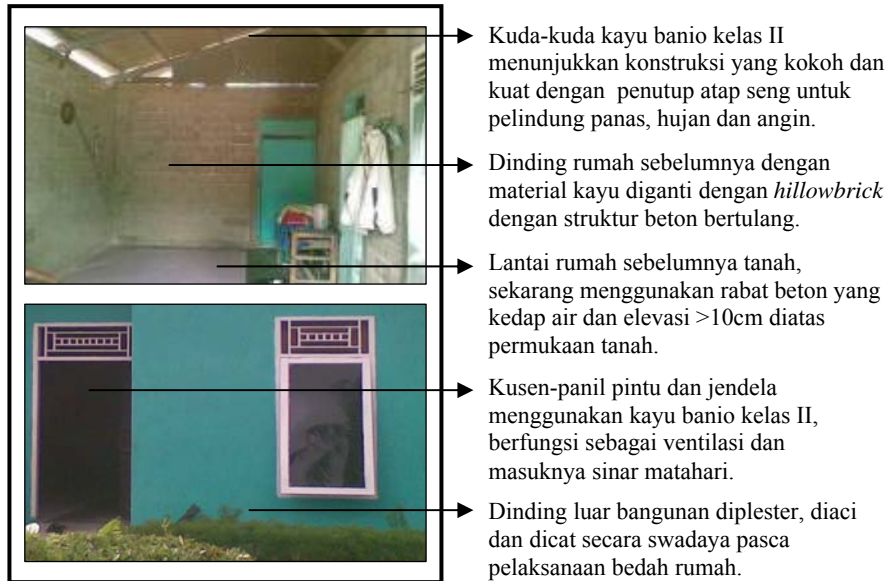
Mustahik bernama Nurmis (53 tahun) yang merupakan seorang janda ini memiliki dua orang anak laki-laki berusia 18 dan 22 tahun. Mereka bermukim di rumah kecil yang terbuat dari kayu dan berlantai tanah. Kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi oleh anak sulungnya yang bekerja sebagai pedagang kaki lima di pasar kota.



Sumber ; BAZ Kota Padang dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.7 FOTO SEBELUM DAN SESUDAH KEGIATAN BEDAH RUMAH NURMIS (*MUSTAHIK* KEC. BUNGUS TLK. KABUNG)

Gambar diatas merupakan foto kondisi rumah Nurmis sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Luas rumah yang sebelumnya hanya 15,50 m² bertambah menjadi 30,50 m². Dalam pelaksanaan kegiatan, rumah Nurmis yang sebelumnya berupa rumah kayu tidak panggung direnovasi menjadi rumah tembok.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.8
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH NURMIS (MUSTAHIK KEC. BUNGUS TLK. KABUNG)

TABEL IV.13
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
NURMIS (MUSTAHIK KEC. BUNGUS TELUK KABUNG)

Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	5,00	3,59	0,00	4,31	2,15	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	22,58
Sesudah	5,00	12,50	12,50	8,75	5,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	61,25
Perubahan Kualitas	0,00	8,91	12,50	4,44	2,85	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	38,67

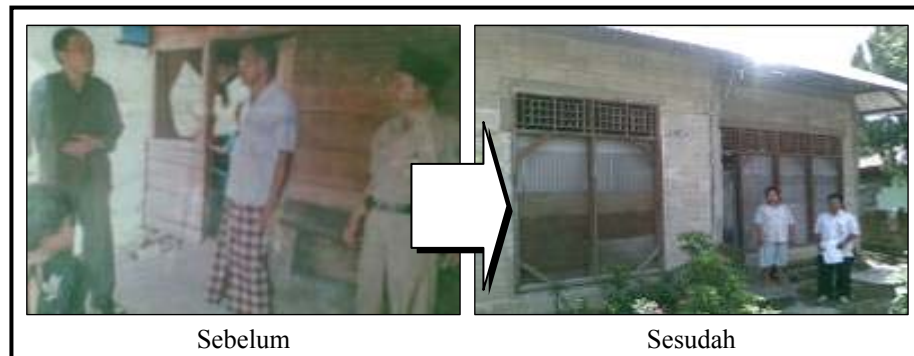
Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Nurmis meningkat sebesar 38,67% dari kondisi awal 22,58% menjadi 61,25%. Peningkatan kualitas terjadi pada komponen struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela, kuda-kuda dan penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 2,85% sampai dengan 12,50%.

2. Novriandi (*Mustahik* Kec. Lubuk Kilangan)

Mustahik bernama Novriandi yang berusia 36 tahun ini hidup dengan seorang istri dan dua orang anak yang berusia 8 dan 10 tahun. Mereka tinggal di rumah kayu yang sekaligus berfungsi sebagai warung kecil menjual rokok dan makanan-makanan kecil.

Warga Kecamatan Lubuk Kilangan ini merupakan seorang kepala rumah tangga yang bekerja sebagai sopir truk cadangan. *Mustahik* ini hanya dipanggil bekerja jika sopir utama berhalangan bekerja. Diluar pekerjaannya, Novriandi aktif sebagai pengurus sebuah mesjid di lingkungan rumahnya.



Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.9 DOKUMENTASI BEDAH RUMAH NOVRIANDI (*MUSTAHIK* KEC. LUBUK KILANGAN)

Gambar diatas merupakan foto dokumentasi kondisi rumah Novriandi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Luas rumah kayu sebelumnya 16,00 m² bertambah menjadi seluas 26,50 m², jadi terjadi penambahan luas rumah sebesar 10,50 m².

Dalam pelaksanaan kegiatan, rumah Novriandi yang sebelumnya berupa rumah kayu tidak panggung dengan dinding kayu dan lantai rabat beton dirobohkan dan dibangun kembali sebuah rumah tembok diatas lahan rumah sebelumnya.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.10
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH NOVRIANDI (MUSTAHIK KEC. LUBUK KILANGAN)

TABEL IV.14
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
NOVRIANDI (MUSTAHIK KEC. LUBUK KILANGAN)

Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	2,22	2,78	4,62	2,78	0,56	0,00	5,84	2,00	0,00	0,00	20,79
Sesudah	3,68	9,20	9,20	5,52	3,68	0,00	12,88	2,00	0,00	0,00	46,17
Perubahan Kualitas	1,46	6,42	4,58	2,74	3,13	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	25,38

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Novriandi meningkat sebesar 25,38% dari kondisi awal 20,79% menjadi 46,17%. Perubahan kualitas rumah terjadi pada komponen pondasi, struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela, kuda-kuda dan penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 1,46% sampai dengan 7,05%.

3. Ilyas (*Mustahik* Kec. Lubuk Begalung)

Mustahik yang merupakan seorang pegawai bengkel motor bernama Ilyas ini bermukim di rumah kecil yang terbuat dari kayu dan berlantai papan bersama istri, ibu mertua dan anak-anak. Warga Kecamatan Lubuk Begalung ini berusia 53 tahun ini memiliki tiga orang anak yang masing-masing berusia 12, 16 dan 22 tahun.



Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.11
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
ILYAS (*MUSTAHIK* KEC. LUBUK BEGALUNG)

Gambar diatas merupakan foto dokumentasi kondisi rumah Ilyas sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Luas rumah sebelumnya 30,00 m² bertambah menjadi 44,00 m². Jadi terdapat penambahan luas ruangan sebesar 14 m².

Dalam observasi penelitian Ilyas menerangkan bahwa rumah mereka sebelumnya berupa rumah kayu panggung dengan material dinding dan lantai dari kayu/papan, dibongkar dan kemudian dibangun kembali sebuah rumah tembok dengan atap seng. Namun karena keterbatasan anggaran, rumah ini masih belum memiliki dinding sekat pembatas ruangan, sehingga mereka terpaksa tinggal di rumah tanpa ada pembatas ruangan.



Kuda-kuda kayu banio kelas II menunjukkan konstruksi yang kokoh dan kuat dengan penutup atap seng untuk pelindung panas, hujan dan angin.

Dinding rumah sebelumnya dengan material kayu/papan diganti dengan *hollowbrick* diikat dengan struktur rangka beton bertulang.

Kusen-panil pintu dan jendela menggunakan kayu banio, berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari.

Lantai rumah panggung sebelumnya yang menggunakan material papan, sekarang menggunakan rabat beton kedap air dan elevasi >10cm diatas permukaan tanah pekarangan.

Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.12
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH ILYAS (MUSTAHIK KEC. LUBUK BEGALUNG)

TABEL IV.15
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
ILYAS (MUSTAHIK KEC. LUBUK BEGALUNG)

Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	1,85	3,47	4,63	3,47	1,39	0,00	4,86	1,00	0,00	13,34	34,01
Sesudah	4,07	10,19	10,19	4,07	4,07	0,00	14,26	1,00	0,00	13,34	61,19
Perubahan Kualitas	2,22	6,71	5,56	0,60	2,69	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	27,18

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Kondisi rumah Ilyas meningkat sebesar 31,82% dari kondisi awal 27,64% menjadi 59,46%. Perubahan kualitas rumah ditemui pada komponen pondasi, struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela dan kuda-kuda serta penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 0,60% sampai dengan 9,40%.

4. Azizah (*Mustahik* Kec. Padang Selatan)

Mustahik yang merupakan seorang janda bernama Azizah berusia 61 tahun ini bermukim di sebuah rumah bersama 2 orang anak dan 7 orang cucu. Keluarga yang merupakan warga Kecamatan Padang Selatan ini menggantungkan hidup mereka kepada anak sulung Azizah yang bekerja sebagai guru honorer di sebuah SMA Negeri di Kota Padang. Anak bungsu Azizah merupakan seorang garin di mesjid lingkungan dekat rumah Azizah.



Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.13 DOKUMENTASI BEDAH RUMAH RUMAH AZIZAH (*MUSTAHIK* KEC. PADANG SELATAN)

Gambar diatas merupakan foto kondisi rumah Azizah sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah tahun 2008. Rumah dengan material dinding anyaman bambu dan berlantai papan ini merupakan rumah peninggalan orang tua Azizah dan belum memiliki akses jaringan listrik.

Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak ada pengembangan ruang atas rumah yang sebelumnya berupa rumah kayu panggung ini. Luas rumah tidak berubah dari 48,00 m², kegiatan bedah hanya berupa perbaikan dinding dan material pintu dan jendela rumah.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.14
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH AZIZAH (MUSTAHIK KEC. PADANG SELATAN)

TABEL IV.16
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
AZIZAH (MUSTAHIK KEC. PADANG SELATAN)

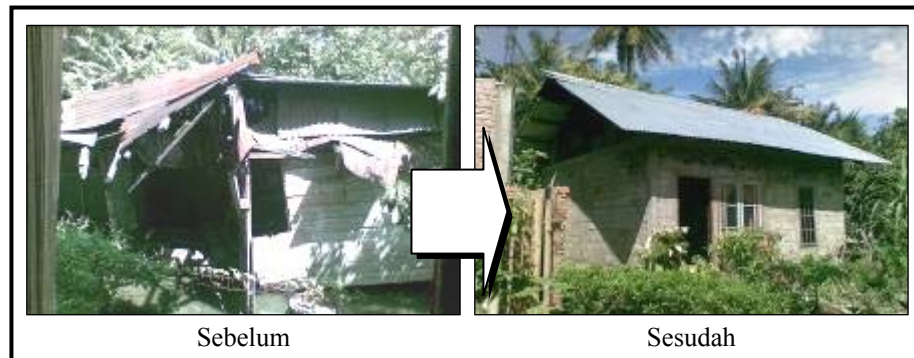
Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	2,67	5,00	6,67	3,33	0,67	2,40	9,33	2,00	0,00	20,00	52,07
Sesudah	2,67	5,00	6,67	4,00	2,67	2,40	9,33	2,00	0,00	20,00	54,74
Perubahan Kualitas	0,00	0,00	0,00	0,67	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Azizah meningkat sebesar 2,67% dari kondisi awal 52,07% menjadi 54,74%. Peningkatan kualitas terjadi pada komponen dinding serta pintu dan jendela dengan besar peningkatan 0,67% dan 2,00%.

5. Mukhni (*Mustahik* Kec. Padang Timur)

Mustahik bernama Mukhni ini merupakan seorang duda berusia 50 tahun dan memiliki pekerjaan tidak tetap sebagai kuli bangunan. Warga Kecamatan Padang Timur ini tinggal di sebuah gubuk tanpa akses listrik dan fasilitas jamban bersama dua orang anak gadisnya yang berusia 12 dan 23 tahun.

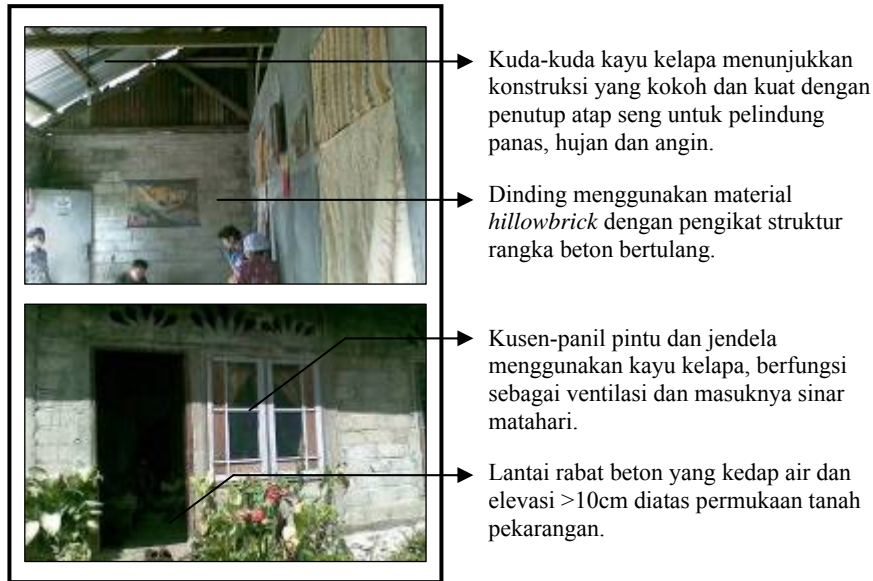


Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.15
DOKUMENTASI BEDAH RUMAH
RUMAH MUKHNI (*MUSTAHIK* KEC. PADANG TIMUR)

Gambar diatas merupakan foto kondisi rumah Mukhni sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Luas rumah yang sebelumnya hanya 18,75 m² bertambah menjadi 30,00 m². Terjadi penambahan luas rumah sebesar 11,25 m².

Dalam pelaksanaan kegiatan, rumah Mukhni yang sebelumnya berupa rumah kayu panggung berlantai papan, dinding kayu dan berdiri diatas sebuah tambak ini tidak diperbaiki. Kondisi lahan rumah diatas tambak menyulitkan penyelenggara bedah rumah untuk membangun rumah diatas tambak tersebut, sehingga untuk keluarga Mukhni ini dibangun kembali sebuah rumah tembok disamping rumah lama yang sudah tidak layak huni tersebut.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.16
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH MUKHNI (MUSTAHIK KEC. PADANG TIMUR)

TABEL IV.17
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
MUKHNI (MUSTAHIK KEC. PADANG TIMUR)

Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	0,58	2,17	7,24	5,21	1,74	0,00	9,12	2,00	0,00	0,00	28,05
Sesudah	5,00	12,50	12,50	7,50	4,38	0,00	17,50	2,00	0,00	0,00	61,38
Perubahan Kualitas	4,42	10,33	5,26	2,29	2,64	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	33,33

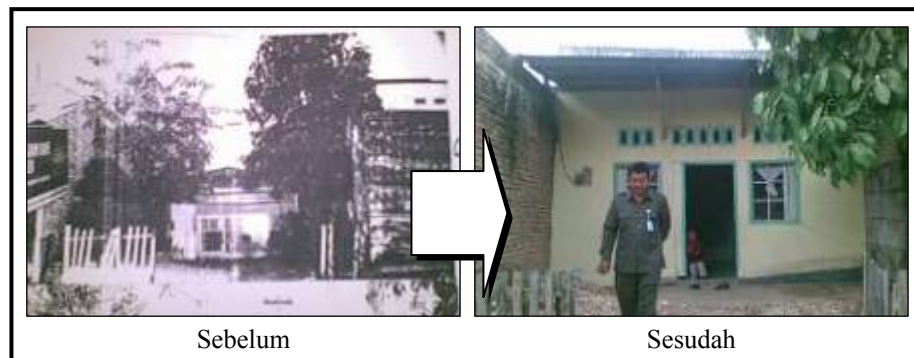
Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Mukhni meningkat sebesar 33,33% dari kondisi awal 28,05% menjadi 61,38%. Peningkatan kualitas terjadi pada komponen pondasi, struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela, kuda-kuda dan penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 2,29% sampai dengan 10,33%.

6. Mukhtar (*Mustahik* Kec. Padang Barat)

Mustahik bernama Mukhtar yang berusia 45 tahun ini memiliki pekerjaan tidak tetap *ustad* dan guru mengaji. Warga Kecamatan Padang Barat ini tinggal di sebuah rumah bersama istri dan empat orang anak gadisnya yang berusia 9, 11, 16 dan 19 tahun.

Mukhtar merupakan keluarga miskin yang tinggal di rumah peninggalan mertuanya. Di rumah ini mereka mulai berumah tangga sejak 22 tahun yang lalu.

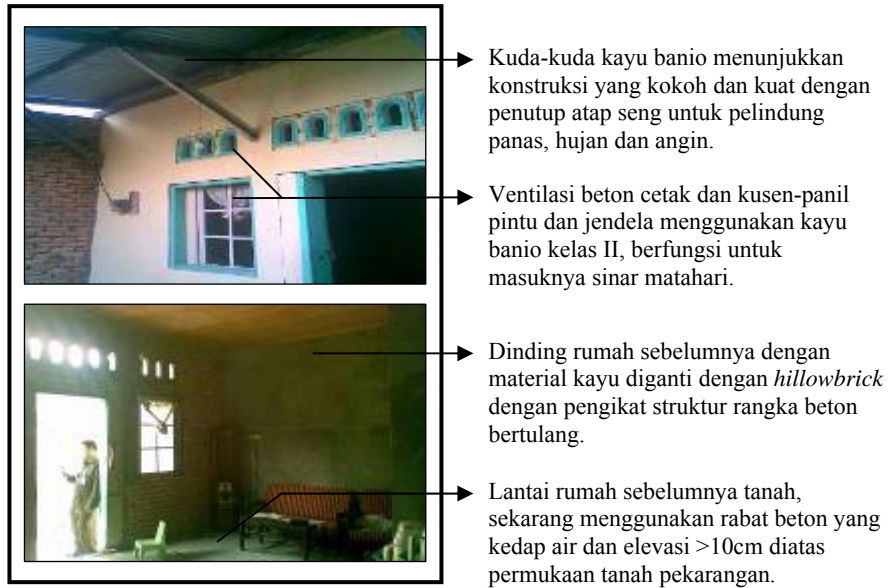


Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.17
DOKUMENTASI BEDAH RUMAH
RUMAH MUKHTAR (*MUSTAHIK* KEC. PADANG BARAT)

Gambar diatas merupakan foto kondisi rumah Mukhtar sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Luas rumah yang sebelumnya hanya 50,00 meter persegi bertambah menjadi 66,50 meter persegi. Jadi dapat dilakukan penambahan luas ruangan sebesar 16,50 meter persegi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, rumah Mukhtar yang sebelumnya berupa rumah kayu dengan dinding yang sudah keropos, sebagiannya direnovasi menjadi rumah tembok.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.18
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH MUKHTAR (*MUSTAHIK* KEC. PADANG BARAT)

TABEL IV.18
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
MUKHTAR (*MUSTAHIK* KEC. PADANG BARAT)

Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	4,63	5,79	1,94	5,79	2,90	0,00	12,16	4,00	2,25	20,00	59,45
Sesudah	5,00	9,38	12,50	8,75	3,75	6,00	15,31	4,00	2,25	20,00	86,94
Perubahan Kualitas	0,37	3,59	10,56	2,96	0,85	6,00	3,15	0,00	0,00	0,00	27,49

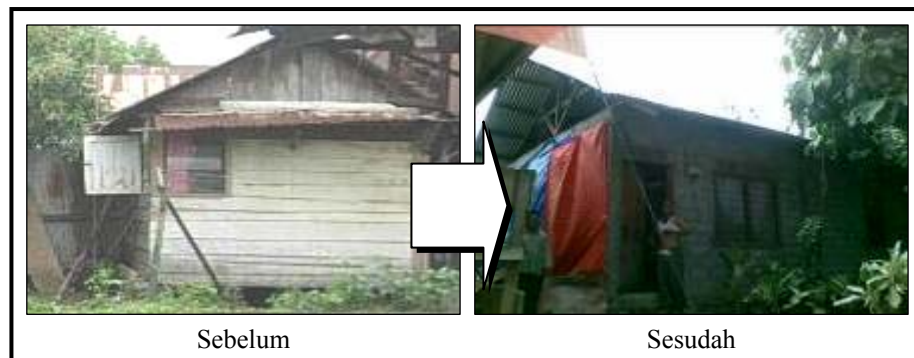
Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Mukhtar meningkat sebesar 27,49% dari kondisi awal 59,45% menjadi 86,94%. Peningkatan kualitas terjadi pada komponen pondasi, struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela, kuda-kuda dan penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 0,37% sampai dengan 10,56%.

7. Syamsuir (*Mustahik* Kec. Padang Utara)

Mustahik bernama Syamsuir ini merupakan seorang duda berusia 58 tahun dan memiliki pekerjaan tidak tetap sebagai pedagang jengkol dan sayur-sayuran di pasar kota. Warga Kecamatan Padang Utara ini tinggal di sebuah rumah kayu bersama istri, dua orang anak laki-laki dan empat anak perempuan.

Syamsuir yang merupakan seorang tamatan SMP ini tinggal di rumah ini sejak berumah tangga. Mereka membangun sebuah rumah kayu yang sekarang sudah berusia 30 tahun.



Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.19
FOTO SEBELUM DAN SESUDAH DIBEDAH
RUMAH SYAMSUIR (*MUSTAHIK* KEC. PADANG UTARA)

Gambar diatas merupakan foto kondisi rumah Syamsuir sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Luas rumah yang sebelumnya hanya 35,75 m² bertambah menjadi 57,25 m².

Dalam pelaksanaan kegiatan, rumah Syamsuir yang sebelumnya berupa rumah kayu tidak panggung direnovasi menjadi rumah tembok. Bangunan ini didirikan diatas lahan bangunan lama dengan menggunakan sebagian material rumah sebelumnya yang masih dapat digunakan.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.20
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH SYAMSUIR (MUSTAHIK KEC. PADANG UTARA)

TABEL IV.19
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
SYAMSUIR (MUSTAHIK KEC. PADANG UTARA)

Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	2,48	3,10	0,00	3,10	1,24	0,00	4,34	2,00	2,25	13,33	31,86
Sesudah	3,98	7,45	9,94	5,96	2,98	0,00	12,52	2,00	2,25	13,33	60,42
Perubahan Kualitas	1,49	4,35	9,94	2,86	1,74	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	28,56

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Syamsuir meningkat sebesar 28,56% dari kondisi awal 31,86% menjadi 60,42%. Peningkatan kualitas terjadi pada komponen pondasi, struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela, kuda-kuda dan penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 1,49% sampai dengan 9,94%.

8. Sukamto Yoka (*Mustahik* Kec. Nanggalo)

Mustahik bernama Sukamto Yoka ini merupakan seorang kepala rumah tangga berusia 55 tahun dan memiliki pekerjaan tidak tetap sebagai kuli bangunan. Warga Kecamatan Nanggalo ini tinggal di sebuah gubuk kayu dan berdinding mayoritas seng bekas bersama istri dan lima orang anaknya. Sukamto memiliki tingkat pendidikan SMP namun tidak sanggup menyekolahkan anak-anaknya.

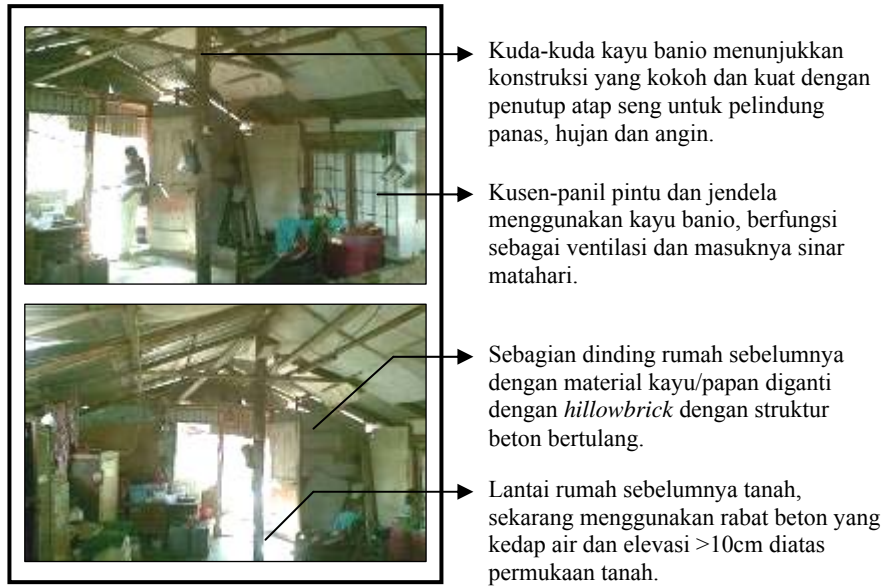


Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.21
DOKUMENTASI BEDAH RUMAH
RUMAH SUKAMTO YOKA (*MUSTAHIK* KEC. NANGGALO)

Gambar diatas merupakan foto kondisi rumah Sukamto Yoka sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Luas rumah yang sebelumnya hanya 30,00 meter persegi bertambah menjadi 48,00 meter persegi. Jadi diperoleh penambahan luas ruangan sebesar 18 meter persegi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, rumah Sukamto Yoka yang sebelumnya berupa rumah kayu tidak panggung direnovasi menjadi sebagian rumah tembok.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.22
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH SUKAMTO YOKA (MUSTAHIK KEC. NANGGALO)

TABEL IV.20
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
SUKAMTO YOKA (MUSTAHIK KEC. NANGGALO)

Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	2,38	1,49	5,95	2,98	0,90	0,00	2,09	2,00	3,38	6,67	27,83
Sesudah	3,81	4,76	9,52	5,71	1,43	0,00	6,67	2,00	3,38	6,67	43,96
Perubahan Kualitas	1,43	3,27	3,57	2,74	0,54	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	16,13

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Sukamto Yoka meningkat sebesar 16,13% dari kondisi awal 27,38% menjadi 43,96%. Peningkatan kualitas terjadi pada komponen pondasi, struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela, kuda-kuda dan penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 0,54% sampai dengan 4,58%.

9. Rusdi (*Mustahik* Kec. Kuranji)

Mustahik bernama Rusdi ini merupakan seorang kepala rumah tangga berusia 42 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai kuli tani. Warga Kecamatan Kuranji ini tinggal di sebuah gubuk tanpa akses listrik, air bersih dan fasilitas jamban bersama empat orang anaknya.

Keluarga Rusdi yang menempati gubuk diatas lahan peninggalan orang tua istrinya ini memasak menggunakan bahan bakar kayu api.

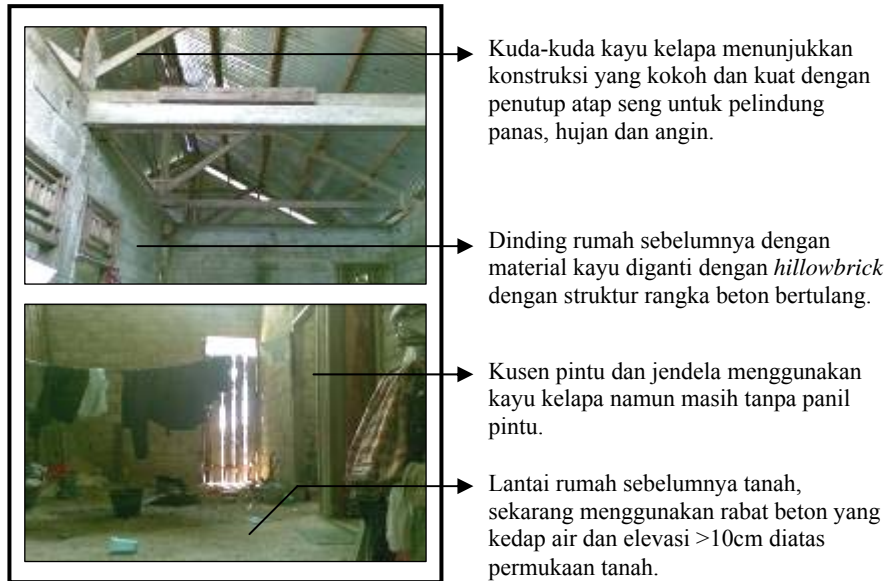


Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.23
DOKUMENTASI BEDAH RUMAH
RUMAH RUSDI (*MUSTAHIK* KEC. KURANJI)

Gambar diatas merupakan foto kondisi rumah Rusdi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Luas rumah yang sebelumnya hanya 36,00 meter persegi bertambah menjadi 51,00 meter persegi. Jadi diperoleh penambahan luas ruangan sebesar 15 meter persegi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, rumah Rusdi yang sebelumnya berupa rumah kayu tidak panggung tidak direnovasi, melainkan dibangun lagi sebuah rumah tembok yang didirikan disamping rumah lama, sedangkan rumah lama dimanfaatkan sebagai kandang ternak.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.24
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH RUSDI (MUSTAHIK KEC. KURANJI)

TABEL IV.21
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
RUSDI (MUSTAHIK KEC. KURANJI)

Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	1,10	2,09	2,78	3,33	1,25	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	19,31
Sesudah	4,72	11,81	10,23	7,08	3,54	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	53,91
Perubahan Kualitas	3,62	9,72	7,45	3,75	2,29	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	34,60

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Rusdi meningkat sebesar 34,60% dari kondisi awal 19,31% menjadi 53,91%. Peningkatan kualitas terjadi pada komponen pondasi, struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela, kuda-kuda dan penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 2,29% sampai dengan 9,72%.

10. Aminah (*Mustahik* Kec. Pauh)

Mustahik bernama Aminah ini merupakan seorang janda berusia 45 tahun dan memiliki pekerjaan tidak tetap sebagai kuli tani. Warga Kecamatan Pauh ini tinggal di sebuah gubuk tanpa akses listrik dan air bersih bersama satu orang adik dan enam orang anaknya.

Aminah tinggal di rumah kayu peninggalan suaminya yang meninggal dunia sembilan tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak mampu menyekolahkan keenam orang anaknya.



Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.25
DOKUMENTASI BEDAH RUMAH
RUMAH AMINAH (*MUSTAHIK* KEC. PAUH)

Gambar diatas merupakan foto kondisi rumah Aminah sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Luas rumah yang sebelumnya hanya 35,00 meter persegi bertambah menjadi 56,00 meter persegi. Jadi diperoleh penambahan luas ruangan sebesar 21 meter persegi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, rumah Aminah yang sebelumnya berupa rumah kayu panggung dengan jendela kawat dan berlantai papan yang sudah keropos direnovasi menjadi sebuah rumah tembok.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.26
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH AMINAH (MUSTAHIK KEC. PAUH)

TABEL IV.22
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
AMINAH (MUSTAHIK KEC. PAUH)

Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	2,43	3,04	0,00	2,43	1,22	0,00	4,25	2,00	0,00	0,00	15,37
Sesudah	3,89	9,72	9,72	7,78	2,43	0,00	13,61	2,00	0,00	0,00	49,16
Perubahan Kualitas	1,46	6,68	9,72	5,35	1,22	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	33,79

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Aminah meningkat sebesar 33,79% dari kondisi awal 15,37% menjadi 49,16%. Peningkatan kualitas terjadi pada komponen pondasi, struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela, kuda-kuda dan penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 1,22% sampai dengan 9,36%.

11. Sarbaini (*Mustahik* Kec. Koto Tangah)

Mustahik bernama Sarbaini ini merupakan seorang kepala rumah tangga berusia 57 tahun dan memiliki pekerjaan tidak tetap sebagai kuli muat batu kali di sungai yang berlokasi tidak jauh dari rumah mereka.

Warga Kecamatan Koto Tangah ini tinggal di sebuah gubuk kayu tanpa akses listrik bersama istri, dua orang anak, dua adik ipar dan satu ibu mertua.



Sumber ; BAZ Kota Padang, 2008 dan Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.27
DOKUMENTASI BEDAH RUMAH
RUMAH SARBAINI (*MUSTAHIK* KEC. KOTO TANGAH)

Gambar diatas merupakan foto kondisi rumah Sarbaini sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan bedah rumah. Dalam pelaksanaan kegiatan, dana zakat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah baru disamping rumah Sarbaini sebelumnya.

Sekarang, keluarga Sarbaini hidup di rumah baru dengan tetap memanfaatkan rumah lama mereka. Luas rumah yang sebelumnya hanya 23,00 meter persegi bertambah menjadi 59,00 meter persegi. Jadi diperoleh penambahan luas ruangan sebesar 36 meter persegi.



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.28
FOTO KOMPONEN RUMAH SETELAH KEGIATAN
RUMAH SARBAINI (MUSTAHIK KEC. KOTO TANGAH)

TABEL IV.23
PENINGKATAN BOBOT KUALITAS RUMAH
SARBAINI (MUSTAHIK KEC. KOTO TANGAH)

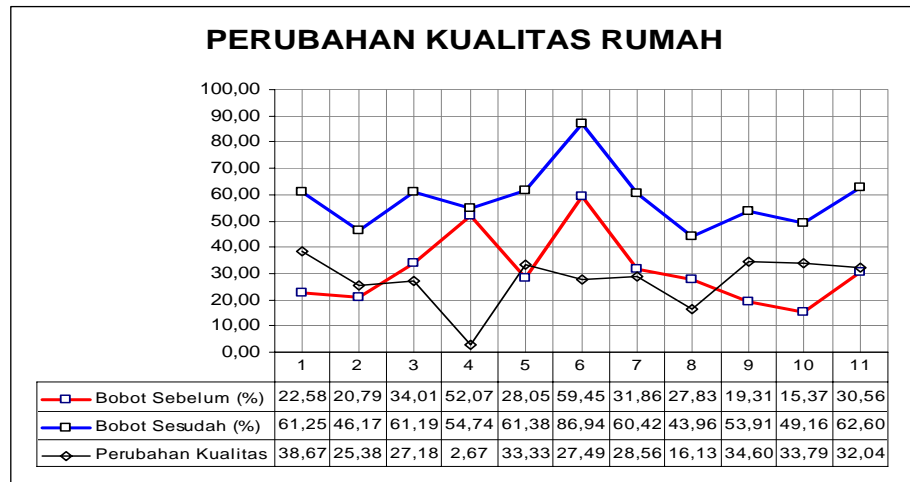
Bedah Rumah	Bobot Masing-Masing Komponen Rumah (%)										Jumlah (%)
	Pondasi	Struktur	Lantai	Dinding	P&J	Plafon	Atap&K	Air B.	Listrik	Jamban	
Sebelum	0,70	2,66	4,44	2,66	1,06	0,00	3,73	2,00	0,00	13,30	30,56
Sesudah	3,33	9,38	11,46	7,50	2,50	0,00	13,13	2,00	0,00	13,30	62,60
Perubahan Kualitas	2,63	6,72	7,02	4,84	1,44	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	32,04

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi rumah Sarbaini meningkat sebesar 32,04% dari kondisi awal 30,56% menjadi 62,60%. Peningkatan kualitas terjadi pada komponen pondasi, struktur, lantai, dinding, pintu dan jendela, kuda-kuda dan penutup atap dengan besar peningkatan bervariasi antara 1,44% sampai dengan 9,40%.

4.4.2 Rekapitulasi Bentuk Pemanfaatan Dana Zakat Dalam peningkatan Kualitas Rumah

Berdasarkan pembobotan peningkatan kualitas rumah pada masing-masing rumah penerima kegiatan bedah rumah pada sub bab sebelumnya, dapat ditampilkan diagram perubahan kualitas masing-masing rumah penerima kegiatan bedah rumah sebagai berikut ;



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.29
PERUBAHAN KUALITAS MASING-MASING RUMAH
PENERIMA KEGIATAN BEDAH RUMAH

Diagram diatas menampilkan kondisi awal rumah *mustahik* sebelum pelaksanaan kegiatan bedah rumah yang bervariasi antara 15,37% sampai dengan 59,4%. Sedangkan kondisi sesudah pelaksanaan bedah rumah bervariasi antara 43,96% sampai dengan 86,94%.

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat dalam rangka peningkatan kualitas rumah pada masing-masing *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah di Kota Padang bervariasi antara 2,67% sampai dengan 38,67% atau pada skala rata-rata sebesar 27,26%.

Angka ini membuktikan bahwa bantuan pembiayaan yang bersumber dari dana zakat telah berhasil meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin. Fakta ini mendukung teori Panudju (1999:93) yang menyatakan bahwa pengadaan perumahan kota masyarakat berpenghasilan rendah tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya intervensi atau bantuan dari pihak luar.

4.5 Analisis Persepsi Masyarakat Penerima Zakat Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui peranan zakat ditinjau dari persepsi *mustahik* terhadap perubahan kualitas rumah setelah bedah rumah diselenggarakan. Untuk mengukur kepuasan *mustahik* digunakan parameter pemenuhan tiga kebutuhan tingkat rendah.

4.5.1 Persepsi Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis

Tabel berikut merupakan hasil wawancara penelitian terhadap 11 *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah terkait persepsi mereka terhadap pemenuhan kebutuhan fisiologis pasca bedah rumah. Kebutuhan fisiologis ini mencakup kebutuhan dasar akan perlindungan terhadap panas, hujan dan angin.

**TABEL IV.24
DISTRIBUSI FREKUENSI PERSEPSI *MUSTAHIK*
TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIOLOGIS**

No.	PERSEPSI <i>MUSTAHIK</i>	FREKUENSI	%
1.	Sangat Puas	1	9,09
2.	Cukup Puas	6	54,55
3.	Kurang Puas	1	9,09
4.	Tidak Puas	3	27,27
5.	Sangat Tidak Puas	0	0,00
	Jumlah	11	100,00

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan fisiologis, 1 dari 11 *mustahik* menilai bahwa rumah mereka merasa sangat puas terhadap kondisi rumah pasca bedah rumah sebagai tempat berlindung dari cuaca hujan, panas dan angin. Berikut kutipan wawancara dengan *mustahik* ini;

“Saya merasa sangat puas akan perlindungan rumah yang baru terhadap ancaman cuaca hujan, panas dan angin, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi fisik gubuk saya sebelumnya yang hampir roboh, atap bocor dan dinding yang sudah lapuk”

Mustahik yang menyatakan cukup puas memiliki persentase terbesar yakni 54,55%. Pada umumnya, mereka yang berjumlah 6 dari 11 *mustahik* ini menggunakan tolak ukur kondisi fisik rumah mereka sebelum pelaksanaan bedah rumah dengan kondisi sekarang;

“Kami cukup puas akan pemenuhan kebutuhan berlindung dari panas dan hujan. Sebelumnya rumah kami hanya berupa gubuk kayu keropos dengan lantai tanah yang akan segera becek jika hujan turun..”

Terdapat 1 dari 11 atau sebesar 9,09% *mustahik* yang menyatakan kurang puas terhadap peningkatan kualitas rumah mereka sebagai tempat berlindung dari cuaca hujan, panas dan angin. Berikut kutipan wawancara dengan *mustahik* ini;

“Saya merasa kurang puas akan pemenuhan kebutuhan berlindung dari panas dan hujan oleh rumah sekarang. Secara fisik gubuk kami yang lama juga memadai tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang”

Mustahik yang menyatakan tidak puas memiliki persentase 27,27% atau 3 dari 11 *mustahik*. Berikut kutipan wawancara dengan tiga *mustahik* tersebut;

“Kami merasa tidak puas, terutama karena tidak adanya penutup singok menyebabkan tempias air hujan mudah masuk ke dalam rumah”

“Saya merasa tidak ada perubahan yang berarti pada rumah kami, perbaikan hanya pada komponen dinding, pintu dan jendela saja”

4.5.2 Persepsi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Akan Rasa Aman

Tabel berikut merupakan hasil wawancara terhadap 11 *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah terkait persepsi terhadap pemenuhan kebutuhan akan rasa aman pasca kegiatan bedah rumah. Kebutuhan akan rasa aman ini mencakup keamanan diri keluarga dan harta benda penghuni.

TABEL IV.25
DISTRIBUSI FREKUENSI PERSEPSI *MUSTAHIK*
TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN AKAN RASA AMAN

No.	PERSEPSI <i>MUSTAHIK</i>	FREKUENSI	%
1.	Sangat Puas	1	9,09
2.	Cukup Puas	7	63,64
3.	Kurang Puas	1	9,09
4.	Tidak Puas	2	18,18
5.	Sangat Tidak Puas	0	0,00
Jumlah		11	100,00

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dalam pemenuhan kebutuhan akan rasa aman, 1 dari 11 *mustahik* mengaku sangat puas terhadap pemenuhan kebutuhan akan rasa aman;

“Saya membandingkan dengan kondisi gubuk sebelumnya yang sekaligus berfungsi sebagai warung sering mengalami kemalingan. Dinding kayu keropos mengundang niat jahat orang lain untuk mengambil isinya”

Mustahik yang menyatakan persepsi cukup puas memiliki persentase terbesar yakni 63,64% dari *mustahik* atau sejumlah 7 dari 11 *mustahik*. Berikut kutipan wawancara dengan tujuh *mustahik* tersebut;

“Kami merasa cukup aman di rumah yang baru sekarang, apalagi hidup dengan status janda tanpa figur suami sebagai pelindung turut menuntut kebutuhan akan rumah seperti sekarang..”

“Jika dibandingkan dengan kondisi rumah sebelumnya, rumah sekarang jauh lebih aman. Namun kami tidak memiliki banyak harta benda jadi tidak terlalu memprioritaskan keamanan harta benda”

“Kami merasa cukup puas terhadap rasa aman di rumah sekarang, terutama terhadap gangguan ular berbisa dan orang berniat jahat. Selain itu kami dapat menyimpan padi hasil panen dengan aman”

Mustahik yang memiliki persepsi kurang puas terhadap pemenuhan kebutuhan akan rasa aman hanya 1 dari 11 *mustahik* atau sebesar 9,09% dari *mustahik*. *Mustahik* ini mengungkapkan;

“Saya masih kurang puas terhadap pemenuhan kebutuhan kami akan rasa aman, saya selalu mengkhawatirkan anak gadis saya jika harus pergi ke kamar mandi umum di malam hari..”

Mustahik yang menyatakan tidak puas memiliki persentase 18,18% atau berjumlah 2 dari 11 *mustahik*. Dalam wawancara penelitian, *mustahik* pertama mengungkapkan pernyataan;

“Kami merasa tidak puas, tidak ada yang berubah dalam hal pemenuhan kebutuhan keamanan di rumah kami pasca kegiatan bedah rumah”

Mustahik kedua mengungkapkan pernyataan yang tidak jauh berbeda dari kutipan diatas, mereka menyatakan rasa aman yang mereka rasakan tidak berbeda dengan rasa aman yang mereka rasakan sebelum kegiatan bedah rumah dilaksanakan.

4.5.3 Persepsi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hubungan Sosial

Tabel berikut menggambarkan hasil wawancara terkait persepsi *mustahik* terhadap pemenuhan kebutuhan hubungan sosial pasca kegiatan bedah rumah. Kebutuhan akan hubungan sosial ini mencakup fungsi rumah sebagai wadah kegiatan sosial dan berkumpul bersama tetangga.

TABEL IV.26
DISTRIBUSI FREKUENSI PERSEPSI *MUSTAHIK*
TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUBUNGAN SOSIAL

No.	PERSEPSI <i>MUSTAHIK</i>	FREKUENSI	%
1.	Sangat Puas	0	0,00
2.	Cukup Puas	8	72,73
3.	Kurang Puas	1	9,09
4.	Tidak Puas	2	18,18
5.	Sangat Tidak Puas	0	0,00
	Jumlah	11	100,00

Sumber ; Hasil Survei, 2009

Dilihat dari persepsi *mustahik* terhadap pemenuhan kebutuhan akan hubungan sosial pasca kegiatan bedah rumah, 8 dari 11 atau 72,73% dari *mustahik* menyatakan cukup puas. *Mustahik* ini menyatakan;

“Kami dapat menyelenggarakan kegiatan arisan lingkungan di rumah yang baru dan jika ada famili yang datang dari luar kota, mereka bisa menginap disini”

“Rumah cukup memadai untuk tempat pernikahan adik saya bulan depan..”

“Saya dapat membuka kelas belajar mengaji di rumah sekarang”

“Rumah saya sering dijadikan tempat pertemuan sesama kuli tani”

Satu orang *mustahik* (9,09%) menyatakan kurang puas terhadap pemenuhan kebutuhan akan hubungan sosial pasca kegiatan bedah rumah. Mereka menyatakan;

“Rumah saya kurang memadai untuk tempat pernikahan putri sulung kami beberapa bulan lagi..”

Mustahik yang menyatakan tidak puas terhadap pemenuhan kebutuhan akan hubungan sosial pasca kegiatan bedah rumah berjumlah 2 dari 11 orang atau sebesar 18,18%. *Mustahik* ini mengungkapkan;

“Saya tidak puas sebab tidak ada nilai tambah yang diperoleh dari hasil bedah rumah tahun lalu”

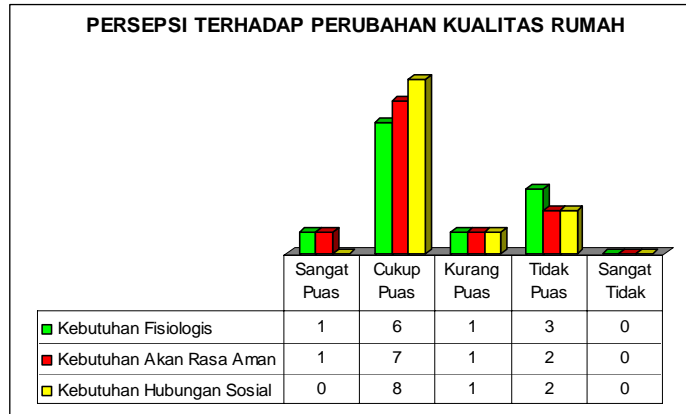
“Saya merasa tidak puas, di rumah kami ini masih belum bisa diadakan kegiatan arisan lingkungan..”

Dari beberapa pernyataan diatas, terlihat bahwa para *mustahik* menggunakan indikator beberapa kegiatan sosial seperti kegiatan pernikahan dan arisan lingkungan sebagai dasar penilaian terhadap peningkatan kualitas rumah dalam hal pemenuhan kebutuhan akan hubungan sosial.

4.5.4 Rekapitulasi Persepsi Terhadap Peningkatan Kualitas Rumah

Persepsi *mustahik* terhadap peningkatan kualitas rumah diukur dengan menggunakan indikator tingkat kepuasan masing-masing

mustahik terhadap pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan hubungan sosial. Adapun rekapitulasi persepsi *mustahik* tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut:



Sumber ; Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.30
DISTRIBUSI FREKUENSI PERSEPSI *MUSTAHIK*
TERHADAP PERUBAHAN KUALITAS RUMAH

Diagram di atas menunjukkan bahwa hanya 1 dari 11 *mustahik* yang menyatakan sangat puas dan rata-rata ditemui 7 dari 11 *mustahik* menyatakan cukup puas terhadap peningkatan nonfisik kualitas rumah mereka. Satu *mustahik* menyatakan kurang puas, dan rata-rata 2 dan 3 dari *mustahik* menyatakan tidak puas terhadap peningkatan kualitas nonfisik rumah mereka.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerima program bedah rumah memiliki persepsi cukup puas terhadap peningkatan kualitas nonfisik rumah pasca pelaksanaan bedah rumah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah nominal dan frekuensi pemberian bantuan yang ada, zakat cukup berhasil memenuhi kebutuhan tingkat rendah (Frederick Herzberg dalam Hasibuan, 1990:177) *mustahik* penerima program bedah rumah di Kota Padang.

4.6 Sintesa Analisis

Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Jika harta sudah mencapai *nishab*, yakni batas minimal harta yang wajib untuk berzakat, dan *khaul* yakni jika sejumlah harta yang mencapai nishabnya dan sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka seseorang diwajibkan segera membayarkan zakatnya (Kurnia, 2008:11). Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang (BAZNAS RI).

Konsep diatas dapat ditemukan dalam jumlah nominal zakat yang terhimpun di Kota Padang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu alokasi untuk kegiatan bedah rumah juga meningkat setiap tahunnya. Tahun 2008 dilaksanakan bedah rumah terhadap 11 unit rumah dengan anggaran Rp. 110 Juta. Tahun 2009 dengan anggaran Rp. 165 Juta untuk 11 rumah dan rencana tahun 2010 dengan anggaran Rp. 1,56 Miliar untuk bedah 104 unit rumah.

Pemerintah harus menyediakan subsidi untuk memperoleh perumahan yang layak bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Ini adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa perumahan adalah sebuah kebutuhan dasar (Santoso, 2002:59).

Konsep tersebut sejalan dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin yang ada di Kota Padang. Bantuan bedah rumah yang bersumber dari dana zakat sebesar Sepuluh Juta Rupiah berhasil meningkatkan kualitas rumah 11 *mustahik* penerima kegiatan bedah rumah dengan bobot peningkatan kualitas rumah bervariasi antara 2,67% sampai dengan 38,67% atau dengan skala rata-rata sebesar 27,26%. Sebagai dana stimulan untuk mendorong adanya bantuan dari sumber lain, jumlah nominal bantuan sebesar Sepuluh Juta

Rupiah tersebut memiliki peran rata-rata sebesar 45,09% dari jumlah total biaya pelaksanaan bedah rumah dengan nilai terendah 31,06% dan nilai tertinggi sebesar 62,62%.

Angka ini membuktikan bahwa bantuan pembiayaan yang bersumber dari dana zakat telah berhasil meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin. Fakta ini sekaligus membenarkan teori Panudju (1999:93) yang menyatakan bahwa pengadaan perumahan kota masyarakat berpenghasilan rendah tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya intervensi atau bantuan dari pihak luar.

Berbeda dengan pernyataan diatas, Bappenas (2003:455) mengungkapkan bahwa dalam konteks penyelenggaraan perumahan yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan perumahan dan permukiman yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat miskin, yang disebabkan karena belum berkembangnya pemahaman bahwa perumahan juga merupakan urusan publik selain urusan individu. Dalam hal ini, eksistensi program bedah rumah di Kota Padang sekaligus membantahkan pendapat tersebut.

Berdasarkan sintesis terhadap analisis variabel dana zakat sebagai bantuan dan variabel peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha Pemerintah Kota Padang dalam mendayagunakan potensi zakat sebagai sumber pembiayaan informal juga sejalan dengan pernyataan UNESCAP (2008-2:14) mengenai penarikan pajak khusus sebagai salah satu strategi untuk menarik dana bagi pembiayaan perumahan. Zakat berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan informal, disamping bentuk koperasi dan arisan yang ada di Indonesia (Yudohusodo, 1991).

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Pembiayaan perumahan sebesar Sepuluh Juta Rupiah pada masing-masing penerima program bedah rumah di Kota Padang memiliki persentase rata-rata sebesar 45,09% terhadap jumlah total biaya peningkatan kualitas rumah. Dalam hal ini zakat sebagai pajak khusus tersebut menempati posisi sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan informal disamping bentuk koperasi dan arisan yang ada di Indonesia.
2. Zakat menjawab kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin mengingat kegagalan pembiayaan formal dalam bentuk kredit bank bersubsidi yang sangat sulit diakses masyarakat miskin yang sering dianggap tidak *bankable*.
3. Dalam pelaksanaan bedah rumah, sebagian besar *mustahik* memiliki persepsi kurang puas terhadap jumlah nominal dan frekuensi pemberian bantuan. Hal ini menunjukkan keberadaan bantuan pembiayaan perumahan melalui dana zakat ini masih dibutuhkan masyarakat miskin.
4. Masing-masing penerima program bedah rumah dana zakat Kota Padang dapat memperbaiki 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) komponen rumah mereka. Perubahan kualitas rumah masing-masing *mustahik* sebesar rata-rata 27,26% tersebut membuktikan bahwa zakat memiliki peran dalam meningkatkan kualitas fisik rumah.
5. Penerima program bedah rumah memiliki persepsi cukup puas terhadap peningkatan kualitas nonfisik rumah pasca pelaksanaan

bedah rumah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah nominal dan frekuensi pemberian bantuan yang ada, zakat cukup berhasil memenuhi kebutuhan tingkat rendah *mustahik* penerima program bedah rumah di Kota Padang.

6. Berdasarkan sintesis terhadap hasil analisis variabel dana zakat sebagai bantuan dan variabel peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin diatas, dapat disimpulkan bahwa dana zakat memiliki peran cukup signifikan dalam peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin di Kota Padang sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan informal.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian dapat dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Padang
 - a. Perlunya mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat Kota Padang.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor. 43 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Padang, BAZ merupakan sebuah badan dibawah Pertimbangan Walikota. Hal ini menyebabkan BAZ tidak dapat berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan. Peraturan Daerah dimaksudkan terutama untuk memberikan kekuatan koordinasi terhadap BAZ dalam pelaksanaan bedah rumah bersama satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan.
 - b. Perlunya peningkatan jumlah alokasi dana zakat untuk program bedah rumah.

Dana zakat didistribusikan dalam 4 (empat) program pengentasan kemiskinan. Tahun 2007, 2008 dan 2009 pengalokasi anggaran untuk bedah rumah memiliki persentase masing-masing 7,9%, 11,8% dan 13,0% terhadap total zakat terhimpun. Mengingat perumahan sebagai kebutuhan pokok dan kondisi masyarakat miskin yang kesulitan untuk mengakses sistem pembiayaan formal, maka perlu dialokasikan dana zakat sebesar minimal 25% dari total zakat terhimpun untuk program bedah rumah.

- c. Perlunya kerjasama dengan PLN dan PDAM dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah.

Dalam pelaksanaan bedah rumah, tidak ditemukan peningkatan kualitas terhadap komponen listrik dan air bersih. Untuk tercapainya peningkatan kualitas rumah berupa pemasangan dan instalasi secara gratis layanan listrik dan air bersih tersebut perlu diupayakan suatu bentuk kerjasama dengan PLN dan PDAM.

2. Untuk *Muzakki*

- a. Perlunya meningkatkan kesediaan untuk membayarkan zakat melalui Badan Amil Zakat.

Jika harta sudah mencapai *nishab* dan *khaul*, maka zakat wajib dibayarkan. Kewajiban ini menyebabkan pemungutan zakat cenderung stabil dan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan kesediaan masyarakat untuk membayarkan zakat khususnya melalui Badan Amil Zakat Kota Padang, sehingga secara sistematis dapat didayagunakan dalam program pengentasan kemiskinan. Hal ini merupakan tantangan terbesar dalam upaya pendayagunaan dana zakat secara nasional, yakni berupa usaha dakwah kewajiban zakat.

3. Untuk *Mustahik*

a. Jumlah nominal bantuan.

Sebaiknya masing-masing *mustahik* memperoleh bantuan yang tidak sama jumlah nominalnya. Nominal bantuan ditentukan berdasarkan kondisi rumah dan besar kecilnya bantuan tambahan.

b. Frekuensi pemberian bantuan.

Secara *syar'i*, zakat diberikan kepada delapan kriteria penerima zakat, merangkap golongan fakir dan miskin. Jadi selama sebuah rumah tangga masih berstatus fakir dan miskin dan memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni, maka mereka masih berhak menerima program bedah rumah.

4. Penelitian Lebih Lanjut

a. Studi perbandingan empat program pengentasan kemiskinan.

Mengingat dana zakat Kota Padang didistribusikan dalam 4 (empat) program pengentasan kemiskinan, yakni bantuan pembiayaan perumahan, bantuan kesehatan, beasiswa pendidikan dan bantuan modal usaha, maka perlu dilakukan studi perbandingan efisiensi dan manfaat pendistribusian dana zakat pada masing-masing program tersebut, sehingga dapat disusun rencana pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas dan manfaat maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adair, John. 2006. *Leadership and Motivation*. Terjemahan Fairano Ilyas. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Budihardjo, Eko. 1998. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, Eko (ed). 2009. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Daljoeni. 1997. *Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Darmawan, Edy dan Purwanto, Edi. 2009. *Percikan Pemikiran Para "Begawan" Arsitek Indonesia: Menghadapi Tantangan Globalisasi, Mangayubagya Purna Tugas Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.*
- Departemen Kesehatan RI. 2003. *Komunikasi & motivasi*. Badan PPSDM - Pusdiklat Kesehatan.
- Frick, Heinz. 1984. *Rumah Sederhana; Kebijakan Perencanaan dan konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hamzah, Andi et al. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Identifikasi Kawasan Kumuh Kota Padang*. 2006. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Infrastruktur Indonesia; Sebelum, Selama dan Pasca Krisis*. 2003. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2001. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.

- Keman, Soedjadi. *Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Bagian Kesehatan Lingkungan FKM Universitas Airlangga. Vol. 2, No. 1, 30 Juli 2005. Hal. 29 -42.
- Koentjaraningrat. 1995. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurnia, Hikmat dan LC, A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Penerbit Qultum Media.
- Kwanda, Timoticin. 2003. *Analisis Kepuasan Penghuni Rumah Sederhana Tipe 36 Di Kawasan Sidoarjo Berdasarkan Faktor Kualitas Bagunan, Lokasi, Desain, Sarana Dan Prasarana*. Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol. 31, No. 2, Desember 2003. Hal. 124-132.
- Lampiran 1 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 tahun 2002 *tentang Pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat*. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah R.I.
- Lampiran Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 *tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara*. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah R.I.
- Moleong, L. J. 2001. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosydakarya.
- Muhtada, Dani. 2008. *The Role of Zakat Organization in Empowering the Peasantry: A Case Study of the Rumah Zakat Yogyakarta Indonesia*. In Obaidullah, Mohammed and Salma Haji Abdul Latiff, Hajah. 2008. *Islamic Finance For Micro and Medium Enterprises*. Brunei Darussalam: Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank. pp. 289-310.
- Nasution, S. 2008. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Noeng Muhadjir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Perumahan Bagi Kaum Miskin di Kota-Kota Asia; Pembiayaan Perumahan. Vol. V*. 2009. UNESCAP dan UN-HABITAT. Terjemahan Wicaksono Sarosa et al. Penerbit UNESCAP dan UN-HABITAT.
- Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman daerah (RP4D) Kota Padang*. 2008. Dinas Pekerjaan Umum. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Padang*. 2008. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Sahhatih, Syauqi Ismail. 2007. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Santoso, Jo et al. 2002. *Sistem Perumahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Perkotaan UI dan Ikatan Ahli Perencanaan.
- Sarwono, Jonathan. 2009. *Statistik Itu Mudah; Panduan Lengkap Untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suprijanto, Iwan. 2004. *Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman*. Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol. 31, No. 2, Desember 2003. Hal. 161-170.
- Tamrin, A.G. 2008. *Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Jilid 1 dan 2 Untuk SMK*. Jakarta: Penerbit Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 *tentang Perumahan dan Pemukiman*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23.

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 *tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164.

Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 *tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

www.padang.go.id (website resmi Pemerintah Kota Padang)

www.dsniamanah.or.id. (website Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah)

PENGANTAR

Kepada Yth. :

*Bapak/Ibu/Sdr/i Kepala Keluarga
Penerima Kegiatan Bedah Rumah Dana Amil Zakat Tahun 2008
Kota Padang*
Di –

Tempat.

Bersama ini saya, mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan dan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang :

Nama : **FADELAN FITRA MASTA**
NIM : **L4D 008 038**

Bermaksud melaksanakan penelitian mengenai peranan zakat dalam rangka peningkatan kualitas rumah melalui kegiatan bedah rumah di Kota Padang. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab daftar pertanyaan (kuesioner) terlampir.

Kuesioner ini digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian tugas akhir perkuliahan, oleh karena identitas Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiaannya.

Sebelum mengisi kuesioner, mohon dibaca petunjuk pengisiannya. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Fadelan Fitra Masta

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

1. Daftar pertanyaan diharapkan diisi oleh Kepala Keluarga.
Apabila Kepala Keluarga tidak dapat mengisi, dapat diisi oleh anggota keluarga yang sudah dewasa.
2. Pilih jawaban yang sesuai dengan memberi ceklist (✓) pada kotak yang disediakan.
3. Jawaban tidak dibatasi pada satu pilihan, Bapak/Ibu dapat memberi tanda lebih dari satu pilihan jawaban, maka pilihlah jawaban yang benar-benar dianggap sesuai menurut Bapak/Ibu.

Contoh cara menjawab :

Tingkat pendidikan Bapak/Ibu :

- Tidak sekolah SD SMP SMA Perguruan Tinggi

Barang apa saja yang Bapak/Ibu miliki sebelum bedah rumah tahun lalu?

- Ternak Sapi Ternak kambing Sepeda Motor Televisi

4. Untuk pertanyaan-pertanyaan berupa isian, isilah dengan jawaban yang singkat dan jelas.

A. IDENTITAS UMUM

1. **Nama Kepala Keluarga** :

2. **Usia** : tahun

3. **Alamat** :

Kecamatan

4. **Agama** :

5. **Tingkat pendidikan :**

- Tidak sekolah SD SMP SMA Perguruan Tinggi

B. IDENTIFIKASI KONDISI MUSTAHIK SEBELUM KEGIATAN BEDAH RUMAH

6. Jumlah penghuni rumah Bapak/Ibu sebelum pelaksanaan bedah rumah tahun lalu :

- Sendiri 2 3 4 5 6 tuliskan jika lebih dari 7 orang

Keterangan : _____

7. Status pekerjaan Bapak/Ibu sebelum pelaksanaan kegiatan bedah rumah tahun lalu :

- Tidak bekerja Memiliki pekerjaan tidak tetap Memiliki pekerjaan tetap

8. Pekerjaan Bapak/Ibu sebelum pelaksanaan kegiatan bedah rumah tahun lalu :

- Pedagang Petani Nelayan Buruh pabrik Karyawan
- Pemulung Sopir Tukang ojek PNS/TNI/Polri

9. Berapa penghasilan/uang yang Bapak/Ibu dapatkan dalam satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan bedah rumah tahun lalu?

- Kurang dari Rp. 600.000 Antara Rp. 600.000,- s/d Rp. 1.000.000
- Antara Rp. 1.000.001 s/d Rp. 1.500.000 Antara Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000
- Lebih dari Rp. 2.000.001

10. Adakah anggota keluarga Bapak/Ibu yang juga bekerja sebelum pelaksanaan kegiatan bedah rumah tahun lalu?

- Tidak ada Ada, yaitu..... (suami/istri, anak, dsb)

11. Berapa penghasilan/uang yang beliau dapatkan dalam satu bulan?

- Kurang dari Rp. 600.000 Antara Rp. 600.000,- s/d Rp. 1.000.000
- Antara Rp. 1.000.001 s/d Rp. 1.500.000 Antara Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000
- Lebih dari Rp. 2.000.001

12. Barang/harta yang Bapak/Ibu miliki sebelum kegiatan bedah rumah tahun lalu ;

Ternak Sapi Kerbau Kambing Sepeda Motor Televisi

13. Bahan Bakar Memasak yang Bapak/Ibu gunakan sebelum pelaksanaan bedah rumah tahun lalu ;

Gas Minyak Tanah Batu Bara Kayu Api

“Terimakasih Atas Bantuan Bapak/Ibu”

KISI-KISI SURVAI INSTANSI

1. Pengelolaan zakat secara umum ;

- a. Pemungutan
- b. Pengelolaan
- c. Pendistribusian

2. Sistem Pembiayaan Kegiatan Bedah Rumah ;

- a. Jumlah nominal bantuan
- b. Frekuensi bantuan
- c. Mekanisme pelaksanaan